

**STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

SKRIPSI

**MUHAMMAD AL-KAHFI
NIM. 4516042006**

UNIVERSITAS

BOSOWA



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

**STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Teknik (S.T)



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, Nomor. A.133/SK/FT/UNIBOS/II/2021 pada tanggal 5 Oktober 2020 Tentang Panitia dan Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Akhir Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, maka :

Pada hari/tanggal : Kamis, 4 Februari 2021

Skripsi atas nama : Muhammad Al-Kahfi

NIM : 45 16 042 016

Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar, telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Negara dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara Jenjang Strata Satu (S-1), pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar.


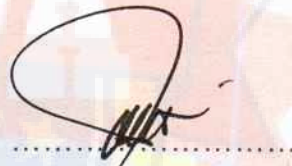
TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si

Sekretaris : Dr.Ir. Syahriar Tato, M.S


Anggota : 1. Ir. Rahmawati Rahman, M.Si

2. Jufriadi, ST,.MSP

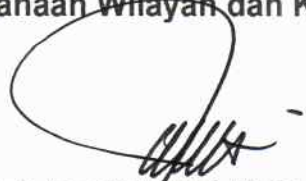


Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01



Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN: 09-170768-01

SKRIPSI

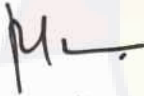
STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD AL-KAHFI
NIM 45 16 042 006

Menyetujui :

Pembimbing I



Ir. Hj. Rahmawati Rahman, M.Si
NIDN: 09-070468-01

Pembimbing II



Jufriadi, ST., MSP
NIDN: 09-310168-02

Mengetahui :

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Bosowa Makassar



Dr. Ridwan, ST., M.Si
NIDN: 09-101271-01

Ketua Program Studi
Perencanaan Wilayah dan Kota



Dr. Ir. Rudi Latief, M.Si
NIDN: 09-170768-01

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Mahasiswa : Muhammad Al-Kahfi

Nim : 4516 042 006

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota Fak. Teknik
Universitas Bosowa Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri, bukan merupakan penggadaan tulisan atau hasil karya orang lain. Bila di kemudian hari terjadi atau ditemukan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,

Februari 2021

Penulis



MUHAMMAD AL-KAFHI

ABSTRAK

MUHAMMAD AL-KAHFI *Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Temate Provinsi Maluku Utara. (dibimbing oleh Rahmawati Rahman dan Jufriadi).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi komoditas unggulan sub sektor perikanan yang ada di kawasan pesisir kota Temate dalam pengembangan kawasan pesisir serta strategi dalam pengembangan kawasan minapolitan

Target penelitian adalah masyarakat yang berada pada wilayah pesisir. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, Data kemudian diproses menggunakan metode statistik yakni analisis LQ dan SWOT.

Hasil perhitungan dengan metoda LQ menunjukkan bahwa nilai LQ sub sektor perikanan di Kota Temate sejak tahun 2010 – 2019 rata-rata 1,062. Ini berarti sub sektor perikanan di Kota Temate adalah merupakan sektor basis yang menjadi penggerak pembangunan di wilayah ini dari hasil pengolahan LQ menunjukkan dengan tingkat produktifitas perikanan tangkap nelayan di Kota Temate sejak tahun 2013 hingga 2019 nilai LQ sub sektor perikanan di Kota Temate lebih besar dari satu ($LQ > 1$) yaitu berkisar antara 1,027 – 1,089. Dengan demikian, selama ini sub sektor perikanan di Kota Temate merupakan sektor basis.

Hasil olahan data dengan SWOT menunjukkan bahwa dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh diperoleh hasil bahwa faktor-faktor Internal (kekuatan dan kelemahan) lebih besar pengaruhnya dibanding faktor eksternal (peluang dan ancaman), terhadap pengembangan kawasan minapolitan di Kota Temate, dengan rasio sebesar 10, 96 : 4, 97.

Kata Kunci : *Potensi, konsep strategi pengembangan kawasan pesisir*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA"**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelas Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar. saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

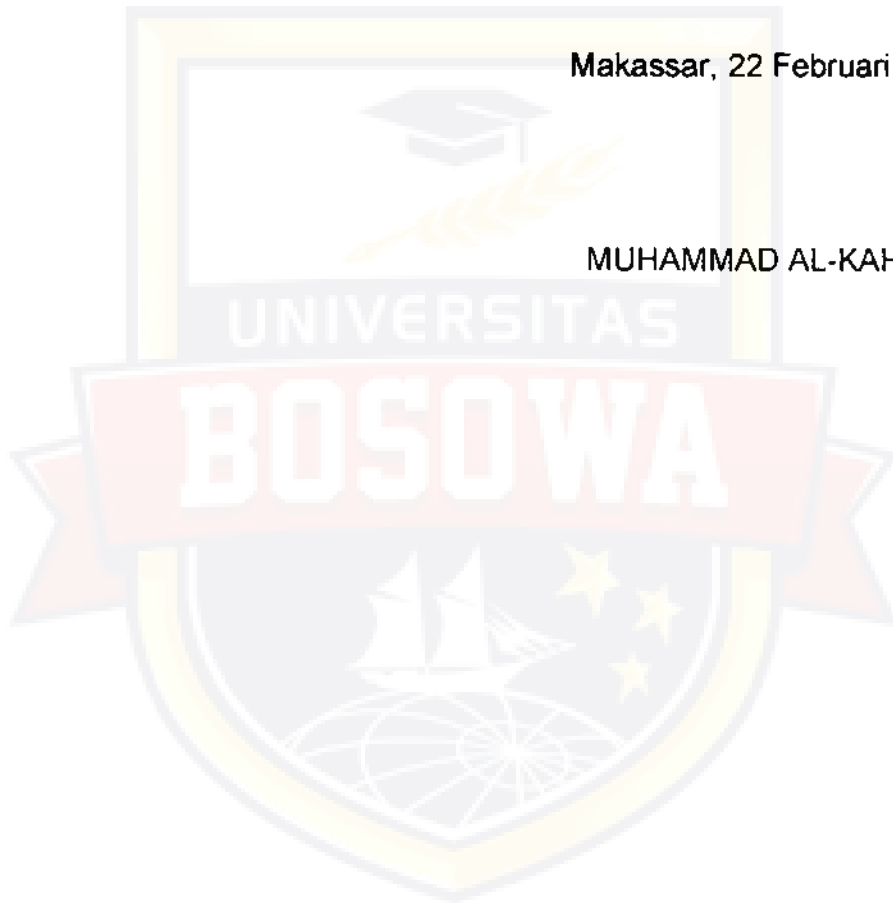
1. Dr. Ridwan ST, M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Bosowa Makassar dan. Dr. Ir Rudi Latief, M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Bosowa Mkaasar.
2. Ibu Ir. Hj. Rahmawati Rahman, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Jufriadi. ST.MSP selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Tak terhingga ucapan terima kasih kepada dosen-dosen program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Bososwa Makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama berada di bangku perkuliahan.
4. Pihak instansi pemernitah Kota Ternate pengelola PPN Kota Ternateyang telah banyak membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Terkhususnya kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan kasih sayang dan doa, dukungan meterial dan moral serta kepercayaan kepada saya.

6. Sahabat-sahabat seperjuangan Perencanaan Wilayah dan Kota angkatan 2016 terima kasih atas bantuan dan kerja sama selama ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Makassar, 22 Februari 2021

MUHAMMAD AL-KAHFI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Batasan Masalah	4
E. Lingkup dan Batasa Penelitian	5
F. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Ruang Pesisir	7
B. Tipologi Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai	8
C. Tipologi Pantai	11
D. Teori Pengembangan Wilayah	18
E. Tujuan Pengembangan Wilayah	21
F. Teori Pertumbuhan Wilayah	22
G. Teori Resource Endowment	23
H. Teori Export Base	24
I. Wilayah sebagai Suatu Elemen Struktur Spasial	25
J. Tinjauan Permen KP Nomor : Per/12/Men/2010 Tentang Minapolitan	33

K.	Konsep Pemanfaatan Ruang Pesisir	38
L.	Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya Alam Untuk Pengembangan Wilayah.....	45
M.	Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir.....	51
N.	Tinjauan Revisi RTRW Kota Ternate	57
O.	Kerangka Pikir	62
BAB III METODE PENELITIAN.....		63
A.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	63
B.	Populasi dan Sampel	63
C.	Jenis dan Sumber Data	64
1.	Data Primer	64
2.	Data Sekunder	65
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	65
1.	Kuesioner.....	65
2.	Wawancara Terstruktur	65
E.	Teknik Analisa Data.....	66
F.	Metode Swot.....	68
G.	Definisi Operasional Variabel.....	82
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		87
A.	Gambaran Umum Kota Ternate.....	87
1.	Batas Wilayah Kota Ternate	87
2.	Wilayah Pesisir.....	91
B.	Kondisi Fisik Dasar Wilayah Pesisir.....	92
1.	Topografi	92
2.	Geologi.....	96
a.	Morfologi Kaki Gunung Gamalama.....	96
b.	Morfologi Tubuh dan Puncak Gunung Gamalama....	99
3.	Geomorfologi.....	99

4.	Iklm.....	100
5.	Hidro-Oseanografi.....	103
6.	Batimetri.....	105
C.	Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir	107
1.	Pemanfaatan Lahan Daratan Pesisir.....	107
2.	Penggunaan Lahan Perairan Pesisir.....	112
3.	Kegiatan Perikanan Tangkap	115
D.	Kondisi Infrastruktur Wilayah Pesisir.....	100
1.	Prasarana Perhubungan/Transportasi.....	119
2.	Prasarana Air Bersih	121
3.	Prasarana Sanitasi Lingkungan(Persampahan)	123
4.	Prasarana Listrik / Penerangan	124
E.	Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan	124
1.	Populasi Penduduk	125
2.	Rasio Jenis Kelamin.....	126
3.	Kepadatan Penduduk.....	127
4.	Tenaga Kerja.....	130
F.	Kondisi Perekonomian Wilayah	130
1.	Perkembangan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB)	130
2.	Pertumbuhan Ekonomi.....	131
3.	Struktur Ekonomi.....	134
4.	Indikator Ekonomi.....	134
G.	Kondisi Sosial	136
1.	Pendidikan	136
2.	Kesehatan	138
3.	Agama.....	139
H.	Kondisi Kelembagaan.....	140
I.	Potensi Bencana Alam	142
1.	Gempa dan Tsunami.....	143
2.	Gunung Berapi	147



J.	Peluang Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan	149
K.	Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Temate	149
L.	Analisis Pengembangan Berfokus Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap	161
M.	Arahan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Temate	162
	1. Aspek Non Fisik	162
	2. Aspek Fisik.....	163
N.	Analisis Potensi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	168
	1. Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.....	168
	A) Pelabuhan	169
	B) Sarana Angkutan Laut	172
	C) Navigasi Pelayaran	172
	D) Prasarana Pelabuhan Perikanan.....	173
	E) Prasarana dan sarana Pasca Panen Perikanan.....	176
O.	Analisis Permasalahan Lingkungan	176
	1. Pencemaran Laut.....	176
	2. Masalah Pencemaran dan Sedimentasi yang berasal dari	
	3. Daratan (land-base population)	177
	4. Masalah Pencemaran yang Bersumber dari aktivitas di laut	178
	5. Kerusakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati	178
P.	Analisis Kerentanan Terhadap Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)	179
	1. Kerentanan Kelembagaan.....	180
	2. Kerentanan Demografi	181
	3. Kerentanan Sosial Ekonomi	182
	4. Kerentanan Sarana dan Prasarana	182
	5. Ruang Daratan Pesisir	182
	a) Data Kemampuan Lahan	182
	b) Data Penggunaan Lahan Eksisting.....	184

c) Kebijakan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang	185
d) Pertimbangan Ekonomi dan Sosial Budaya	185
e) Arah dan Kecenderungan Investasi dan Pengembangan Kawasan.....	186
Q. Ruang Perairan Pesisir.....	187
R. Analisis Kegiatan Ekonomi Unggulan	190
S. Analisis Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kota Ternate	193
T. Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate.....	196
BAB V PENUTUP	203
A. Kesimpulan.....	203
B. Saran.....	204
DAFTAR PUSTAKA	205
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Kawasan Strategi Kota Ternate	63
Tabel 4.1. Wilayah Pesisir di Kota Ternate	91
Tabel 4.2. Luas Pulau-Pulau di Wilayah Kota Ternate	92
Tabel 4.3. Kondisi Beberapa Parameter Iklim di Wilayah Kota Ternate Tahun 2009	102
Tabel 4.4. Potensi Sumber Daya Ikan Kota Ternate Tahun 2010.....	115
Tabel 4.5. Keragaan dan Sebaran Kapal Perikanan di Kota Ternate Tahun 2009	117
Tabel 4.6. Keragaan dan Sebaran Alat Penangkapan Ikan di Kota Ternate Tahun 2009	117
Tabel 4.7. Volume Produksi Perikanan Tangkap Kota Ternate Tahun 2009.	110
Tabel 4.8. Potensi Wisata Bahari di Kota Ternate	111
Tabel 4.9. Pusat Pengolahan Air Bersih Reservoir.....	120
Tabel 4.10. Populasi Penduduk Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010	117
Tabel 4.11. Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2019	128
Tabel 4.12. Distribusi Penduduk di Kawasan Minapolitan Kota Ternate Tahun 2019	129
Tabel 4.13. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Ternate Tahun 2010-2019	136
Tabel 4.14. Fasilitas Peribadatan di Kota Ternate Tahun 2019	140
Tabel 4.15. Fasilitas Terbangun dan Terpasang di PPN Ternate Tahun 2019	152
Tabel 4.16. Investasi Pihak Swasta di PPN Ternate Tahun 2019.....	154
Tabel 4.17. Perkembangan Produksi Perikanan di PPN Ternate	156
Tabel 4.18. Perkembangan Frekuensi Kapal Masuk ke PPN Ternate	157
Tabel 4.19. Perkembangan Alat Penangkapan Ikan di PPN Ternate	158
Tabel 4.20. Perkembangan Nelayan di PPN Ternate.....	159

Tabel 4.21 PDRB dan Sub Sektor Perikanan Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019.....	191
Tabel 5.22 Nilai LQ Sub Sektor Perikanan	192
Tabel 5.23 Nilai CPUE dan MYS Perikanan Tangkap Kota Ternate.....	195



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Profil Pantai	13
Gambar 2.2 Bagan alur strategi membangun kembali perekonomian Indonesia melalui sektor perikanan dan kelautan	52
Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian Studi pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate	62
Gambar 4.1. Peta Citra Wilayah Kota Ternate	88
Gambar 4.2. Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate	89
Gambar 4.3. Peta Pusat Kota Ternate	90
Gambar 4.4. Peta Topografi Wilayah Kota Ternate	95
Gambar 4.5. Peta Kemiringan Lereng Kota Ternate	96
Gambar 4.6. Peta Geologi Wilayah Kota Ternate	98
Gambar 4.7. Peta Batimetri Perairan Kota Ternate	106
Gambar 4.8. Peta Penggunaan Lahan daratan Pesisir Pulau Ternate	109
Gambar 4.9. Peta Tutupan Lahan Kota Ternate	122
Gambar 4.9. Populasi Penduduk	126
Gambar 4.10. Peta Jaringan Jalan Di Kota Ternate.....	120
Gambar 4.11. Peta Lokasi Sumber Air Bersih Kota Ternate	123
Gambar 4.12. Pembagian Zona Seismotektonik Di Indonesia	145
Gambar 4.13. Peta Zona Rawan Tsunami Di Pulau Ternate	146
Gambar 4.14. Peta Zona Rawan Bencana Gunung Api Di Kota Ternat	148
Gambar 4.15. Peta Layout Pengembangan PPN Ternate	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepulauan Indonesia terbentuk oleh proses (endogen) rumit geologi dari gejala konvergensi lempeng (litosfer) menghasilkan bentang alam (fisiografi) yang sangat kompleks. Demikian halnya dengan pantai pulau-pulaunya, terbentuk seiring evolusi geologi dengan ciri masing-masing berdasar proses dan mandala geologinya, yang kemudian terlihat pada keragaman jenis batuan, struktur dan kelurusan, lereng pantai dan perairan bentuk muara sungai dan lain-lain bagian bentang pantai. Kondisi iklim/cuaca (atmosfer) dan laut (biosfer) mengiringi evolusi tersebut memberi pengaruh (eksogen) pada proses pembentukan bentang alam. Kegiatan manusia (biosfer) mulai ikut berpengaruh pada proses evolusi mengubah bentang alam melalui upaya (anthropogenic) mengubah lingkungan untuk kepentingannya sejak zaman Abthroposen.

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya (baik jenis maupun jumlah). Kekayaan sumberdaya tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumberdayanya dan berbagai instansi mempunyai kebijakan untuk meregulasi pemanfaatannya

Lahirnya UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka dipandang perlu adanya upaya untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu,

Kota Ternate yang masyarakatnya sebagian besar merupakan nelayan, perlu adanya penanganan khusus untuk meningkatkan hasil perikanan. Salah satu penanganan khusus yaitu menjadikan Kota Ternate sebagai Kawasan Minapolitan agar dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi lokal. Minapolitan merupakan bagian dari agropolitan. Dengan kata lain, minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya.

Kota Ternate sebagai kawasan minapolitan, maka secara tidak langsung menjadikannya sebagai pusat pertumbuhan baru di Provinsi Maluku Utara. Pusat pertumbuhan harus memiliki 4 (empat) ciri yaitu :

1. adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi;
2. adanya unsur pengganda (*multiplier effect*);
3. adanya konsentrasi geografis; dan
4. bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (*hinterland*)

Beberapa kendala yang dialami dalam pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia adalah penataan ruang pesisir : Ukuran dan isolasi (keterasingan), sehingga penyediaan prasarana dan sarana menjadi sangat mahal, sumberdaya manusia menjadi sangat langka; Kesukaran atau ketidakmampuan untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*) yang optimal dan menguntungkan; Budaya lokal kepulauan kadangkala bertentangan dengan kegiatan pembangunan.

Kendala-kendala tersebut di atas, tentunya sangat mempengaruhi perkembangan kehidupan nelayan dan petani ikan yang bergantung pada kondisi lingkungan atau rentan terhadap kerusakan, khususnya pencemaran dan degradasi kualitas lingkungan. Selain itu, ketergantungan yang sangat kuat masyarakat nelayan terhadap perubahan musim.

Dengan demikian, melalui penelitian ini diharapkan Kota Ternate dapat dijadikan sebagai pusat pengembangan sektor perikanan dengan sistem pengelolaan yang lebih terarah dan berbasis kawasan, dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan dan pendapatan daerah, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu diharapkan menjadi contoh pemanfaatan potensi perikanan pulau-pulau kecil/kepulauan yang selama ini belum dioptimalkan pemanfaatannya

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka usulan penelitian ini dengan judul " *Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate Provinsi Maluku Utara* ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka substansi masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana potensi Kawasan pesisir yang ada di Kota Ternate dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan
2. Bagaimana strategi dalam pengembangan kawasan pesisir Kota Ternate.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi potensi sektor perikanan yang ada di kawasan pesisir Kota Ternate dalam pengembangan kawasan minapolitan
2. Menyusun strategi pengembangan kawasan pesisir Kota Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, antara lain :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat dalam pengembangan kawasan pesisir Kota Ternate
2. Terciptanya kawasan pesisir yang dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat khususnya nelayan di wilayah pesisir kota Ternate

3. Sebagai bahan masukan atau referensi bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai pengembangan kawasan pesisir

E. Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup yang meliputi :

1. Dalam penelitian ini yang akan dianalisis berfokuskan pada potensi dan strategi pengembangan pada kawasan pesisir Kota Ternate: kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman, dan kegiatan lainnya yang saling terkait.
2. Lokasi penelitian adalah wilayah pesisir Kota Ternate sesuai arahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara tahun 2011-2031

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penyusunan hasil penelitian yang dilakukan, maka sistematika yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Lingkup batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bagian kedua merupakan tinjauan pustaka yang menguraikan teori-teori tentang pengembangan wilayah, konsep pengembangan kawasan minapolitan, serta kerangka pikir.

3. Bagian ketiga merupakan metode penelitian yang membahas waktu dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta definisi operasional.
4. Bagian keempat adalah Hasil dan Pembahasan terdiri dari lokasi penelitian meliputi : Kondisi Geografis dan Administratif, Kependudukan, Hasil Produksi Perikanan, Topografi dan Kelerengan, Hidrologi dan Sumberdaya Air, Aspek Tata Guna Lahan, Kependudukan dan Aspek Sarana dan Prasarana kawasan Minapolitan di Kota Ternate dan pembahasan yang menjelaskan mengenai Analisis Potensi Kualitas Perairan untuk kegiatan perikanan, Analisis Geomorfologi pantai, analisis hidro oseanografi pantai, rekomendasi kesesuaian lahan kawasan perairan, analisis potensi untuk kegiatan pariwisata, analisis kesesuaian untuk kegiatan konservasi, analisis potensi sarana dan parasana kelautan dan perikanan, analisis permasalahan lingkungan, analisis mitigasi bencana, analisis zona dan sub zona, ruang perairan pesisir, analisis kegiatan ekonomi unggulan, analisis potensi lestari sumberdaya perikanan Kota Ternate, dan analisis pengembangan kawasan pesisir Kota Ternate
5. Bagian kelima merupakan penutup yang menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Pesisir

Wilayah pesisir sebagai wilayah homogen adalah wilayah yang memiliki sumber daya yang memproduksi ikan, namun juga bisa dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduknya yang tergolong di garis kemiskinan, sebagai wilayah Nodal, wilayah pesisir seringkali sebagai wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan intinya. (Sugeng Budiharsono, 2005).

Kawasan pesisir meliputi wilayah daratan yang terkait pada wilayah perairan maupun wilayah laut berpengaruh terhadap wilayah daratan dan tata guna tanah. Di luar dari batas dari kawasan pesisir dan laut yang dimaksud itu mungkin saja mencerminkan interaksi antara pesisir dan laut, tetapi dapat pula tidak terjadi interaksi pesisir dan laut. Pada kawasan pesisir terdapat banyak penduduk dan pusat-pusat transportasi, temp₇ pendaratan ikan, kegiatan pertanian yang penting, industri (usaha) di bidang perikanan dan pariwisata, serta menempatkan kawasan tersebut merupakan struktur lahan yang penting untuk ikasi barbagai fasilitas (prasarana dan sarana) pelayanan umum (ekonomi dan sosial).

Wilayah pesisir merupakan suatu wilayah yang unik karena merupakan tempat percampuran pengaruh antara darat, laut dan udara

(iklim). Pada umumnya wilayah pesisir dan khususnya perairan estuaria mempunyai tingkat kesuburan yang tinggi, kaya akan unsur hara dan menjadi sumber zat organik yang penting dalam rantai makanan di laut.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa sebagai tempat peralihan antara darat dan laut, wilayah pesisir ditandai oleh adanya gradien perubahan sifat ekologi yang tajam, dan karenanya merupakan wilayah yang peka terhadap gangguan akibat adanya perubahan lingkungan dengan fluktuasi di luar normal. Dari segi fungsinya, wilayah pesisir merupakan zone penyangga (*buffer zone*) bagi hewan-hewan migrasi.

B. Tipologi Pengembangan dan Permasalahan Kawasan Pesisir Pantai

Penanganan kawasan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi pantai. Pembagian tipe pantai kawasan perencanaan didasarkan pada klasifikasi tipologi pantai (*PSDL UNHAS*, 1997). Secara garis besar dapat diklasifikasikan kedalam 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Tipe A, pantai berupa teluk dan tanjung yang panjang dan beberapa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang curam ($>0,1$) dan terbentuk dari kerikil, daratan pantai yang berbukit, tinggi ombak dibawah 1 meter, kecepatan arus dibawah 1 meter/detik pasang surut adalah setengah harian, periode ulang kejadian badai diatas 1 tahun. Pantai tipe A sangat potensial di kembangkan menjadi kawasan

perdagangan, jasa pelayanan, pergudangan, pelabuhan, permukiman, resor/pariwisata.

2. Tipe B, pantai berupa teluk tanpa pulau terletak di mulut teluk, kemiringan dasar yang landai ($0,01 < s < 0,1$) dan terbentuk dari pasir, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak antara 1-2 meter, kecepatan arus antara 0,5-1 meter/detik, tipe pasut adalah campuran dan perioda ulang kejadian badai diatas 15 tahun. Pada tipe B cukup potensial dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan prasarana penunjang tipe A, namun perlu dilakukan rekayasa khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.
3. Tipe C, pantai berupa laguna, kemiringan dasar yang datar ($s > 0,01$) dan terbentuk dari lumpur, memiliki lingkungan rawa pantai, tinggi ombak di bawah 1 meter, kecepatan arus dibawah 0,5 m/detik, tipe pasut adalah setengah harian periode ulang kejadian badai diatas 15 tahun. Tipe Pantai C tidak potensial untuk dikembangkan kegiatan binaan penduduk, perlu rekayasa khusus melalui penguatan dan peningkatan khusus untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pusat kawasan kota misalnya pembuatan dermaga, reklamasi pantai dan sebagainya.
4. Tipe D, pantai terbuka dengan kemiringan dasar yang landai ($0,01 < s < 1$) dan terbentuk dari pasir, memiliki lingkungan muara, tinggi ombak diantara $1 < H(1/3) < 2$ meter, kecepatan arus diantara 0,5 dan 1

m/detik, tipe pasang surut campuran, periode, kejadian ulang badai 5 sampai dengan 15 tahun. Pantai Tipe D pada umumnya di manfaatkan untuk budidaya air payau, hutan rawa, pengembangan *ecoturisme*, rekreasi penjelajahan hutan pantai dan melihat flora dan fauna langka serta permukiman.

5. Tipe E, pantai terbuka kemiringan dasar yang curam ($s < 0,1$) dan terbentuk dari kerikil memiliki lingkungan muara, tinggi ombak diatas 2 meter, kecepatan arus diatas 1m/detik, tipe pasang surut harian, periode kejadian ulang badai diantara 5-15 tahun. Tipe E, umumnya dimanfaatkan untuk pelabuhan dengan rekayasa *break water* yang lebih panjang untuk membuat kolam pelabuhan yang lebih luas, pengembangan *ecoturisme*, memancing dan permukiman.

Pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk di wilayah pesisir telah menyebabkan kemampuan lingkungan wilayah pesisir untuk mengandung kegiatan manusia semakin menurun. Sampah sebagai hasil akhir dari konsumsi kegiatan pariwisata, industri, permukiman penduduk, dan perdagangan telah menyebabkan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir, dan menurunkan nilai estetika lingkungan.

Berbagai permasalahan ditemukan di wilayah pesisir saat ini antara lain adalah:

- 1) Penurunan sumberdaya alamiah:
 - Erosi Pantai;
 - Konversi hutan bakau untuk tata guna lahan lainnya;

- Pengreklamasi wilayah pantai;
- Penangkapan ikan dengan menggunakan dinamit/racun;
- Eksploitasi lebih terhadap hutan bakau.

2) Polusi:

- Sumber-sumber industri (sampah industri);
- Sumber domestik (sampah rumah tangga dan sampah keras);
- Sumber-sumber dari pertanian (aliran atas bahan-bahan pestisida dan pupuk);
- Sumber-sumber lain (penggalian/penambangan).

3) Konflik penggunaan lahan:

- Tidak ada akses ke arah pantai sebagai akibat padatnya pemukiman pada daerah tersebut;
- Tidak bisa dipergunakan daerah pantai akibat polusi yang sangat tinggi;
- Konservasi dan preservasi terhadap hutan bakau versus konversi sumberdaya yang sama untuk dijadikan tambak ikan/udang atau reklamasi menjadi daerah pemukiman atau untuk tujuan-tujuan komersial lainnya.

4) Kerusakan dalam kehancuran sebagai akibat bencana alam:

- Banjir yang diakibatkan oleh badai;
- Gempa bumi;
- Angin topan cyclone, dan
- Tsunami.

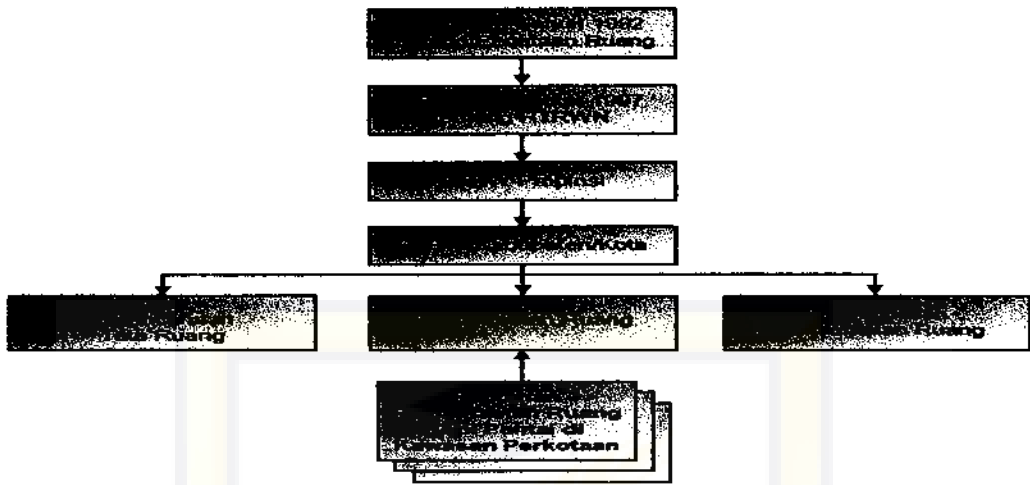
Wilayah pesisir merupakan aset sumberdaya yang mendukung kegiatan-kegiatan bagi kepentingan manusia. Dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir kegiatan setiap sektor pembangunan memiliki dimensi ambang batas yang ditentukan oleh kesaling hubungan dan keterkaitan kegiatan dengan lingkungan di wilayah pesisir. (Jufriadi, 9:2014)

C. Tipologi Pantai

1. Definisi Pantai

Ada dua istilah tentang kepantaian dalam bahasa Indonesia yang sering rancu pemakaiannya, yaitu pesisir (*coast*) dan pantai (*shore*). Pesisir adalah daerah darat tepi laut yang masih mendapat pengaruh laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air laut. Sedangkan pantai adalah daerah tepi perairan yang di pengaruhi oleh air pasang tertinggi dan air surut terendah. Daerah lautan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut di mulai dari sisi laut pada garis surut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan air laut, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan bencana abrasi yang terjadi. (Bambang Triadmodjo, 1999).

Gambar 2.1 Kedudukan Tepi Pantai Dalam Penataan Ruang



Sumber : Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan

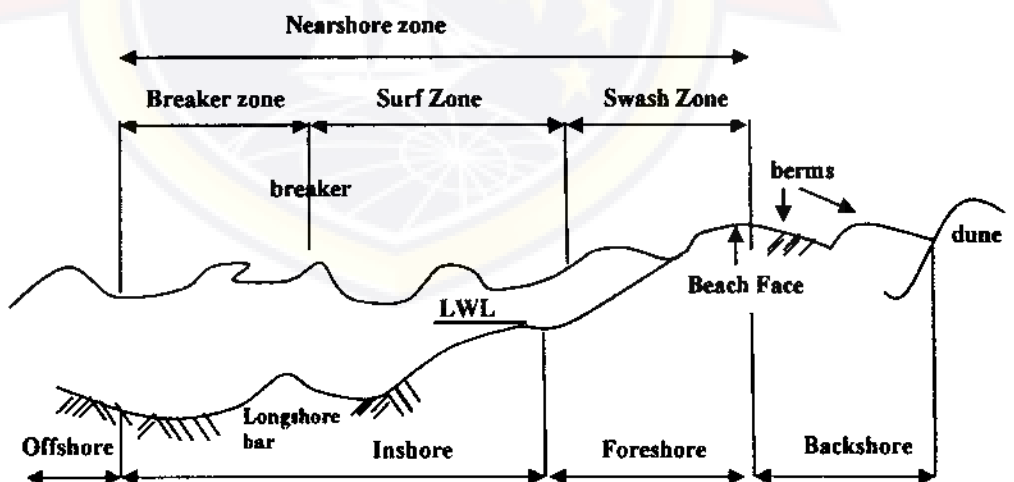
2. Bentuk Pantai

Bentuk profil pantai sangat dipengaruhi oleh serangan gelombang, sifat-sifat sedimen seperti rapat massa dan tahanan terhadap abrasi, ukuran dan bentuk partikel, kondisi gelombang dan arus, serta bathimetri pantai.

Pantai biasa berbentuk dari material dasar yang berupa lumpur, pasir atau kerikil (gravel). Kemiringan dasar pantai tergantung pada bentuk dan ukuran material dasar. Pantai lumpur mempunyai kemiringan sangat kecil sampai mencapai 1:5000. Kemiringan pantai pasir lebih besar yang berkisar antara 1:20 dan 1:50. Kemiringan pantai berkerikil bias mencapai 1:4. Pantai berlumpur banyak dijumpai didaerah pantai dimana banyak sungai yang

Pada umumnya pantai berpasir mempunyai bentuk serupa seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.2. Dalam gambar tersebut pantai dibagi menjadi *backshore* dan *foreshore*. Batas antara kedua zona ini adalah puncak *berm*, yaitu titik dari runup maksimum pada kondisi gelombang normal (biasa). Runup adalah naiknya gelombang pada permukaan miring. Runup gelombang mencapai batas antara pesisir dan pantai hanya selama terjadi gelombang badai. Surfzone terbentang dari titik dimana gelombang pertama kali pecah sampai titik runup disekitar lokasi gelombang pecah. Di lokasi gelombang pecah terdapat *longshore bar*, yaitu gundukan di dasar yang memanjang sepanjang pantai.

Gambar 2.1 Profil Pantai



Sumber : Bambang Triatmodjo, 2011

Pada kondisi gelombang normal pantai membentuk profilnya yang mampu menghancurkan energy gelombang. Jika suatu

saat terjadi gelombang yang lebih besar, pantai tidak mampu meredam energy gelombang sehingga terjadi abrasi. Pantai yang terabrasiakan bergerak kearah laut. Setelah sampai di daerah dimana kecepatan air didasar kecil, pasir tersebut akan mengendap.

b. Pantai berlumpur

Pantai berlumpur terjadi di daerah pantai di mana terdapat banyak muara sungai yang membawa sedimen suspensi dengan jumlah besar ke laut. Selain itu kondisi gelombang di pantai tersebut relative tenang sehingga tidak mampu membawa (*dispersi*) sedimen tersebut ke perairan dalam di laut lepas.

Biasanya pantai berlumpur sangat rendah dan merupakan daerah rawa yang terendam air pada saat muka air tinggi (pasang). Daerah ini sangat subur bagi tumbuhan pantai seperti pohon bakau (mangrove). Pada umumnya sedimen yang berada di daerah pantai (perairan pantai, muara sungai atau estuari, teluk) adalah sedimen kohesif dengan diameter butiran sangat kecil, yaitu dalam beberapa mikron.

3. Sifat-Sifat Sedimen Pantai

Sedimen pantai bisa berasal dari abrasi garis pantai itu sendiri, dari daratan yang dibawa oleh sungai, dan dari laut dalam yang terbawa arus ke daerah pantai. Sifat-sifat sedimen adalah sangat

penting di dalam mempelajari proses abrasi dan sedimentasi. Sifat-sifat tersebut adalah ukuran partikel dan distribusi butir sedimen, rapat massa, bentuk, kecepatan endap, tahanan terhadap abrasi, dan sebagainya. Diantara beberapa sifat tersebut, distribusi ukuran butir adalah yang paling penting.

4. Transpor Sedimen Pantai

Sedimen adalah material atau pecahan dari batuan, mineral dan material organik yang melayang-layang di dalam air, udara, maupun yang dikumpulkan di dasar sungai atau laut oleh pembawa atau perantara alami lainnya. Sedimen pantai dapat berasal dari abrasi pantai, dari daratan yang terbawa oleh sungai, dan dari laut dalam yang terbawa oleh arus ke daerah pantai. Dalam ilmu teknik pantai dikenal istilah pergerakan sedimen pantai atau transpor sedimen pantai. Transpor sedimen pantai (Bambang Triadmodjo, 1999). adalah gerakan sedimen di daerah pantai yang disebabkan oleh gelombang dan arus yang dibangkitkannya. Transpor sedimen pantai inilah yang akan menentukan terjadinya sedimentasi atau abrasi di daerah pantai.

Transpor sedimen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transpor sedimen menuju dan meninggalkan pantai (*onshore - offshore transport*) yang memiliki arah rata-rata tegak lurus pantai dan transpor sepanjang pantai (*longshore transport*) yang memiliki arah rata-rata sejajar pantai.

Transport sedimen tegak lurus pantai dapat dilihat pada kemiringan pantai dan bentuk dasar lautnya. Proses transpor sedimen tegak lurus biasanya terjadi pada daerah teluk dan pantai – pantai yang memiliki gelombang yang relatif tenang. Pada saat musim ombak, energi yang terdapat pada gelombang akan menggerus bibir pantai dan menimbulkan abrasi yang ditandai dengan adanya dinding pantai.

Penggerusan tersebut akan menimbulkan lembah (*trough*) namun hal itu juga akan dibarengi dengan terbentuknya punggung (*bar*) di samping lembah tersebut akibat adanya hukum kekekalan massa. Adanya punggung tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi gelombang pecah karena pada umumnya gelombang akan pecah sebelum mencapai punggung.

Hukum kekekalan massa berlaku pada transpor sedimen tegak lurus pantai. Hukum kekekalan massa menyatakan bahwa sedimen tidak dapat hilang namun hanya dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dari gambar terlihat timbulnya abrasi pada daerah bibir pantai akan diikuti dengan proses sedimentasi di laut.

Transpor sedimen sejajar pantai (*longshore transport*) terjadi pada daerah pantai yang langsung berbatasan dengan samudera. Transpor sedimen jenis ini dapat lebih mudah terlihat karena transpor sedimen jenis ini memberi pengaruh terhadap bangunan

– bangunan pantai yang menjorok ke laut. Akibat adanya transpor sedimen sejajar pantai maka pada bangunan pantai yang menjorok ke laut akan terlihat perbedaan pada kedua sisi bangunan pantai tersebut. Pada satu sisi bangunan tersebut akan di jumpai proses sedimentasi sedangkan pada sisi lainnya terjadi proses abrasi. Oleh karena itu dalam perencanaan untuk mendirikan bangunan pantai harus diperkirakan seberapa besar pengaruh dari transpor sedimen sebagai fungsi dari gelombang dan arus. Hal itu harus dilakukan untuk mencegah kerusakan pada daerah pantai. Efek lain yang terjadi pada daerah pantai akibat adanya transpor sedimen sejajar pantai adalah terbentuknya daratan antara suatu pulau dengan daratan utama. Efek ini biasa di kenal dengan nama *tombolo*.

5. Bangunan Pantai

Untuk menanggulangi abrasi pantai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari penyebab terjadinya abrasi. Dengan mengetahui penyebabnya, selanjutnya dapat ditentukan cara penanggulangannya, yang biasanya adalah dengan membuat bangunan pelindung pantai atau menambah suplai sedimen.

Bangunan pantai digunakan untuk melindungi pantai terhadap kerusakan karena serangan gelombang dan arus. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi pantai, yaitu :

- a. Memperkuat/melindungi pantai agar mampu menahan serangan gelombang,
- b. Mengubah lajur transpor sedimen sepanjang pantai,
- c. Mengurangi energi gelombang yang sampai kepantai,
- d. Reklamasi dengan menambah suplai sedimen ke pantai atau dengan cara yang lain.

Sesuai dengan fungsinya seperti tersebut diatas, bangunan pantai dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai,
2. Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantaidan sambung kepantai,
3. Konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai.

Bangunan yang termasuk dalam kelompok pertama adalah dinding pantai atau revetmen yang dibangun pada garis pantai atau di daratan yang digunakan untuk melindungi pantai langsung dari serangan gelombang.

Kelompok kedua meliputi *groin* dan *jetty*. *Groin* adalah bangunan yang menjorok dari pantai ke arah laut, yang digunakan untuk menangkapi/menahan gerak sedimen sepanjang pantai, sehingga transpor sedimen sepanjang pantai berhenti/berkurang.

Kelompok ketiga adalah pemecah gelombang (*breakwater*), yang dibedakan menjadi dua macam yaitu pemecah gelombang lepas pantai dan pemecah gelombang sambung pantai.

D. Teori Pengembangan Wilayah

Pengembangan adalah pertumbuhan yang dinamis dalam mencapai pertumbuhan tertentu dalam upaya kesempurnaan proses tertentu guna memajukan, memperbaiki serta meningkatkan sesuatu yang sudah ada, (Alkadri,1999:24).

Pengertian wilayah yang digunakan dalam perencanaan dapat berarti suatu wilayah yang sangat sempit dan luas, sepanjang didalamnya terdapat unsur ruang atau *space*,(Tarigan, 2005:133), untuk kepentingan perencanaan maka wilayah harus dibagi atau dikelompokkan ke dalam satu kesatuan agar bisa dibedakan dengan kesatuan lainnya.

Pengembangan wilayah mengutamakan efisiensi untuk menunjang alokasi sumberdaya secara efektif diberbagai wilayah, hal ini berkaitan dengan persoalan bagaimana memanfaatkan sumberdaya secara lebih baik. (Adisasmita,2005:119).

Perdesaan dan perkotaan merupakan bagian dari wilayah, wilayah terjadi atas pedesaan dan kota (paling sedikit satu kota), maka diharapkan dapat diupayakan agar keterkaitan antara pedesaan dan perkotaan yang bersifat dua arah, saling membutuhkan dan saling melengkapi itu menjadi relative seimbang, tidak berat sebelah dan bersifat harmoni, sehingga daerah pedesaan dapat tumbuh dan berkembang lebih intensif dan

ektensif dibandingkan sebelumnya, dengan demikian penduduk pedesaan tidak perlu meninggalkan desanya, karena di desanya telah tersedia kesempatan kerja yang luas baik disektor pertanian ,industri dan jasa pedesaan, dengan demikian urbanisasi ke kota-kota besar dapat ditekan serendah mungkin dan bahkan sebaliknya penduduk perkotaan akan pindah ke desa-desa mencari kerja karena di perkotaan sudah terlalu padat dan susah mendapatkan pekerjaan yang memberi penghasilan yang memadai, (Adisasmita,2005:15).Dengan demikian pembangunan wilayah memerlukan perencanaan secara keseluruhan (regional planning). Perencanaan wilayah diberbagai Negara tidak sama caranya, bergantung kepada kehidupan ekonomi dan kepada masalah yang dihadapi. Dalam perencanaan wilayah di Inggris misalnya, sebagai Negara industri, secara historis terbagi tiga dalam perencanaan, yaitu :

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksaaannya meliputi perbaikan bagian kota, pembuatan upako yang berkebun (garden surb), dan akhirnya pada waktu yang belum lama ,pembuatan kota satelit (new town) untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu rapat penduduknya,keadaan perencanaan wilayah seperti ini berkembang pesat pada tahun 1940 dengan terdapatnya para ahli perencanaan yang terkenal. Titik berat perhatian dalam perencanaan wilayah semacam itu di tunjukkan, kepada kota besar

dan wilayah sekelilingnya yang di sebut buriloka (hinterland) yang menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.

2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatian kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri.
3. Disamping perencanaan wilayah tersebut diatas, terdapat juga perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi, (perencanaan pedesaan dan wilayah) hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran, antara pedesaan dan perkotaan.

Di negara berkembang perencanaan wilayah dihubungkan dengan pembangunan / pengembangan wilayah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk wilayah tersebut.

E. Tujuan Pengembangan Wilayah

Hadjisarosa dalam Adisasmita (2005:123), memberikan struktur pengembangan yang terdiri dari tiga macam struktur pengembangan wilayah yaitu :

1. Penyebaran satuan wilayah pengembangan (SWP) pada wilayah nasional.
2. Orientasi dan tingkat perkembangan masing-masing satuan wilayah pengembangan (SWP).

3. Hubungan ketergantungan antara satuan wilayah pengembangan (SWP).

Friedmann, 1964, dalam Adisasmita 2005:86, pada dasarnya pengembangan dipandang sebagai proses inovasi yang diskontinyu tetapi kumulatif yang berasal pada sejumlah kecil pusat-pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang mempunyai potensi tertinggi, sehingga pembangunan inovasi cenderung menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah-daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Nort, 1965 dalam Adisasmita, 2005:126, pada dasarnya tujuan pengembangan wilayah adalah menawarkan cara-cara untuk mengembangkan satu wilayah, dalam rangka menunjang pengembangan wilayah dimana wilayah tersebut harus mengembangkan ekonomi dasarnya yaitu suatu aktivitas ekonomi yang cenderung menjadi aktivitas export.

Strategi kebutuhan dasar secara khusus dapat dikatakan bahwa pendekatan melihat interaksi antara manusia dengan lingkungan secara mendasar, seperti juga dalam teori-teori Neo-Klasik dan dependensi bersifat "*Determinims*" yaitu menganggap faktor ekonomi sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi proses cepatnya suatu pembangunan daerah setempat.

Setiap pembangunan, yang tentunya membawa perubahan terhadap manusia dan lingkungannya, harus dipertimbangkan termasuk segi implikasinya bagi sektor lain yang akan terkena dampaknya.

F. Teori Pertumbuhan Wilayah

Berdasarkan konsep dan teori pertumbuhan wilayah yang dapat memberikan sumbangan bagi arahan perbaikan dan pertumbuhan wilayah, maka akan dikemukakan beberapa teori yang mendukung konsep pengembangan wilayah yaitu; (1) Konsep homogen (*homogenety*) suatu wilayah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapita, geografis dan sebagainya. (2) Nodalitas (*nodality*) yaitu dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. (3) Konsep perencanaan adalah suatu ekonomi ruang yang berada dibawah satu administrasi tertentu seperti; Propinsi, Kabupaten, Kecamatan dan sebagainya. (*Lincolyn Arsyad, 1999:108*).

Perkembangan teori pertumbuhan wilayah dimulai dari model dinamika wilayah yang sederhana sampai dengan model yang lebih komprehensif. Teori-teori tersebut meliputi teori *resource endowment* teori *export base*, teori pertumbuhan wilayah *neoklasik*.

G. Teori Resource Endowment

Teori *Resource Endowment* dari suatu wilayah menyatakan bahwa pengembangan ekonomi wilayah bergantung pada sumberdaya alam

yang memiliki dan permintaan terhadap komoditas yang dihasilkan dari sumberdaya itu. Dalam jangka pendek sumberdaya yang dimiliki suatu wilayah merupakan suatu aset untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nilai dari suatu sumberdaya merupakan nilai turunan dan permintaan terhadapnya merupakan permintaan turunan. Suatu sumberdaya menjadi berharga jika dapat dimanfaatkan dalam bentuk-bentuk produksi.

Kendala utama dari teori ini adalah pergeseran ekonomi dari pemakaian langsung sumberdaya alam menuju proses pengolahan barang setengah jadi dan penyediaan jasa pelayanan dalam jangka panjang. Penurunan relatif dari pentingnya bahan mentah pada nilai akhir produksi akan melemahkan kaitan antara sumberdaya wilayah dan pembangunan ekonominya.

H. Teori Export Base

Teori Export Base atau teori *economy base*, pertama kali dikembangkan oleh C. North (1955). Menurut North, pertumbuhan wilayah jangka panjang bergantung pada kegiatan industri ekspornya. Kekuatan utama dalam pertumbuhan wilayah adalah permintaan eksternal akan barang dan jasa. Permintaan eksternal ini, mempengaruhi penggunaan modal, tenaga kerja dan teknologi untuk menghasilkan komoditas ekspor. Dengan kata lain, permintaan komoditas ekspor akan membentuk keterkaitan ekonomi, baik ke belakang (kegiatan produksi) maupun kedepan (sektor pelayanan). Suatu wilayah memiliki sektor ekspor itu

menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran yang unik dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi. Dalam perkembangannya, perekonomian wilayah cenderung membentuk kegiatan pendukung yang dapat menguatkan posisi yang menguntungkan dalam sektor-sektor di wilayah itu. Penekanan teori ini ialah pentingnya keterbukaan wilayah yang dapat meningkatkan aliran modal dan teknologi yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembangunan wilayah.

Beberapa sasaran *export base* sebagai teori umum pembangunan ekonomi wilayah adalah (i) Teori *economic base* lebih diperuntukkan bagi wilayah-wilayah kecil dengan ekonomi sederhana dan untuk penelitian jangka pendek tentang pengembangan ekonomi wilayah, dan (ii) Teori *economic base* gagal menjelaskan bagaimana pengembangan wilayah dapat terjadi walaupun terjadi penurunan ekspor, sedangkan di lain pihak sektor non ekspor lainnya dapat tumbuh untuk mengimbangi penurunan itu.

I. Wilayah sebagai Suatu Elemen Struktur Spasial

1. Problem Utama Ekonomi Regional

Ekonomi regional adalah suatu studi yang mempelajari perilaku ekonomi dari manusia didalam wilayah. Studi ini menganalisa proses ekonomi dalam lingkungan *spasial* (mengetahui tata ruang) dan menempatkannya kedalam lansekap ekonomi (*economic land space*). Sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi tradisional telah lama tidak

mau mengenal aspek spasial dari perilaku ekonomi. Model-model klasik dibuat berdasarkan asumsi bahwa kegiatan ekonomi terjadi pada satu titik waktu (*one point*) tanpa memperhitungkan dimensi spasial. Pertanyaan utama dari ekonomi klasik adalah berkisar pada *what to produce*, *How to produce and for whom to produce*. Yang artinya komoditi apa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa komoditi tersebut diproduksi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dianalisa tanpa memasukkan unsur jarak menganggap tidak ada biaya pengangkutan.

Tantangan bagi ekonomi regional yakni dapat dinyatakan bahwa pengetahuan mengenai gejala-gejala ekonomi akan menjadi penting dan nyata apabila faktor tata ruang diintroduksikan sebagai suatu variabel tambahan dalam kerangka teori ekonomi secara eksplisit pertimbangan mengenai dimensi tata ruang tersebut meliputi lima persoalan utama ekonomi regional.

Pertama, adalah yang berhubungan dengan penentuan lansekap ekonomi, yaitu mengenai penyebaran kegiatan ekonomi atas tata ruang, dalam hubungan ini beberapa pertanyaan dapat dikemukakan, misalnya faktor apa yang mempengaruhi lokasi kegiatan individual? Bagaimana dapat dijelaskan penyebaran produksi pertanian diatas suatu tanah yang luas? hipotesa apa yang relevan untuk penentuan lokasi usaha tertentu, suatu industri, sektor industri dan sektor tersier? model apa yang dapat digunakan untuk menentukan perilaku spasial dari lokasi pemukiman? bagaimana teori lokasi partial dapat diintegrasikan dalam suatu sistem

general? Bagaimana suatu daerah dapat dirincikan sebagai daerah pertanian atau daerah industri dan aglomerasi penduduk? apakah ada ketergantungan antara pengambilan keputusan mengenai lokasi secara individual? semua pertanyaan berhubungan erat dan termasuk dalam bidang persoalan utama ekonomi regional, yang pertama yaitu persoalan penentuan lansekap ekonomi.

Kedua adalah hubungan dengan diintrodusinya konsep wilayah dalam analisa teoritik. Wilayah disini artikan sebagai sub sistem spasial dari ekonomi nasional. Dengan konsep baru telah mendorong rencana pembangunan sub sistem spasial dan pengukuran aktivitas ekonominya. Beberapa kriteria telah dikembangkan untuk menentukan batasnya suatu wilayah, maupun diakui bahwa hal ini bukan merupakan hal yang gampang.

Ketiga adalah menganalisa interaksi antara daerah-daerah. Dapat dibedakan dua bentuk interaksi antar regional, yaitu (1) arus pergerakan faktor produksi dan (2) pertukaran komoditi, penjelasan mengenai mengapa terjadi arus pergerakan faktor produksi dan komoditi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi pada suatu daerah itu merupakan titik sentral dalam studi permasalahan ekonomi regional. Dalam hubungan ini dapat diajukan beberapa pertanyaan, diantaranya: mengapa faktor produksi berpindah dari suatu daerah ke daerah lain? departemen apakah yang mempengaruhi mobilisasi faktor produksi antar daerah.

Keempat adalah persoalan analisa optimum atau *aquilibrium* antar daerah. Model tipe ini mencoba menentukan beberapa sumber optimum untuk kegiatan sistem ekonomi dalam lingkungan spasial, keadaan optimum selalu dikaitkan dengan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai seperti alokasi sumberdaya yang optimal menurut Pareto (*Pareto optimum Allocation of resources*) atau minimisasi faktor masukan (input) yang telah tertentu. Beberapa pertanyaan dalam hubungan ini dapat dikemukakan, diantaranya mengenai arus transportasi yang optimal untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda. Spasialisasi produksi regional yang optimal dan pertukaran komoditi yang optimal antar daerah-daerah. Analisa *equilibrium* atau keseimbangan tidak membahas persoalan yang riil, akan tetapi memperinci pola optimal mengenai produksi, lokasi dan perdagangan. Hal ini memperlihatkan integrasi analisa lokasi dan studi pertukaran antar daerah. Akhirnya dapat dikatakan bahwa analisa optimum dapat dipandang sebagai pembahasan dan implikasi tujuan-tujuan tertentu.

Kelima, yaitu persoalan kebijaksanaan ekonomi regional dimasukkan sebagai kegiatan-kegiatan yang berusaha memperhitungkan pengaruh perilaku ekonomi dalam suatu lingkungan spasial. Kebijakan ekonomi regional berusaha mengontrol struktur dan proses ekonomi dalam sub sistem ekonomi nasional. Disini ada beberapa pertanyaan dapat dikemukakan, yaitu sasaran apakah dari kebijaksanaan regional itu? bagaimana sasaran-sasaran tersebut ditetapkan? bagaimana sasaran

kebijaksanaan regional tersebut direalisasikan pada tujuan kebijaksanaan nasional dan sebagainya.

2. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan ekonomi regional adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu wilayah. Seringkali dipakai istilah lain yang mempunyai arti yang sama untuk pertumbuhan ekonomi yaitu pembangunan ekonomi atau pengembangan ekonomi. Ada beberapa variabel yang dapat dipilih sebagai indikator atau pengukur pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan sebagai suatu keluaran daerah. Peningkatan ini meliputi kapasitas produksi ataupun volume riil produksi.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dinyatakan sebagai peningkatan dalam sejumlah komoditi yang dapat digunakan disuatu daerah. Konsep ini menyangkut pengaruh perdagangan yaitu dapat diperoleh komoditi sebagai suplay hasil yang meningkat melalui pertukaran antar daerah.

Perencanaan sub sistem dari ekonomi nasional adalah merupakan prasyarat untuk teori pembangunan regional. Juga persoalan bagaimana mengukur peningkatan dalam kegiatan ekonomi suatu daerah harus dipecahkan. Lebih penting bahwa teori pertumbuhan regional harus menganalisa suatu daerah sebagai suatu sistem terbuka yang berhubungan dengan daerah-daerah lain melalui arus perpindahan faktor produksi dan pertukaran komoditi. Dalam hubungan ini beberapa pertanyaan berikut harus dijawab. Dalam cara bagaimana pengembangan

ekonomi suatu daerah mempengaruhi pertumbuhan di daerah lain? apakah pembangunan dalam suatu daerah akan meningkatkan permintaan ekspor untuk daerah lain dan selanjutnya mendorong pembangunan ekonomi suatu daerah akan mengurangi tingkat kegiatan ekonomi di daerah lain tersebut. Persoalan-persoalan diatas menunjukkan bahwa teori pertumbuhan regional itu harus juga merupakan studi interaksi antar regional. Pengembangan regional harus juga dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam lansekap ekonomi. Dalam proses pertumbuhan ekonomi akan terjadi pergeseran dalam permintaan, akan dikemukakan sumberdaya baru, terjadi perbaikan sistem transportasi, penurunan biaya produksi, dan sebagainya.

Peristiwa ini akan mendorong para wiraswasta dan pengusaha industri untuk mempertimbangkan kembali lokasi industrinya dan akan mendorong untuk mengadakan relokasi. Jadi dapat dikatakan bahwa lansekap ekonomi itu merupakan akibat dari pertumbuhan ekonomi. Dilain pihak tingkat pertumbuhan suatu daerah itu tergantung pada alokasi sumberdaya dalam tata ruang pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu hal ini sangat dipengaruhi oleh pengambilan keputusan dalam hal lokasi individual, maka jelaslah bahwa teori pertumbuhan itu harus memperhatikan analisa lansekap ekonomi.

Akhirnya studi pertumbuhan regional sebaiknya dikaitkan pula dengan analisa optimum dan kebijaksanaan regional. Kondisi optimum dalam tata ruang dapat ditafsirkan sebagai tujuan dalam sistem

kebijaksanaan regional dan analisa optimum dapat dipakai untuk menetapkan arah pertumbuhan regional secara optimal sepanjang waktu. Aspek-aspek persoalan-persoalan seperti alat apa, kombinasi langkah-langkah kebijaksanaan yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan di suatu wilayah ? alternatif strategi apa yang sebaliknya ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pertumbuhan regional ? tindakan-tindakan apakah yang dapat dijalankan untuk mencegah aglomerasi yang berlebihan? Pertanyaan diatas harus diusahakan dijawab agar supaya pengembangan wilayah dapat dilaksanakan secara lebih mantap dan terarah

3. Pengembangan Konsep Tata Ruang Ekonomi

Konsep tata ruang ekonomi sangat penting dalam studi pengembangan wilayah, menurut perkembangan historis, tata ruang ekonomi mengalami perubahan dan pertumbuhan. Beberapa kasus spasial dapat dikemukakan seperti terjadinya pemusatan kegiatan-kegiatan industri dan urbanisasi ke kota-kota besar, terbentuknya pasar-pasar dan pusat baru yang menimbulkan perubahan dalam wilayah-wilayah pelayanan dan mungkin pula perlu dilakukan penyempurnaan dalam pembagian wilayah pembangunan secara menyeluruh. Kasus-kasus diatas merupakan topik-topik yang bersifat kontraversi karena mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap pengembangan tata ruang nasional.

Konsep tata ruang ekonomi mempunyai pengertian yang lebih bersifat operasional dan kurang emotif, misalnya; investasi modal,

jaringan transportasi, industri, dan meliputi bahan-bahan materil baru dan aturan-aturan baru. Ahli-ahli ilmu bumi menempatkan manusia dalam lingkungan alam, sebaliknya ahli-ahli ekonomi menganggap lingkungan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan manusia. Tata ruang ekonomi lebih kompleks dan bersifat multi dimensi.

4. Sektor-Sektor Strategis.

Pembangunan dalam waktu luas selalu mengacu pada proses perubahan baik struktur ekonomi maupun sosial budayanya yang dapat menciptakan kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Proses ini berdemensi global, meliputi; perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, pola pikir masyarakat, kelembagaan, pengurangan disparitas, pemberantasan kemiskinan absolut dan percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan-perubahan yang terjadi di suatu daerah menurut Hoover dan Giarrantani (1984), pada dasarnya diakibatkan oleh interaksi antara sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan investasi. Secara makro hasil interaksi tersebut dapat dianalisis dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Bourdeville (1961) menampilkan teori pertumbuhan dan mendefinisikan kutub pertumbuhan sebagai perangkat industri sedang berkembang yang teralokasi disuatu wilayah dan mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut melalui wilayah pengaruhnya. Mengingat pembangunan dilaksanakan secara bertahap, terencana dan

berkesinambungan, maka pendekatan sektor perlu digunakan untuk mendekatkan pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan menurut jenis kedalam sektor strategis. Dengan pendekatan ini pembangunan dapat dikelola pada lingkup nasional maupun daerah. Sektor tersebut dalam pembangunan wilayah menurut *Adisasmita (1994)* terdapat sektor-sektor strategis. Sektor strategis yang dimaksud adalah:

1. Sektor yang menghasilkan produksi dan mempunyai kontribusi besar terhadap nilai PDRB.
2. Sektor yang terinterpretasikan memberikan lapangan kerja lebih besar.
3. Sektor yang mempunyai tingkat keterkaitan yang kuat terhadap pengembangan sektor lainnya.
4. Sektor yang potensial meningkatkan ekspor nonmigas walaupun kontribusi terhadap PDRB relatif kecil tetapi sektor tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan.

5. Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Wilayah.

Untuk mendukung langkah kebijakan yang lebih terarah, yang dapat mendorong kegiatan investasi dan pembangunan daerah, maka diperlukan identifikasi potensi daerah secara komprehensif untuk mengetahui pengwilayahan komoditas unggulan dan peluang pengembangannya di masa mendatang di setiap kabupaten. Hal ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, terutama dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah

J. Tinjauan Permen KP Nomor : Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan

Menteri Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor : Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K), dan PP KSDI.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut menyebutkan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sedangkan kawasan minapolitan yaitu suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.

Minapolitan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah ikan yang adil dan merata; dan
- c. Mengembangkan kawasan minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Sedangkan sasaran pelaksanaan minapolitan, meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan skala mikro dan kecil, antara lain berupa:

- a. Penghapusan dan/atau pengurangan beban biaya produksi, pengeluaran rumah tangga, dan pungutan liar;
 - b. Pengembangan sistem produksi kelautan dan perikanan efisien untuk usaha mikro dan kecil;
 - c. Penyediaan dan distribusi sarana produksi tepat guna dan murah bagi masyarakat;
 - d. Pemberian bantuan teknis dan permodalan; dan/atau
 - e. Pembangunan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas usaha kelautan dan perikanan skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi, antara lain berupa:
- a. Deregulasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. Pemberian jaminan keamanan dan keberlanjutan usaha dan investasi;
 - c. Penyelesaian hambatan usaha dan perdagangan (tarif dan non-tarif *barriers*);
 - d. Pengembangan prasarana untuk mendukung sistem produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran; dan
 - e. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif ekspor-impor produk kelautan dan perikanan.
3. Meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional, antara lain berupa:
- a. Pengembangan sistem ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah;
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi kelautan dan perikanan di daerah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal;

- c. Revitalisasi sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran sebagai penggerak ekonomi masyarakat; dan
- d. Pemberdayaan kelompok usaha kelautan dan perikanan di sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran.

Pengembangan Kawasan Minapolitan dilakukan secara terintegrasi, efisien, dan berkualitas serta mendorong percepatan peningkatan produksi, pengolahan dan/atau pemasaran. Pengembangannya dimulai dari pembinaan unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran yang terkonsentrasi di sentra produksi, pengolahan dan/atau pemasaran di suatu kawasan yang diproyeksikan atau direncanakan menjadi Kawasan Minapolitan yang dikelola secara terpadu.

Karakteristik Kawasan Minapolitan meliputi:

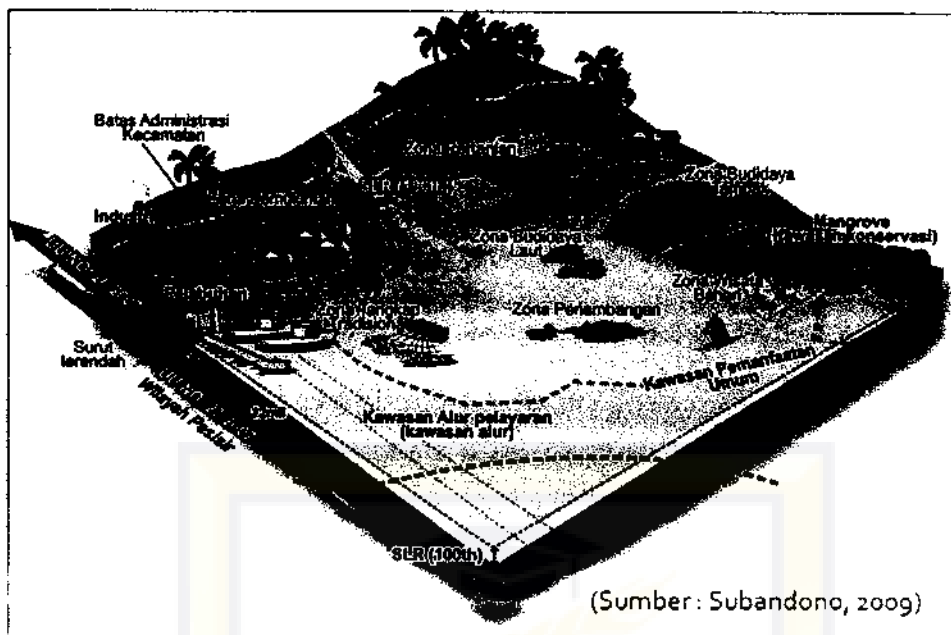
- a. Suatu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan;
- b. Mempunyai sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi;
- c. Menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia di dalam kawasan dan daerah sekitarnya; dan
- d. Mempunyai dampak positif terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.

Suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Kesesuaian dengan Renstra, RTRW dan/atau RZWP3K kabupaten/kota, serta RPIJMD yang telah ditetapkan;

- b. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi;
- c. Letak geografi kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan;
- d. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif berproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait;
- e. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga-lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan;
- f. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan;
- g. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personil, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan;
- h. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang kelautan dan perikanan; dan
- i. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan.

Berikut ini ditampilkan ilustrasi suatu kawasan minapolitan yang terdapat di wilayah pesisir.

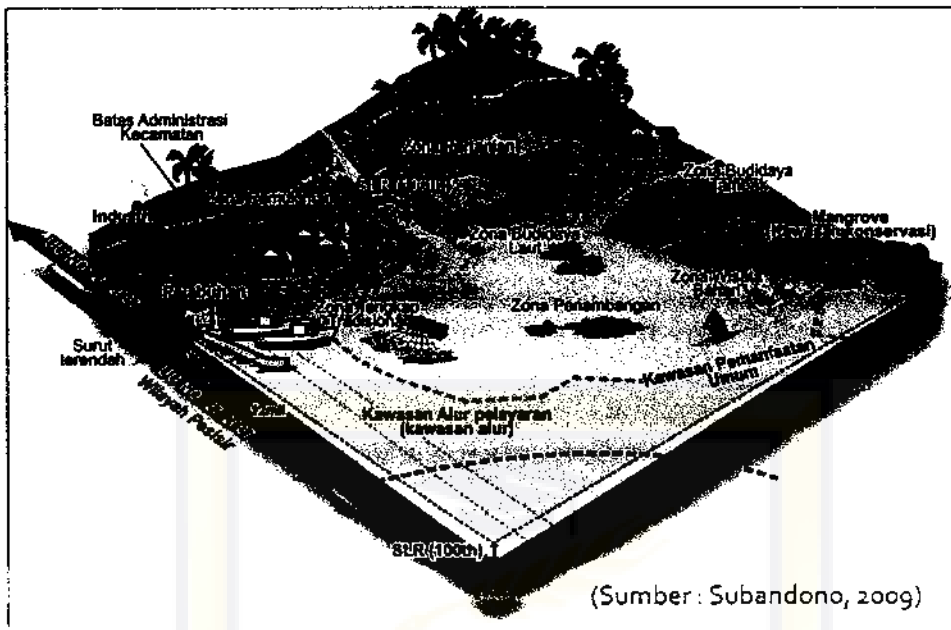


Ilustrasi Suatu Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir

Berdasarkan limitasi ekologi maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) merupakan kawasan minapolitan yang lengkap karena terdapat seluruh jenis kegiatan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, & pemasaran hasil perikanan).

Untuk menindaklanjuti pengembangan Kawasan Minapolitan, maka melalui Kepmen KP Nomor : Kep.32/Men/2010 tentang Kawasan Minapolitan telah menetapkan sebanyak 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan selama periode 5 (lima) tahun (tahun 2009-2012).

Kepmen KP ini berguna untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, dan pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan



Ilustrasi Suatu Kawasan Minapolitan di Wilayah Pesisir

Berdasarkan limitasi ekologi maka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) merupakan kawasan minapolitan yang lengkap karena terdapat seluruh jenis kegiatan perikanan (perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, & pemasaran hasil perikanan).

Untuk menindaklanjuti pengembangan Kawasan Minapolitan, maka melalui Kepmen KP Nomor : Kep.32/Men/2010 tentang Kawasan Minapolitan telah menetapkan sebanyak 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan Kawasan Minapolitan selama periode 5 (lima) tahun (tahun 2009-2012).

Kepmen KP ini berguna untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, dan pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan

Kegiatan-kegiatan perikanan yang dikembangkan pada Kawasan Minapolitan ini meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan perairan laut Indonesia telah dikelola dalam bentuk Wilayah Pembangunan Perikanan (WPP) mulai dari WPP Laut Cina Selatan hingga WPP Arafura. Pada seluruh WPP telah dibangun pelabuhan perikanan (PPI, PPN, PPS) yang dilengkapi dengan kebutuhan minabisnis untuk mengolah dan memasarkan hasil tangkapan nelayan.

K. Konsep Pemanfaatan Ruang Pesisir

Kegiatan penataan ruang, menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, meliputi keseluruhan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pertimbangan utama dalam penataan ruang meliputi kriteria kawasan budidaya dan non budidaya dalam pemanfaatan lahan, kondisi sosial ekonomi wilayah dan 'interest' (minat sektor pembangunan, aspirasi daerah, kaitan antar wilayah dan lain sebagainya). Secara garis besar penataan ruang bertujuan menunjang:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan budidaya perikanan
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, mewujudkan keterpaduan dalam

Kegiatan-kegiatan perikanan yang dikembangkan pada Kawasan Minapolitan ini meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan. Kawasan perairan laut Indonesia telah dikelola dalam bentuk Wilayah Pembangunan Perikanan (WPP) mulai dari WPP Laut Cina Selatan hingga WPP Arafura. Pada seluruh WPP telah dibangun pelabuhan perikanan (PPI, PPN, PPS) yang dilengkapi dengan kebutuhan minabisnis untuk mengolah dan memasarkan hasil tangkapan nelayan.

K. Konsep Pemanfaatan Ruang Pesisir

Kegiatan penataan ruang, menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, meliputi keseluruhan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pertimbangan utama dalam penataan ruang meliputi kriteria kawasan budidaya dan non budidaya dalam pemanfaatan lahan, kondisi sosial ekonomi wilayah dan *'interest'* (minat sektor pembangunan, aspirasi daerah, kaitan antar wilayah dan lain sebagainya). Secara garis besar penataan ruang bertujuan menunjang:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan budidaya perikanan
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk: mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, mewujudkan keterpaduan dalam

penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas SDM; mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan

Bagian wilayah berupa ruang yang merupakan transisi antara ruang laut dan ruang darat lebih dikenal sebagai *peisisir*. Pengertian Pesisir menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai dan sepertiga dari wilayah laut untuk Kabupaten/Kota dan ke arah darat hingga batas administrasi Kabupaten/Kota.

Menurut Dahuri *et.al.*, (2000:6), untuk kepentingan pengelolaan, batasan pesisir ke arah darat dapat ditetapkan menjadi 2 jenis, yaitu batasan untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan wilayah pengaturan (*regulation zone*) atau pengelolaan keseharian (*day to day management*). Apabila terdapat kegiatan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak secara nyata (*significant*) terhadap lingkungan dan sumberdaya pesisir, maka wilayah perencanaan sebaiknya meliputi seluruh daerah daratan (hulu). Jika suatu program pengelolaan wilayah pesisir menetapkan dua batasan wilayah pengelolaan (perencanaan dan

pengaturan), maka wilayah perencanaan selalu lebih luas daripada wilayah pengaturan.

Berbagai aktifitas yang dapat dilakukan di pesisir dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi (Cicin-Sain dan Knetch:1998, dalam Sondita, 2001:9), meliputi:



Fungsi	Aktifitas
Perencanaan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengkajian lingkungan pesisir dan pemanfaatannya • Penentuan zonasi pemanfaatan ruang • Pengaturan proyek-proyek pembangunan pesisir dan kedekatannya dengan garis pantai • Penyuluhan masyarakat untuk apresiasi terhadap kawasan pesisir/ lautan • Pengaturan akses umum terhadap pesisir dan lautan
Pembangunan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Industri pengelolaan hasil perikanan tangkap • Perikanan rakyat • Wisata massal dan ekowisata, wisata bahari • Perikanan budidaya • Perhubungan laut dan pembangunan pelabuhan • Penelitian kelautan & Akses terhadap sumberdaya perikanan

Sumber: Cicin-Sain dan Knetch : 1998

Perencanaan dan pengelolaan pesisir secara sektoral berkaitan dengan hanya satu macam pemanfaatan sumberdaya atau ruang pesisir oleh satu instansi pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, atau industri minyak dan gas (Dahuri et.al., 2001:11), pengelolaan semacam ini dapat menimbulkan

konflik kepentingan antar sektor yang berkepentingan untuk melakukan aktifitas pembangunan pada wilayah pesisir yang sama. Konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Konflik di antara pengguna yang mengenai pemanfaatan daerah pesisir dan laut tertentu. Menurut Miles (1991, dalam Prihartini et.al. 2001:24), konflik antar pengguna meliputi: (a) Kompetisi terhadap ruang dan sumberdaya pesisir dan laut (b) Dampak negatif dari suatu kegiatan pemanfaatan terhadap kegiatan yang lain, (c) Dampak negatif terhadap ekosistem
2. Konflik di antara lembaga pemerintah yang melaksanakan program yang berkaitan dengan pesisir dan laut; yang disebabkan oleh ketidakjelasan mandat hukum dan misi yang berbeda, perbedaan kapasitas, perbedaan pendukung atau konstituensi, serta kurangnya komunikasi dan informasi (Cicin-Sain, 1998).

Sebagai upaya menghindari terjadinya konflik pemanfaatan ruang pesisir maka diperlukan prinsip-prinsip penataan ruang pesisir (Anonim, 2003:4), sebagai berikut:

1. Penataan ruang wilayah pesisir perlu menetapkan batas-batas daerah pengembangan di lautan dengan prinsip menjamin pemanfaatan yang berkelanjutan, terutama bagi ekosistem yang memiliki dampak luas dan penting bagi ekosistem laut lainnya, serta memberi kesempatan pemulihan area yang telah rusak.

2. Mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam satu daerah pantai dan pesisir secara bersinergi satu dengan lainnya, tanpa ada satu pihak yang dirugikan.
3. Dalam rangka pengembangan dan penataan ruang wilayah pesisir diperlukan keterpaduan program, baik lintas sektor maupun daerah. Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan pembangunan yang konsisten dengan rencana tata ruang yang telah disusun sangat mendukung terwujudnya keterpaduan pelaksanaan pembangunan.
4. Perlu diarahkan untuk menyediakan ruang yang memadai bagi kegiatan masyarakat pesisir yang spesifik, yakni pemanfaatan sumberdaya di laut. Strategi pembangunan yang terlalu berorientasi pada kegiatan darat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi selama ini terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan, namun menjadikan masyarakat pesisir semakin terpinggirkan.

Oleh karena itulah, dibutuhkan perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Menurut Dahuri et.al. (2001:11), perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktifitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Pemikiran logis (*logic thinking*) maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki sebagian besar berada di wilayah perairan laut yang sampai saat ini masih belum dapat dipetakan dan diberdayakan dengan

optimal. Perubahan orientasi pembangunan bangsa Indonesia dari orientasi daratan (land based orientation) ke orientasi kelautan (ocean based orientation) sebagai prime mover pertumbuhan perekonomian nasional merupakan suatu kebijakan yang tepat untuk mengatasi krisis perekonomian, moneter dan juga resesi global yang sedang mengancam perekonomian Indonesia dan dunia saat ini.

Era otonomi daerah saat ini pola dan orientasi pembangunan daerah/provinsi khususnya daerah yang memiliki wilayah pesisir dan laut tampaknya perlu dikaji ulang. Daerah-daerah ini sudah saatnya mempertimbangkan dan menjadikan potensi kelautan sebagai salah satu basis pembangunan daerahnya. Selama ini pemerintah daerah terkesan membutakan mata dan mengesampingkan potensi pesisir dan kelautan. Padahal catatan sejarah menunjukkan bahwa dalam beberapa abad lamanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban yang berada di wilayah Nusantara ini memiliki kekuatan ekonomi dan politiknya dengan berbasis pada sumberdaya perikanan.

Keberadaan sumberdaya perikanan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan regional. Pengelolaan dan pemanfaatan disektor ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan devisa negara, menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan penduduk. Sumber daya perikanan yang kita miliki tersebut mempunyai keunggulan komparatif karena tersedia dalam jumlah yang sangat melimpah dan beraneka ragam

serta dapat dimanfaatkan dengan biaya eksploitasi yang relatif murah sehingga mampu menciptakan kapasitas penawaran yang kompetitif. Di sisi lain, kebutuhan pasar masih terbuka lebar karena kecenderungan permintaan pasar ekspor dan dalam negeri serta maupun global yang terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut maka meningkatkan daya saing melalui pembangunan di sektor perikanan merupakan sebuah solusi yang tepat.

L. Kebijakan Pendayagunaan Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Wilayah

Perencanaan wilayah diperlukan karena tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda sehingga pertumbuhannya tidak pernah seragam. Dalam pertumbuhan wilayah, ada yang pesat dan ada yang lambat. Adanya perbedaan perkembangan tersebut menyebabkan perlunya strategi tertentu untuk mengembangkan suatu wilayah. Dalam upaya pengembangan wilayah, masalah terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencana wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Perwilayahan atau *regionalisasi* adalah pembagian wilayah nasional dalam satuan geografi (atau daerah administrasi) sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (Gitlin dalam

Jayadinata, 1991:174). Ini dimaksudkan pula untuk pemerataan pembangunan daerah.

Pengembangan wilayah atau *regional planning* adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya. Berbagai segi tersebut meliputi: *ekonomi, sosial, maupun fisik*. Sehingga hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang *regional planner* ialah menyelaraskan struktur hubungan spasial dari suatu aktifitas ekonomi (Friedmann, 1966:39). Pengembangan wilayah antara lain ditujukan untuk:

1. Meningkatkan keserasian & keseimbangan antar pembangunan sektoral dengan *regional*
2. Meningkatkan keserasian & keseimbangan pembangunan antar wilayah,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan
4. Meningkatkan keserasian hubungan antar pusat-pusat wilayah dengan *hinterlandnya* serta hubungan antara kota & desa

Rondinelli (1985), mengungkapkan bahwa tingkat perkembangan wilayah (*regional growth*) dapat diukur dalam 3 indikator, yaitu:

1. Karakteristik sosio-ekonomi dan demografi, diukur melalui pendapatan perkapita, kebutuhan fisik (fasilitas) minimum, PDRB, investasi, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk.

2. Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui prosentase penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersil, luas total lahan, produktivitas pertanian.
3. Transportasi, diukur melalui kualitas, kepadatan, tipe dan panjang jalan.

Menurut Soepono (1990:161), pertumbuhan wilayah dapat diukur dari indikator-indikator berikut ini; pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita atau PDRB, dan Perubahan struktur spasial wilayah. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan wilayah merupakan perpaduan antara pengembangan spasial dan non spasial.

Teori *Resource Base* yang dikemukakan oleh Perloff dan Wingo merupakan pendalaman dari teori *Export Base*, berpendapat bahwa investasi dan perkembangan sektor ekspor di suatu wilayah memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi karena selain menghasilkan pendapatan juga menciptakan efek penggandaan pada keseluruhan perekonomian di wilayah tersebut. Teori Perloff dan Wingo ini menekankan analisis dalam dua aspek pokok, yaitu :

- ◆ Pentingnya peranan kekayaan alam suatu wilayah pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi
- ◆ Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya *multiplier effect* dari sektor ekspor terhadap keseluruhan perekonomian wilayah.

Dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain ditetapkan bahwa daerah berwenang mengelola

sumberdaya yang tersedia di wilayahnya, yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia yang tersedia dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aturan secara tegas menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Kota. Untuk mendukung langkah kebijakan yang terarah, yang dapat mendorong kegiatan investasi dan pembangunan daerah, maka diperlukan identifikasi potensi daerah secara komprehensif untuk mengetahui pengwilayahan komoditas unggulan dan peluang pengembangannya dimasa mendatang disetiap kabupaten. Hal ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi daerah, terutama dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah.

1. Pengembangan Komoditas Unggulan

Pengembangan komoditas potensial dan unggulan di Kota Temate merupakan salah satu upaya yang sangat penting dan memerlukan perhatian yang lebih sungguh-sungguh agar dapat dicapai produktivitas dan nilai tambah yang setinggi-tingginya. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat, pemerintah daerah harus mengidentifikasi potensi komoditas yang ada dan merumuskan program pengembangannya. Namun, nampaknya program pengembangan komoditas perlu lebih terarah lagi dengan memberikan prioritas pada komoditas-komoditas unggulan dan andalan yang memiliki prospek yang baik dimasa mendatang dan dapat memberikan nilai

tambah yang tinggi. Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi dan potensi penanaman modal secara optimal, sebagai berikut:

- Identifikasi potensi sumberdaya alam dengan melihat kesesuaian lahan dan agroklimat komoditas perikanan untuk mengetahui komoditas yang dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan dan andalan daerah/lokal.
- Identifikasi potensi sosial ekonomi khususnya peluang pasar komoditas, baik pasar lokal, regional maupun nasional.
- Analisis kebijaksanaan untuk mengetahui opini para pengambil keputusan di daerah agar dapat diketahui arah kebijaksanaan yang diambil oleh masing-masing pihak, sehingga dapat dicarikan titik temu di dalam penentuan prioritas pengembangan komoditas untuk wilayah kabupaten.

Melalui pendekatan tersebut, maka di dalam penentuan komoditas unggulan dan wilayah pengembangan digunakan beberapa kriteria seleksi, yang terdiri sebagai berikut:

- Peluang pasar, yakni dengan melihat berbagai aspek pemasaran komoditas seperti potensinya sebagai penghasil devisa, produk substitusi impor, dan komoditas strategis, khususnya sebagai bahan makanan pokok dalam negeri.
- Kesesuaian lahan yang juga telah mencerminkan kesesuaian agroklimat dan diukur dengan luas lahan yang sesuai, khususnya untuk komoditas perikanan dan pertanian. Untuk melengkapi



identifikasi potensi suatu komoditas dikaitkan dengan sumberdaya lahan, maka digunakan juga ukuran luas lahan dan produksi yang ada pada saat ini.

- Keterkaitan kedepan dan kebelakang, antara lain berupa potensi komoditas sebagai penghasil bahan baku industri.
- Kebijakan pemerintah setempat.

2. Kajian Aspek Pasar

Jika kita lihat dari aspek peluang pemasaran, maka beberapa komoditas yang memiliki keunggulan komoditas dari segi peluang pasar, maka dapat dilakukan pengelompokan sebagai berikut:

- Komoditas strategis penghasil makanan pokok yang sangat dibutuhkan dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan lagi produksinya dimasa mendatang.
- Komoditas substitusi impor yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain, dengan tingkat konsumen dan permintaan cukup tinggi. Komoditas utama penghasil devisa disamping untuk konsumen dalam negeri.
- Komoditas utama untuk konsumsi dalam negeri, tetapi memiliki potensi dan peluang yang baik untuk diekspor.
- Komoditas yang memiliki potensi dan pangsa pasar yang baik serta memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri kecil dan rumah tangga.

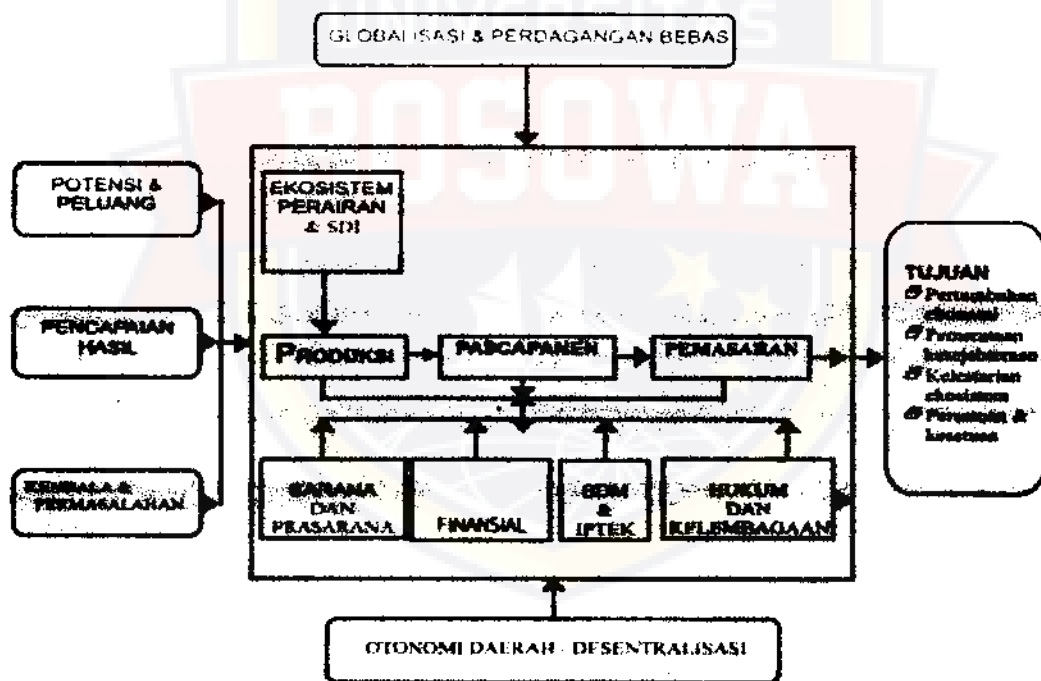
- Komoditas ekspor yang produksinya masih rendah dan perlu dipelajari peluang pengembangannya.
- Komoditas untuk pasaran lokal, regional, dan nasional.
- Komoditas khas untuk pasaran dalam negeri dan penunjang pariwisata.
- Komoditas untuk pasaran dalam negeri yang belum banyak diusahakan atau masih memerlukan kajian mendalam.

3. Kajian Aspek Lahan

Tinjauan terhadap masalah ketersediaan lahan yang sesuai, perlu diperluas lagi melalui kajian yang mendalam untuk berbagai jenis komoditas, terutama dikaitkan dengan kemungkinan pengembangan beberapa komoditas ekspor yang saat ini masih belum banyak diusahakan. Berbagai komoditas yang memiliki prospek pengembangan yang baik dilihat dari luas lahan yang sesuai berdasarkan hasil evaluasi lahan. Namun, dalam pengembangannya perlu disertai upaya memperluas jaringan pemasarannya. Hasil evaluasi lahan ini tidak menutup kemungkinan pengembangan komoditas lainnya, tetapi dalam evaluasi ini memang jumlah komoditas yang dievaluasi dibatasi. Evaluasi lahan yang dilakukan masih bersifat umum dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan survey tanah dan evaluasi lahan secara lebih detail untuk melihat kesesuaian lahan bagi tiap jenis tanaman, terutama pada wilayah- wilayah potensial yang diprioritaskan.

M. Strategi Pengembangan Wilayah Pesisir

Potensi perairan Indonesia yang begitu besar belum dikelola dengan baik. Meskipun pada saat ini sudah dilakukan upaya-upaya pengelolaan yang lebih baik, namun usaha tersebut belum terkoordinasi dan tidak berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki, dalam hal ini konsep industri terpadu dapat diterapkan dengan menggunakan salah satu komoditi perikanan dan kelautan yang bernilai ekonomi tinggi sebagai percontohan (*pilot project*). Strategi membangun kembali perekonomian Indonesia melalui sektor perikanan dan kelautan disajikan pada gambar berikut ini:



Gambar 2.2. Bagan alur strategi membangun kembali perekonomian Indonesia melalui sektor perikanan dan kelautan (Ardi dkk, 2002)

Strategi pembangunan perikanan berbasis kawasan, yakni ibarat sebuah mobil, menteri Kelautan dan Perikanan saat ini sedang menancap

gas. Model tancap gas seperti ini perlu diapresiasi sebagai kesungguhan untuk membangun sektor Kelautan dan Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, (2010) mengemukakan bahwa Pembangunan Kawasan Minapolitan untuk Kesejahteraan Rakyat sebagai salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkecimpung di sektor kelautan dan perikanan, terutama nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merumuskan kebijakan strategis operasional Minapolitan. Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, sebagaimana misi KKP, *Minapolitan* merupakan konsep pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah. Untuk itu, pendekatan dalam pembangunan *Minapolitan* dilakukan dengan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Seperti dalam membangun wilayah Pelabuhan Ratu sebagai salah satu kawasan Minapolitan, diambil langkah strategis untuk mendorong terciptanya kesejahteraan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Adapun langkah-langkah yang diambil meliputi penguatan ekonomi usaha masyarakat kecil, penguatan usaha menengah dan atas (UMA), serta pengembangan berbasis wilayah dengan sistem manajemen kawasan.

Menurut Fadel Muhammad 2010, diperlukan strategi dalam mengimplementasikan program-program, termasuk minapolitan. Ada sejumlah strategi dalam pengembangan kawasan minapolitan, yakni

pembangunan sistem dan usaha minabisnis berorientasi pada kekuatan pasar. Dengan ini diharapkan dapat menembus batas kawasan, kabupaten/kota, provinsi, dan negara untuk menjangkau pasar global. Selanjutnya, pengembangan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditas unggulan. Tentunya berdasarkan kesesuaian lahan/perairan dan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya setempat. Selain itu, peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perikanan yang diiringi dengan pengembangan usaha berbasis sistem minabisnis yang terintegrasi, mulai dari sektor hulu, hilir (pemasaran, pengolahan hasil, dan sebagainya), termasuk sektor jasa perbankan dan pendukung lainnya. "Ini didukung upaya pengembangan sarana dan prasarana publik yang berwawasan lingkungan, seperti jaringan jalan, irigasi transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang, dan lainnya. Tentunya juga kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil perikanan ke pasar secara efisien," ujar Fadel. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim usaha yang kondusif serta pengembangan ekonomi daerah/wilayah, di antaranya terkait kebijakan perizinan, bea masuk, serta menghilangkan peraturan yang dinilai menghambat. Berdasarkan strategi tersebut, maka fasilitas dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan minapolitan dilaksanakan melalui sosialisasi program untuk seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat, dan swasta). Untuk menyamakan persepsi, sehingga adanya bentuk dukungan dan masukan yang konkret,

termasuk mendorong petugas dan tokoh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan identifikasi, merumuskan program pengembangan jangka menengah, dan kegiatan strategis lainnya. Sosialisasi terutama pada tahap-tahap penumbuhan dan tahap pengembangan kawasan minapolitan. Tentunya melalui studi kelayakan yang cermat serta mencakup aspek ekonomi, teknis, sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Secara rinci, penjelasan unsur indikator strategis dalam rangka pembinaan pengembangan menuju kawasan minapolitan dapat dilakukan inventarisasi dan identifikasi di kawasan wilayah binaan yang telah terpilih (calon kawasan yang akan dibina menjadi kawasan minapolitan).

Ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, serta instansi terkait, termasuk analisis pengembangan daerah, seperti terkait tata ruang, kajian mengenai potensi pengembangan minabisnis, analisis sosial budaya, dan kapasitas sumber daya manusia, dilanjutkan dengan menyusun rencana/program pengembangan kawasan minapolitan untuk jangka panjang. Tentunya dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya lahan dan tahapan perkembangan kawasan. Penyusunan program ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota bersama masyarakat serta instansi lintas sektoral. Untuk sinkronisasi dan keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan, sebaiknya rencana program ini tercantum dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW). Program jangka panjang dari setiap kawasan pengembangan minapolitan ini kemudian dijabarkan dalam program pengembangan minapolitan tahunan. Dalam

program tahunan, setidaknya terdapat matriks kegiatan. Minimal memuat jenis kegiatan, jadwal pengembangan sampai tahap akhir, penanggung jawab, dan keperluan biaya.

N. Tinjauan Revisi RTRW Kota Ternate

1. Rencana Struktur Wilayah Pengembangan

Rencana struktur ruang wilayah kota merupakan kerangka sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki satu dengan lainnya yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota.

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kota Ternate yang telah dirumuskan sebelumnya, maka disusun suatu kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Ternate. Kebijakan dan strategi penetapan ruang ini meliputi kebijakan dan strategi yang terkait dengan struktur ruang wilayah, pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis Kota Ternate. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Menetapkan hirarki pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tersebar di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain :

- Mempertahankan keterkaitan antar sub pusat pelayanan kota, dengan wilayah di sekitarnya.
- Peningkatan akses pelayanan perkotaan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan secara hirarkis diseluruh pulau. Untuk melaksanakan kebijakan ini, maka strategi yang dapat dilakukan, adalah :

- Mendorong perkembangan sub-sub pusat pelayanan eksisting agar lebih optimal dalam mendukung perkembangan kawasan.
- Mengembangkan sub-sub pusat pelayanan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pelayanan.
- Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di pulau-pulau dalam wilayah Kota Ternate. Strategi yang dapat dilakukan, antara lain :
 - Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi.
 - Mengembangkan jaringan prasarana transportasi darat untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di seluruh pulau pada wilayah Kota Ternate.
 - Mengembangkan prasarana transportasi laut untuk meningkatkan aksesibilitas antar pulau di seluruh wilayah Kota Ternate.
 - Mengembangkan prasarana transportasi udara dalam rangka meningkatkan pelayanan antar kawasan baik regional dan Nasional.
 - Mengembangkan kapasitas sumber energi listrik dan distribusi pelayanan hingga mencapai pusat-pusat lingkungan pada seluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal.
 - Mengembangkan sumber daya air untuk pemanfaatan, pengendalian dan pelestarian sumber daya air melalui pembuatan sumur-sumur resapan dan perlindungan kawasan mata air dan danau.
 - Mengembangkan pelayanan telekomunikasi yang merata hingga menjangkau seluruh pulau di kawasan Kota Ternate.

- Mengembangkan kapasitas pelayanan air minum hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan terutama pada kawasan ketinggian atau daerah rawan air bersih diseluruh pulau dalam wilayah Kota Ternate.
- Mengembangkan kapasitas pelayanan persampahan hingga mencapai wilayah yang belum terlayani di pulau Ternate, peningkatan sistim pengelolaan sampah di TPA Buku Deru-Deru yang berwawasan lingkungan, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan mengamankan kawasan perairan Kota Ternate (kali mati dan pesisir pantai) dari sampah.
- Mengembangkan sistem jaringan drainase perkotaan untuk mengendalikan genangan air dan banjir.
- Mengembangkan sistem pembuangan air limbah di setiap kawasan dan mengamankan kawasan pesisir dari pencemaran.
- Mengembangkan prasarana pejalan kaki pada wilayah yang mempunyai bangkitan lalu lintas yang tinggi.
- Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana pada wilayah yang rawan bencana di Kota Ternate.

2. Rencana Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota Ternate baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Selain itu, kawasan strategis juga akan berpengaruh terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kawasan ini mempunyai pengaruh yang sangat penting maka diperlukan penetapan secara tegas dan

rencana serta penanganan perkembangannya harus dilihat secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai sektor, sinergis dengan kawasan yang ada di sekitarnya, dan harmonis tetap mempertimbangkan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan. Adapun rincian jenis dan sebaran kawasan strategis Kota Ternate, dapat dilihat pada Tabel 2.1.



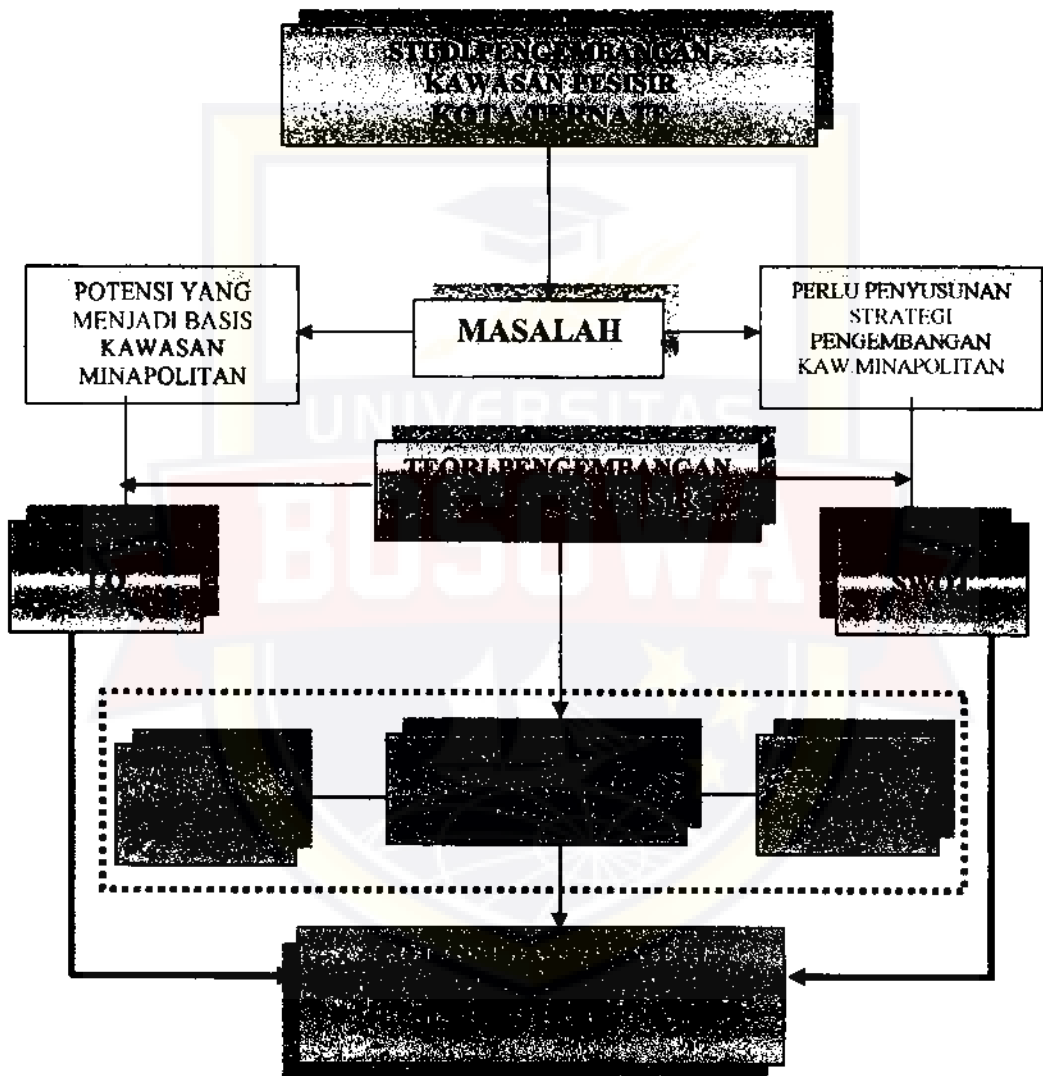
Tabel 2.1. Kawasan Strategi Kota Ternate

No.	Jenis Kawasan	Lokasi
1	Kawasan Strategis Pertahanan dan Militer	1. Kelurahan Tubo (Lapangan tembak AD), 2. Kelurahan Takome (Lapangan tembak AD), 3. Kelurahan Akehuda (AL), 4. Kelurahan Siko (KOREM), 5. Kelurahan Manggadua Utara (KODIM), 6. Kelurahan Salahudin (Kipan/AD), 7. Kelurahan Takoma (Kepolisian/Polres).
2	Kawasan Strategis Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi	1. Pengembangan Kawasan Kota Baru Temate di Kecamatan Temate Selatan dan Kecamatan Ternate Pulau 2. Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate 3. Kawasan Water Front City (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate 4. Kawasan pengembangan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Moti dan Batang Dua 5. Kawasan Agrowisata di Foramadiyahi
3	Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya dukung dan Lingkungan	1. Hampir seluruh wilayah Kota Ternate untuk kawasan rawan letusan gunung; 2. Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami terutama Kecamatan Batang Dua (Pulau Mayau dan Tifure) 3. Kawasan Danau Laguna dan sekitarnya 4. Kawasan Danau Tolire dan Sekitarnya 5. Kawasan Mata Air Ake Gale, Santosa, Tege-Tege, Ake Rica, Ake Minta, Ake Tubo
4	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya	1. Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara 2. Pesta Rakyat yang disebut "Legu Gam" yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di 3. Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan 4. Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah 5. Kawasan Benteng Toloco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara 6. Kawasan wisata budaya di Kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan

Sumber : Revisi RTRW Kota Ternate 2010-2030

O. Kerangka Pikir

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis akan menuangkan alur pemikiran dalam sebuah bagan sebagai berikut :



Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Temate

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada kawasan pesisir kota Ternate, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan (*city islands*) yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur.

Luas daratan Kota Ternate sebesar 250,85 km², sementara lautannya 5.547,55 km². Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah pulau, yang mana tiga diantaranya tidak berpenghuni.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan waktu sekitar 3 (tiga) bulan, yakni dari bulan September sampai bulan Nopember 2020

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Dari tiga wilayah yang masuk dalam Kawasan Minapolitan populasi keseluruhan adalah berjumlah 32.031 KK yang tersebar di wilayah Kawasan Minapolitan Kota Ternate

2. Teknik Pengumpulan Sampel

Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara

probability sampling dengan menggunakan teknik penentuan sampel secara acak. Jumlah sampel terpilih dari masing-masing wilayah Kawasan Minapolita Kota Ternate adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Jumlah Kepala Keluarga (KK) : semua yang ada di wilayah penelitian baik yang memiliki pekerjaan tetap, sampingan maupun yang tidak memiliki pekerjaan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah KK	Jumlah Sampel
1	Ternate Selatan	63.706	12.668	19
2	Ternate Tengah	52.082	10.341	20
3	Ternate Utara	45.485	9.022	18
	Jumlah	161.273	32.031	57

Sumber : Hasil Analisis

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah total sebanyak 57 sampel, dengan komposisi di Kecamatan Ternate Selatan 19 sampel, Kecamatan Ternate Tengah 20 sampel dan Kecamatan Ternate Utara sebanyak 18 sampel.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang langsung diperoleh pada lokasi penelitian, pada penelitian ini data primer diperoleh dari masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pesisir kota Ternate yang dijadikan sampel penelitian

melalui responden dengan instrumen kuesioner, serta pejabat pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diolah sebelumnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari kantor kelurahan, kecamatan, dan Dinas kelautan dan perikanan, Bappeda Kota Ternate yang terkait dengan topik penelitian ini seperti data perikanan yang terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan, jasa, permukiman dan pada sentra produksi dan perdagangan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan ikan dan pihak / instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian seperti ini :

- Data Profil Kota Ternate
- Data Jumlah Penduduk Kota , Kecamatan dan Kelurahan
- Sosial ekonomi Masyarakat Nelayan pada Kawasan Penelitian
- Jumlah Fasilitas dan Utilitas dalam kawasan penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode Survei yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Kuesioner

Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner, untuk mengambil data primer secara langsung di lapangan serta membandingkan dengan data sekunder dari instansi yang terkait tentang objek yang diteliti.

2. Wawancara Terstruktur

Wawancara untuk kepentingan penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara berstruktur dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
- 2) Wawancara bebas, yaitu teknik pengumpulan data melalui wawancara bebas kepada sejumlah informan.

E. Teknik Analisa Data

Potensi sektor perikanan yang ada di Kota Ternate dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan dengan metode analisis yang digunakan "*Location Quotient*" (LQ) sedangkan untuk mengetahui strategi pengembangan kawasan minapolitan dengan analisis *SWOT*

A. Metode "*Location Quotient*" (LQ)

Metode *location quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui kemampuan sektor/subsektor ekonomi yang sudah tumbuh di wilayah studi atau menjanging sektor/subsektor ekonomi potensial dalam skala wilayah yang lebih luas. Formulasi yang digunakan adalah :

$$LQ_i = \frac{S_i / N_i}{S / N}$$

Dimana :

S_i = Jumlah *variabel*/sektor/subsektor ekonomi di daerah kajian.

(Mis variabel : jumlah tenaga kerja, nilai tambah produksi).

N_i = Jumlah *variabel*/sektor/subsektor ekonomi di daerah yang menjadi orientasi daerah kajian.

S = Jumlah *variabel* semua sektor di daerah kajian.

N = Jumlah *variabel* semua sektor di daerah yang menjadi orientasi daerah kajian.

Apabila :

$LQ_i > 1$: Daerah kajian memiliki potensi distribusi keluar daerah dalam sektor/sub sektor ekonomi i .

$LQ_i < 1$: Daerah kajian memiliki potensi distribusi d dalam sektor/subsektor ekonomi i .

$LQ_i < 1$: Daerah kajian berkecukupan dalam sektor/subsektor ekonomi i .

Berdasarkan formulasi di atas dapat dinyatakan bahwa pada dasarnya pendekatan LQ memperlihatkan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah kajian dan sektor sejenis di lingkup daerah yang lebih luas. Dari perbandingan relatif tersebut, dapat diketahui sektor-sektor/sub-sektor prospektif yang dimiliki daerah kajian, baik di pasar lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Sebagai tambahan, variabel *tenaga kerja* dalam formulasi di atas bukanlah satu-satunya variabel yang bisa digunakan. Variabel lain yang dapat diterapkan antara lain adalah *produksi*, *pendapatan* dan *nilai tambah* yang dihasilkan sektor tertentu. Jadi, untuk suatu wilayah

pengembangan, ukuran-ukuran di atas dapat digunakan sesuai dengan ketersediaan data.

Hasil perhitungan LQ belum bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir, melainkan bersifat sementara karena masih harus dilengkapi dengan metoda pendekatan lainnya. Akan tetapi, kesimpulan sementara tersebut sudah cukup menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam sektor tertentu.

Jika pada tahap perhitungan LQ ini, ternyata nilai LQ untuk sub sektor industri hasil laut masih ≤ 1 , maka dilakukan semacam simulasi (*exercise*) untuk mengetahui seberapa besar masukan (input dari peran subsektor terhadap perekonomian daerah) yang diperlukan agar LQ subsektor ini bisa mencapai angka > 1 . Nilai masukan (input) inilah yang mendasari perlunya kajian ini dilakukan. Namun, jika nilai LQ pada perhitungan awal ini > 1 , maka *exercise* ini tidak diperlukan karena sub sektor hasil laut sudah menunjukkan perannya sebagai subsektor prospektif.

F. Metode SWOT

Analisis keterkaitan antar aspek merupakan analisis potensi dan masalah serta peluang dan tantangan dilakukan dengan menggunakan Metode Analisis SWOT (Rangkuti, Freddy.1997). Model analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan tantangan/ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi. Dengan demikian, perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi yang meliputi : kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan/ancaman dalam kondisi yang ada saat ini.

1. Pendekatan Kualitatif Matriks SWOT

Pendekatan kualitatif matriks SWOT sebagaimana dikembangkan oleh Kearns menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

Matriks SWOT Kearns

EKSTERNAL INTERNAL	OPPORTUNITY	TREATHS
STRENGTH	<i>Comparative Advantage</i>	<i>Mobilization</i>
WEAKNESS	<i>Divestment/Investment</i>	<i>Damage Control</i>

Sumber. Hisyam, 1998

Keterangan:

Sel A: Comparative Advantances

Sel ini merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat.

Sel B: *Mobilization*

Sel ini merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.

Sel C: *Divestment/Investment*

Sel ini merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Situasi seperti ini memberikan suatu pilihan pada situasi yang kabur. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya. Pilihan keputusan yang diambil adalah (melepas peluang yang ada untuk dimanfaatkan organisasi lain) atau memaksakan menggarap peluang itu (investasi).

Sel D: *Damage Control*

Sel ini merupakan kondisi yang paling iemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari War dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah *Damage Control* (mengendalikan kerugian) sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang di perkirakan.

2. Pendekatan Kuantitatif Analisis SWOT

Data SWOT kuantitatif di atas dapat dikembangkan secara kuantitatif melalui perhitungan Analisis SWOT yang dikembangkan oleh Pearce dan Robinson (1998) agar diketahui secara pasti posisi organisasi yang sesungguhnya.

Perhitungan yang dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

1. Melakukan perhitungan skor (a) dan bobot (b) point faktor serta jumlah total perkalian skor dan bobot ($c = a \times b$) pada setiap faktor S-W-O-T;

Menghitung skor (a) masing-masing point faktor dilakukan secara saling bebas (penilaian terhadap sebuah point faktor tidak boleh dipengaruhi atau mempengaruhi penilaian terhadap point faktor lainnya. Pilihan rentang besaran skor sangat menentukan akurasi penilaian namun yang lazim digunakan adalah dari 1 sampai 10, dengan asumsi nilai 1 berarti skor yang paling rendah dan 10 berarti skor yang paling tinggi.

Perhitungan bobot (b) masing-masing point faktor dilaksanakan secara saling ketergantungan. Artinya, penilaian terhadap satu point faktor adalah dengan membandingkan tingkat kepentingannya dengan point faktor lainnya. Sehingga formulasi perhitungannya adalah nilai yang telah didapat (rentang nilainya lama dengan banyaknya point faktor) dibagi dengan banyaknya jumlah point faktor).

2. Melakukan pengurangan antara jumlah total faktor S dengan W (d) dan faktor O dengan T (e); Perolehan angka ($d = x$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu X, sementara perolehan angka ($e = y$) selanjutnya menjadi nilai atau titik pada sumbu Y;

Mencari posisi organisasi yang ditunjukkan oleh titik (x,y) pada kuadran SWOT.

NO	STRENGTH	SKOR	BOBOT	TOTAL
1				
2	dst			
	Total Kekuatan			
NO	WEAKNESS	SKOR	BOBOT	TOTAL
1				
2	dst			
	Total Kelemahan			
Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = S – W = x				

NO	OPPORTUNITY	SKOR	BOBOT	TOTAL
1				
2	dst			
	Total Peluang			

NO	TREATH	SKOR	BOBOT	TOTAL
1				
2	dst			
	Total Tantangan			
Selisih Total PeWang — Total Tantangan = 0 — T = y				

- Perhitungan Nilai Skor

Dengan asumsi internal penilaian

- 1-2 : Tidak berpengaruh
- 3-4 : Kurang berpengaruh
- 5-6 : Cukup berpengaruh
- 7-8 : Berpengaruh
- 9-10 : Sangat berpengaruh

- Pemberian Nilai bobot

Nilai skor dibagi dengan banyak jumlah poin faktor

$$\text{Bobot} = \frac{\text{Skor}}{\text{Poin Faktor Strength}}$$

$$\text{Bobot} = \frac{8}{3} = 2,67$$

Kuadran I (positif, positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang, Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Progresif**, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal.

Kuadran II (positif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah

Diversifikasi Strategi, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Kuadran III (negatif, Positif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Ubah Strategi**, artinya organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya. Sebab, strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang yang ada sekaligus memperbaiki kinerja organisasi.

Kuadran IV (negatif, negatif)

Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Strategi Bertahan**, artinya kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis adalah Matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil serta terisolir dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, seperti disajikan pada gambar berikut ini.

Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	STRENGTHS (KEKUATAN) (S) Tentukan 4-10 faktor-faktor Kekuatan Internal.	WEAKNESSES (KELEMAHAN) (W) Tentukan 4-10 faktor-faktor Kelemahan Internal.
OPPORTUNITIES (PELUANG) (O) Tentukan 4-10 faktor-faktor Peluang Eksternal.	STRATEGI (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (ANCAMAN) (T) Tentukan 4-10 faktor-faktor Ancaman Eksternal.	STRATEGI (ST) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	STRATEGI (WT) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Keterangan :

- **Strategi (SO).** Strategi dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- **Strategi (ST).** Strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman.
- **Strategi (WO).** Strategi ini ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

- **Strategi (WT).** Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

a. Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal digunakan untuk mengetahui sampai sejauhmana kekuatan dan kelemahan wilayah perbatasan, pulau-pulau terpencil dan terisolir yang didasarkan kepada aspek : visi dan misi; kelembagaan; kualitas SDM/aparatur; peralatan dan fasilitas; dan dukungan anggaran.

Faktor Lingkungan Internal meliputi : Kekuatan (S) dan Kelemahan (W).

Matrik Faktor Lingkungan Internal :

- (1) Bobot masing-masing faktor, berskala mulai dari 1 (tidak penting) sampai dengan 100 (sangat penting).
- (2) Rating masing-masing faktor kekuatan, berskala mulai dari 1 (kurang mendukung) sampai dengan 4 (sangat mendukung).
- (3) Rating masing-masing faktor kelemahan, berskala mulai dari 1 (kurang menghambat) sampai dengan 4 (sangat menghambat).

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk menginventarisasi adanya peluang dan tantangan/ancaman yang dihadapi oleh kawasan perbatasan, pulau-pulau terpencil dan terisolir yang didasarkan kepada beberapa faktor : faktor eksternal yang relevan, faktor yang tampak kritis dalam mendukung dan menghambat dan kejadian atau isu kebijakan

yang dapat mempengaruhi dan besar pengaruhnya kepada kawasan tersebut.

Faktor-faktor Analisis Lingkungan Eksternal meliputi : Peluang (O) dan Tantangan/Ancaman (T).

Matrik Faktor Lingkungan Eksternal :

- (1) Bobot masing-masing faktor lingkungan, berskala mulai dari 1 (tidak penting) sampai dengan 100 (sangat penting).
- (2) Rating masing-masing faktor peluang, berskala mulai dari 1 (peluangnya kecil) sampai dengan 4 (peluangnya sangat besar).
- (3) Rating masing-masing faktor tantangan/ ancaman, berskala mulai dari 1 (pengaruhnya kecil) sampai dengan 4 (pengaruhnya sangat besar).

Hasil Analisis Lingkungan Internal

Masing-masing faktor lingkungan internal yaitu kekuatan (S) dan Kelemahan (W) selanjutnya diberi bobot (skala 1 – 100) dan rating (skala 1 – 4). Rangkaian tiap faktor kekuatan dan kelemahan ditentukan menurut skor bobot dikalikan dengan rating. Skor tertinggi akan mempunyai ranking I. Rangkaian selanjutnya ditentukan berdasarkan nilai skor.

Hasil Analisis Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor Lingkungan internal	Bobot	Rating	Score b x r	Ranking
Kekuatan (S)				
1.				
2.				
3.				
4.				
Kelemahan (W)				
1.				
2.				
3.				
4.				
TOTAL	100	-	-	-

Masing-masing faktor lingkungan eksternal yaitu peluang (O) dan Tantangan/Ancaman (T) selanjutnya diberi bobot (skala 1 – 100) dan rating (skala 1 – 4). Rank setiap faktor peluang dan tantangan/ancaman ditentukan menurut score bobot dikalikan dengan rating. Skor tertinggi akan mempunyai rank I. Rank selanjutnya ditentukan berdasarkan nilai skor.

Faktor-faktor Lingkungan eksternal	Bobot	Rating	Score b x r	Ranking
Peluang (O)				
1.				
2.				
3.				
4.				
Tantangan/Ancaman (T)				
1.				
2.				
3.				
4.				
TOTAL	100	-	-	-

Penyusunan Strategi Perencanaan
Matriks Analisis Strategi Perencanaan

ANALISIS LINGKUNGAN EKTERNAL	ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	Kekuatan (S) : 1. 2.	Kelemahan (W) : 1. 2.
	Peluang (O) : 1. 2.	a. Strategi SO : 1) (1s - 1o) 2) (1s - 2o) 3) (2s - 1o) 4) (2s - 2o)	b. Strategi WO : 1) (1w - 1o) 2) (1w - 2o) 3) (2w - 1o) 4) (2w - 2o)
	Tantangan (T) : 1. 2.	c. Strategi ST : 1) (1s - 1t) 2) (1s - 2t) 3) (2s - 1t) 5) (2s - 2t)	d. Strategi WT : 1) (1w - 1t) 2) (1w - 2t) 3) (2w - 1t) 4) (2w - 2t)

Faktor-faktor Strategi Umum

- i. **Strategi SO**, yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (faktor pendorong).
- ii. **Strategi WO**, yaitu strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang (faktor pendorong).
- iii. **Strategi ST**, yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan guna mengurangi tantangan/ancaman (faktor penghambat)

iv. **Strategi WT**, yaitu strategi mengurangi kelemahan guna mengatasi tantangan/ancaman (faktor penghambat)

Setelah faktor-faktor strategi umum ditentukan, langkah selanjutnya adalah menyusun Matrik pilihan CSF (*Critical Success Factor*) yaitu menghadapkan faktor-faktor strategi umum di atas dengan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan. Adapun caranya adalah sebagai berikut : Rating masing-masing unsur visi dan misi Departemen Kelautan dan Perikanan diberi skala mulai dari 1 (keterkaitannya kurang) sampai dengan 5 (keterkaitannya sangat besar). Secara rinci, pembobotan faktor-faktor strategi dapat dilihat pada Matrik berikut ini.

Matrik CSF Dalam Penetapan Strategi

No	STRATEGI	RATING					JML SCORE	URUTAN CSF		
		VISI	MISI KE							
			1	2	3	4			5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	STRATEGI (SO)									
2	STRATEGI (WO)									
3	STRATEGI (ST)									
4	STRATEGI (WT)									

G. Defenisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi terkait istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan defenisi operasional. Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini, antara lain :

- **Kawasan Minapolitan** adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan Perikanan berbasis wilayah dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan
- **Kawasan strategis** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap perkembangan kawasan makro Kota/Kabupaten baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
- **RTRW** adalah Rencana Tata Ruang Wilayah
- **PWP3K** adalah Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- **PPN** adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara
- **PPS** adalah Pelabuhan Perikanan Samudera
- **SWP** adalah Satuan Wilayah Pengembangan
- **Pengembangan Wilayah** atau **Regional Planning** adalah semua usaha yang dengan sadar merencanakan pengembangan daerah ditinjau dari berbagai segi sebagai satu kesatuan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hubungan manusia dan alamnya
- **Ekosistem** adalah suatu komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan mereka, suatu sistem fungsi dan interaksi yang terdiri dari organisme hidup dan

lingkungannya, seperti ekosistem mangrove, ekosistem estuari, ekosistem terumbu karang, ekosistem padang lamun

- **Garis pantai** adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan.
- **TMB** adalah taksi mina bahari
- **UPTT** adalah usaha perikanan budidaya terpadu
- **Kawasan Perkotaan** adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
- **Konservasi laut** adalah pengelolaan sumber daya alam hayati laut yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, serta merehabilitasi sumberdaya alam laut yang rusak.
- **Pantai** adalah daerah yang merentang dari daratan pantai sampai kebahagian terluar dari batasan pulau (continental shelf), yang berkurang lebih bersesuaian dengan daerah yang secara bergantian banjir atau terkena fluktuasi muka laut selama periode Kuaterner Akhir (*Late Quaternary Period*).
- **Pantai berbatu** adalah pantai yang mempunyai tebing pantai (cliff), biasanya dicirikan dengan dinding pantai terjal yang langsung berhubungan dengan laut. Jenis pantai tebing dapat ditemukan dalam

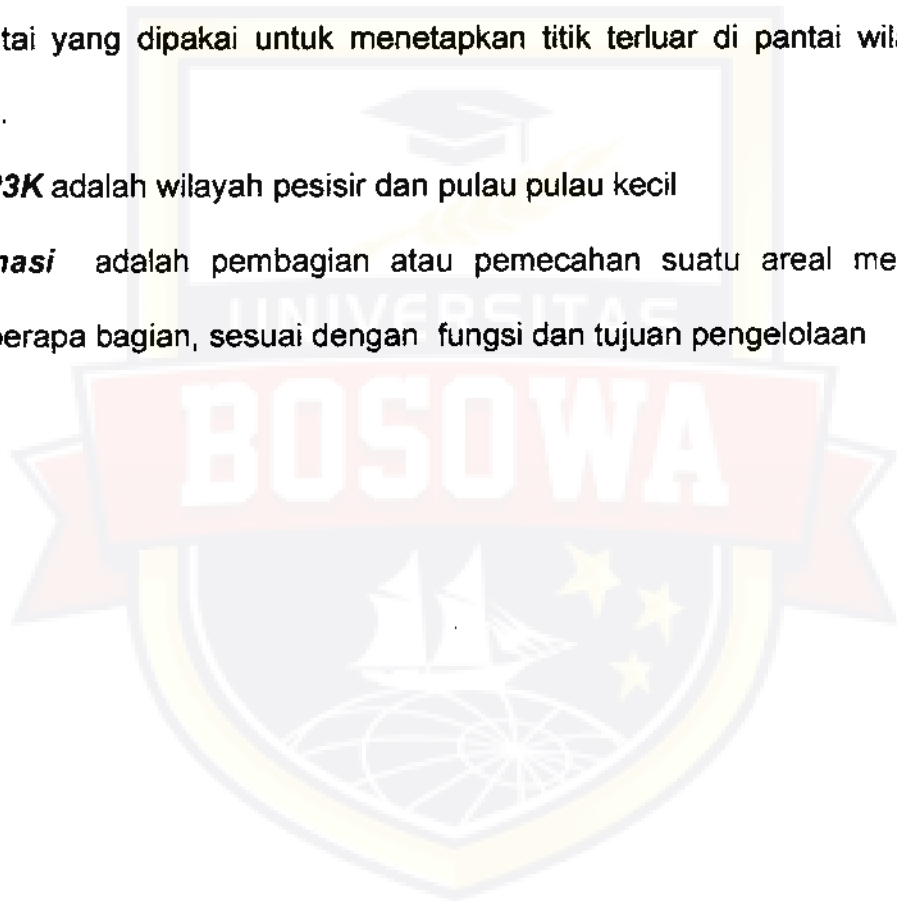
dua tipe: tebing pantai dengan material lepas yang gampang hancur atau runtuh, dan tebing karang yang umumnya keras dan tidak mudah hancur.

- **Pantai berpasir** adalah pantai yang material penyusunnya terdiri dari pasir bercampur batu, yang umumnya berasal dari daratan dibawa oleh aliran sungai ataupun yang berasal dari hulu daratan. Material yang menyusun pantai ini dapat juga berasal dari berbagai jenis biota laut seperti terumbu karang yang ada di daerah pantai itu sendiri.
- **Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT)** adalah suatu proses pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan jasa lingkungan yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan horizontal dan vertikal, ekosistem darat dan laut, sains dan manajemen sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut berkelanjutan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
- **Pengelolaan berkelanjutan** adalah pengelolaan sumber daya pesisir yang dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia pada saat ini tanpa mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa datang.
- **Perairan pesisir** adalah perairan laut teritorial yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, lagoon, dan daerah lainnya.

- **Pesisir laut** adalah kawasan peralihan antara ekosistem laut dan daratan yang saling berinteraksi dengan batas ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut yang dicirikan oleh jenis vegetasi yang khas.
- **Sempadan pantai** adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai.
- **Sumberdaya binaan atau buatan** adalah unsur-unsur fisik dan non-fisik yang terdapat di wilayah pesisir, yang diproses berdasarkan hasil rekayasa manusia. Sumberdaya binaan/buatan dapat berupa tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan pelabuhan, kawasan industri, dan kawasan pemukiman.
- **Sumberdaya pesisir** adalah sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir. Sumber daya alam terdiri atas sumber daya hayati dan nirhayati. Sumber daya hayati, antara lain ikan, rumput laut, padang lamun, hutan mangrove, dan terumbu karang, biota perairan serta ekosistemnya, sedang unsur nir-hayati terdiri dari lahan pesisir, permukaan air, sumberdaya di airnya, dan di dasar laut seperti minyak dan gas, pasir, timah, dan mineral lainnya.
- **Wilayah pesisir (coastal zone)** adalah wilayah peralihan ekosistem darat dan laut yang saling mempengaruhi dimana kearah laut 12 mil

dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu untuk kabupaten/kota dan kearah darat batas administrasi kabupaten/kota.

- **Wilayah laut** adalah ruang laut yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional, pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut.
- **WP3K** adalah wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
- **Zonasi** adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kota Ternate

1. Batas Wilayah Kota Ternate

Terbitnya Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, sebagai awal peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif menjadi Kotamadya. Peningkatan status ini tidak terlepas dari perkembangan daerah ini dari berbagai aspek terutama aspek sosial kemasyarakatan dan aspek perkembangan ekonomi.

Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan (*city islands*) yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak geografisnya berada pada posisi 0° - 2° Lintang Utara dan 126° - 128° Bujur Timur.

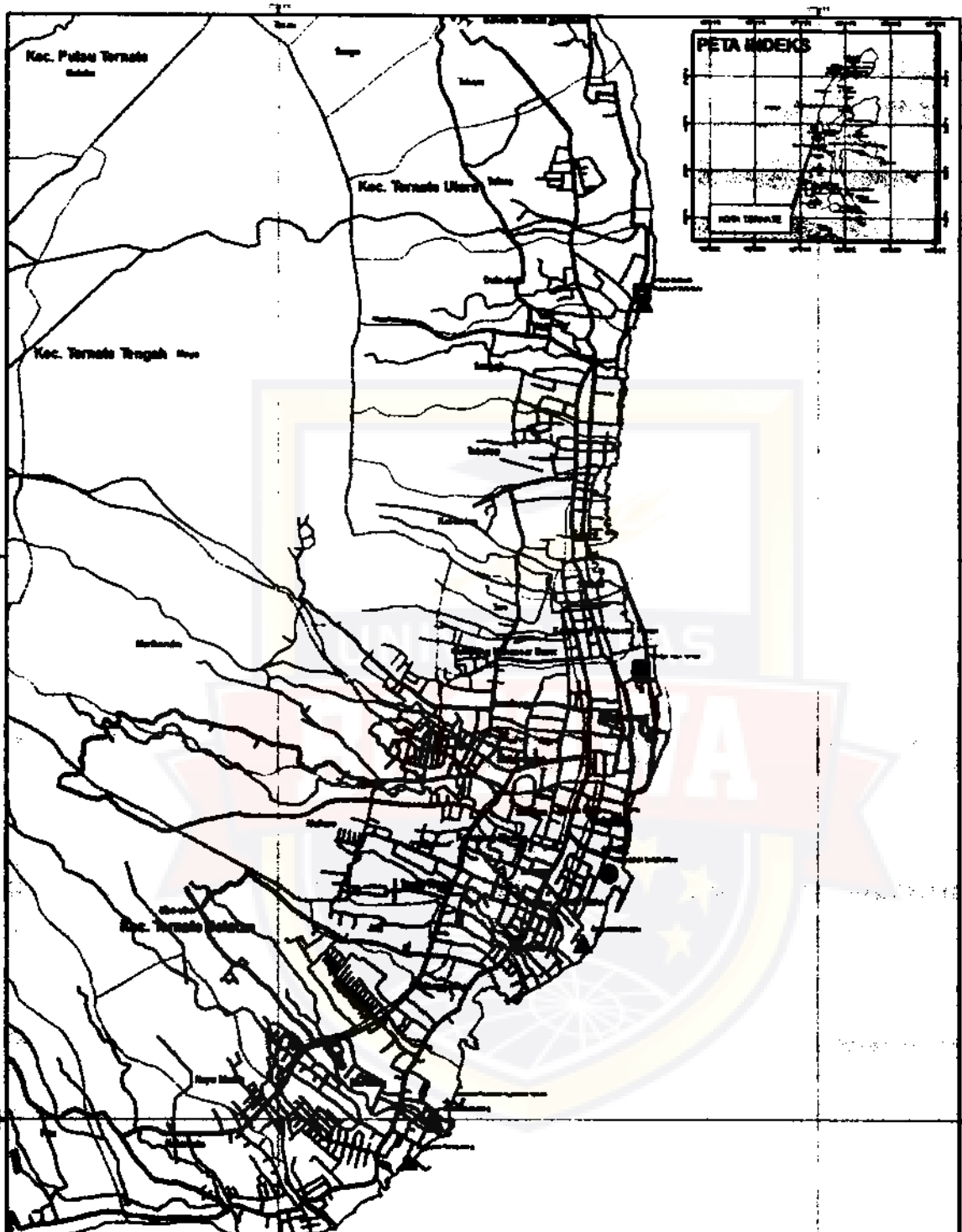
Luas daratan Kota Ternate sebesar 250,85 km², sementara lautannya 5.547,55 km². Kota Ternate seluruhnya dikelilingi oleh laut dengan delapan buah pulau, yang mana tiga diantaranya tidak berpenghuni.

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Ternate adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku

Gambar 4.1. Peta Citra Wilayah Kota Ternate





Skripsi Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate Provinsi Maluku Utara		MUHAMMAD AL-KAHFI 4516042006		Sumber 1. Digital NIM Bahasourban 2. Digital LRM Bahasourban 3. Citra Citra Bird Tahun 2000 4. Digital Elevation model ASTER GDEM 30 M Tahun 2010 5. Survey Lapangan Tahun 2011
Judul Gambar : Peta Pusat Kota Ternate		Pembimbing I Ir. H. Rahusani Rahusani, I.S	Pembimbing II Juried. ST. MSP	
Keterangan : 				PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2021

Gambar 4.3. Peta Pusat Kota Ternate



Sebagian Wajah Kota Ternate

2. Wilayah Pesisir

Seperti umumnya wilayah kepulauan yang memiliki ciri yaitu Desa/Kelurahannya merupakan wilayah pesisir, begitu pula dengan Kota Ternate. Seluruh wilayah kecamatan di Kota Ternate merupakan wilayah pesisir. Dari 77 kelurahan yang ada di wilayah Kota Ternate, 56 kelurahan berklasifikasi sebagai "Kelurahan Pesisir", dan 21 kelurahan lainnya berklasifikasi sebagai kelurahan bukan pesisir. (Lihat Tabel 4.1. dan Tabel 4.2.)

Tabel 4.1. Wilayah Pesisir di Kota Ternate

No.	Kecamatan	Wilayah Daratan		Klasifikasi Kelurahan		
		Lusa (Km ²)	Rasio (%)	Pesisir	Non Pesisir	Total
1	Pulau Ternate	65.88	26.26	12	1	13
2	Moti	24.6	9.81	6	0	6
3	Pulau Batang Dua	101.55	40.48	6	0	6
4	Pulau Hiri	6.7	2.67	6	0	6
5	Ternate Selatan	19.44	7.75	11	6	17
6	Ternate Tengah	18.52	7.38	4	11	15
7	Ternate Utara	14.16	5.84	11	3	14
Total		250.85	100.00	56	21	77

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka 2019

Tabel 4.2. Luas Pulau-Pulau di Wilayah Kota Ternate

No.	Nama Pulau	Luas (Km ²)	Rasio (%)
1	Pulau Ternate	111.80	44.57
2	Pulau Hiri	12.40	4.94
3	Pulau Moti	24.60	9.81
4	Pulau Mayau	78.40	31.25
5	Pulau Tifure	22.10	8.81
6	Pulau Maka	0.50	0.20
7	Pulau Mano	0.50	0.20
8	Pulau Gurida	0.55	0.22
Total		250.85	100.00

Sumber: Kota Ternate Dalam Angka 2019 (Diolah)

B. Kondisi Fisik Dasar Wilayah Pesisir (Daratan Dan Perairan)

Secara fisik, Kota Ternate memiliki karakter sebagai kota kepulauan, yang dengan demikian memiliki luas perairan yang cukup penting. Aspek fisik perairan ini membawa potensi tersendiri khususnya potensi sumber daya kelautan berupa hasil laut, maupun manfaat ekonomi laut untuk prasarana transportasi laut yang menguntungkan secara ekonomi, apalagi laut di wilayah Kota Ternate adalah tipe laut dalam.

1. Topografi

Kondisi topografi lahan kepulauan Ternate adalah berbukit bukit dengan sebuah gunung berapi yang masih aktif dan terletak ditengah pulau Ternate. Permukiman masyarakat secara intensif berkembang di sepanjang garis pantai kepulauan. Dari 5 pulau besar yang ada, umumnya masyarakat mengolah lahan perkebunan dengan produksi rempah-rempah sebagai produk unggulan dan perikanan laut yang diperoleh disekitar perairan pantai.

Pulau Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar diatas 40 % yang mengerucut kearah puncak Gunung Gamalama terletak ditengah - tengah Pulau. Didaerah pesisir rata-rata kemiringan adalah sekitar 2% - 8%. Jenis tanah mayoritas adalah tanah regosol diP. Ternate, P. Moti dan P. Hiri. (Lihat Gambar 4.4. dan Gambar 4.5.)



Gambar 4.4. Peta Topografi Wilayah Kota Temate



Skripsi
 Studi Pengembangan Kawasan Pesisir
 Kota Temate Provinsi Maluku Utara

Judul Gambar :
 Peta Topografi

Keterangan :

- | | | | |
|--|------------------------------------|--|----------------------|
| | Sungai | | Wilayah Administrasi |
| | Kanal | | Pulau Temate |
| | Demung Sementara | | Temate Selatan |
| | Perkebunan Lada / Perkebunan | | Temate Tengah |
| | Perkebunan Ubi dan/atau Perkebunan | | Temate Utara |
| | Desa / Kelurahan | | |
| | Buleta Kecamatan | | |
| | Buleta Kabupaten | | |
| | Jalan | | |
| | Batas Administrasi Kecamatan | | |
| | Batas Administrasi Kabupaten | | |
| | Perumahan | | |

MUHAMMAD AL-KAHFI
 4516042005

Pembimbing I	Pembimbing II
Lij. Rosafibria, IS	Jufriadi, ST., MSP



Skala 1 : 50.000

Sumber :

1. Databank dari Badan Nasional
2. Databank LULU Badan Nasional
3. Data Citra Satelit Tahun 2004
4. Digital Elevation Model ASTRON DEGM 30 M Tahun 2014
5. Survey Lapangan Tahun 2011



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA
 MAKASSAR 2019

Gambar 4.5. Peta Kemiringan Lereng Kota Temate



2. Geologi

Kendala yang ada terdiri dari aspek geologi, dimana terdapat gunung berapi aktif yang sering mengakibatkan terjadinya letusan dan aliran lahar. Selain itu secara geomorfologi, terdapat lahan berkelerengan tinggi dengan volume luasan yang cukup besar, sehingga sulit dikembangkan untuk kegiatan permukiman dan industri dalam skala yang besar. Dilihat dari aspek geologi dan jenis tanah, kota Ternate dan sekitarnya terdiri dari tanah regosol yang memiliki bahan induk utama batu pasir yang potensial untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan material bangunan. Sedangkan tanah podsolik merupakan tanah batuan beku yang memiliki daya dukung terhadap beban bangunan yang sangat baik. (Liat Gambar 4.6.)

Pulau Ternate sebuah pulau yang terbentuk karena proses pembentukan gunung api yang muncul dari dasar laut, sebagian berada di bawah muka laut dan sebagian lagi muncul di permukaan laut. Pulau-pulau lain yang merupakan bagian dari gunung ini adalah Pulau Hiri, terletak di sebelah utara, Pulau Tidore dan Pulau Maitara, terletak bagian selatan. Bentuk Pulau Ternate yang merupakan bagian dari sebuah gunung, maka secara umum morfologinya dapat dibagi menjadi 2 satuan morfologi gunungapi. Pembagian satuan morfologi tersebut sebagai berikut:

a) Morfologi Kaki Gunung Gamalama

Merupakan daerah kaki gunung api yang datar sehingga hampir datar, terletak di kaki timur, utara dan selatan dari Gunung Gamalama dan melampar

memajang sejajar pantai. Dilihat dari bentuk pendataran pantai ini, proses awalnya adalah adanya proses erosi yang terjadi di permukaan tubuh gunung api tersebut, kemudian lerengnya agak landai, pada bagian tubuh gunung terjal material erosi akan masuk ke dalam laut sehingga terbentuk endapan. Struktur batuan dari bentuk kaki Gunung Gamalama meliputi; batuan vulkaik jenis tufa.





Skripsi Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate Provinsi Maluku Utara		Sumber 1. Digital RBI Bakosurtanal 2. Digital LLN Bakosurtanal 3. Citra Quick Bird Tahun 2005 4. Digital Elevation model ASTER GEDM 30 M Tahun 2010 5. Survey Lapangan Tahun 2011	
Judul Gambar : Peta Geologi		Pembimbing I Y. H. Rahmawati Rahma, M.Si	Pembimbing II JUTIAH, ST, MScP
Keterangan : Jalan Sungai Pemukiman			
Danau Datar Tufa Lapili Datar Bukit		PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2020	

Gambar 4.6. Peta Geologi Wilayah Kota Ternate

b) Morfologi Tubuh dan Puncak Gunung Gamalama

Satuan ini merupakan bagian paling atas puncak gunung, pada elevasi di atas 1.000 meter dengan kemiringan lereng $>40\%$, di daerah puncak memperlihatkan perpindah titik kegiatan dari selatan ke utara. Secara historis Gunung Gamalama awalnya dimulai terbentuknya Pematang kawah terluar (tertua) berada di bagian tenggara disebut Bukit Melayu atau Gunung Kekau. Kemudian pematang kawah tengah membuka ke arah utara dikenal dengan nama Bukit Keramat atau Bukit Mediana (+1.669m), selanjutnya terbentuk kawah baru berada dibagian utara berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 300 meter, puncak setinggi +1.715 m dikenal dengan nama Gunung Arfat atau Piek van Ternate.

Pulau Ternate dilihat dari *statigrafinya*, tersusun oleh Gunung Api Holosen terdiri dari breksi vulkanik, lava andesit, pasir dan tufa.

3. Geomorfologi

Ditinjau dari kondisi geomorfologi regional Kota Ternate, maka wilayah Kota Ternate secara geomorfologi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) satuan, yaitu pegunungan, perbukitan dan perdataran, ketiga satuan morfologi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pegunungan, menempati bagian tengah Pulau Ternate (Gunung Gamalama 1.025 m dpl) dan Pulau Pulau Moti (Gunung Tuanane 950 m dpl);
- Perbukitan, menempati bagian timur Pulau Ternate;
- Perdataran, menempati wilayah pesisir yang mengelilingi Pulau Ternate.

Keterbatasan daya dukung ruang fisik Kota Ternate, diikuti pula dengan keberadaan gunung berapi Gamalama di tengah tengah pulau Ternate yang masih aktif dan sulit diprediksi keaktifannya. Keberadaan gunung ini menjadi pembatas dalam pengembangan lahan perkotaan.

Sedangkan jenis tanah rendana terdapat di P. Mayau, P. Tifure, P. Maka, P. Manom dan P. Gurida. Kondisi tersebut merupakan ciri tanah Pulau vulkanis dan pulau karang.

4. Iklim

Secara umum Kota Ternate dan daerah lainnya di Propinsi Maluku Utara mempunyai tipe iklim tropis, sehingga sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis. Di daerah ini mengenal dua musim yakni utara - barat dan timur - selatan yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Informasi mengenai parameter iklim di Kota Ternate sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.3. berikut ini.

Selama tahun 2019 kondisi iklim Kota Ternate menurut hasil laporan Stasiun Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Babullah Ternate adalah temperatur berkisar antara $23,1^{\circ}\text{C}$ - $32,6^{\circ}\text{C}$, kelembaban nisbi rata-rata 80%, tingkat penyinaran (intensitas cahaya) matahari rata-rata 63,75%, dan kecepatan angin rata-rata 4,08 km/Jam dengan kecepatan maksimum mutlak rata-rata 20,92 km/jam.

Pada periode waktu yang sama, temperatur udara tertinggi di Kota Ternate terjadi pada bulan September dan Oktober, sedangkan temperatur terendah

berlangsung pada bulan Juni dan Desember. Keadaan temperatur udara tersebut berbanding lurus dengan kondisi hari hujan dan curah hujan pada bulan yang sama.



Tabel 4.3. Kondisi Beberapa Parameter Iklim di Wilayah Kota Temate Tahun 2019

No.	Bulan	Temperatur (°C)			Kelembaban Nabli (%)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (%)	Kecepatan Angin (knots)		Arah Angin (°)	Hari Hujan (Hh)	Curah Hujan (mm)
		Rata-Rata	Maksimum	Minimum			Rata-Rata	Maksimum			
1	Januari	29.0	30.5	24.9	84	57	5	25	320	28	134.0
2	Februari	26.7	30.2	24.3	84	55	5	22	330	19	213.0
3	Maret	26.5	30.5	24.0	80	54	4	20	340	20	367.0
4	April	27.0	31.5	24.4	84	65	3	17	340	21	370.0
5	Mei	27.5	31.6	24.7	84	63	3	18	250	20	197.0
6	Juni	27.1	31.1	23.1	77	47	4	22	190	14	146.0
7	Juli	27.1	30.8	23.6	76	63	6	22	190	12	75.0
8	Agustus	27.7	32.0	24.7	75	75	5	21	190	8	27.0
9	September	27.7	32.4	24.2	74	78	4	20	190	5	4.3
10	Oktober	27.9	32.6	24.4	77	75	3	16	350	11	25.4
11	November	27.3	32.0	24.5	83	59	3	27	330	21	332.1
12	Desember	27.3	31.9	23.5	82	74	4	21	330	14	94.1
	Rata-Rata	27.4	31.4	24.2	80.0	64	4	21	279	16	165.4

Sumber: Kota Temate Dalam Angka 2019

5. Hidro-Oseanografi

Dalam suatu wilayah pesisir terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir ada yang secara terus menerus tergenangi air dan ada pula yang tergenangi air sesaat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, ekosistem pesisir dapat dibedakan atas ekosistem yang bersifat alamiah dan ekosistem buatan. Ekosistem yang termasuk dalam ekosistem alamiah adalah hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, pantai berpasir, pantai berbatu, estuaria. Sedangkan ekosistem buatan terdiri dari tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan pemukiman.

Kota Ternate ditinjau dari sudut oseanografi memiliki daerah perairan atau atau laut. Hal ini dapat dilihat pada daerah bagian barat dan selatan, luas perairan 5.544,55 Km² (95,7%). Luas wilayah perairan tersebut cukup potensial bila dimanfaatkan sebagai wilayah pengembangan perikanan laut karena memiliki bermacam-macam hasil laut, ikan pelagis besar seperti; Tuna, Cakalang, Ikan pelagis kecil seperti; Selar, Layang, Kembung, Julung, Ekor kuning, Teri, dan lain-lain, dan ikan dasar seperti: ikan Kerapu, Bawal, Kakap Merah, dan beberapa jenis ikan lainnya.

A) Gelombang Laut

Gelombang merupakan salah satu parameter oseanografi fisika yang sangat mempengaruhi kondisi pantai. Gelombang sebagai parameter yang sangat penting dalam suatu survey pantai dimana penyebab pembentuknya adalah akibat angin, letusan gunung api bawah laut, peristiwa tsunami dan akibat

pergerakan tata surya. Data hasil pengukuran di lokasi survey pada wilayah pesisir Kota Ternate yaitu berkisar antara 1,5 m - 2,5 m.

B) Arus

Pergerakan arus yang berlangsung pada skala waktu dapat dibedakan menjadi arus musiman akibat pengaruh musim, yaitu musim barat dan musim timur dan arus harian yang dipengaruhi oleh pergerakan pasang surut. Data DISHIDROS TNI-AL (1992) diperoleh kecepatan arus tertinggi terjadi di Selat Capalulu yang mencapai 90 mil/jam, sedangkan arus lokal bervariasi pada saat arah angin menuju Timur Laut sampai Tenggara dan kearah Selatan sampai Barat dengan variasi antara 1-45 cm/detik.

Arus perairan pesisir Kota Ternate dipengaruhi oleh pasang surut dan angin Muson. Sedangkan faktor lain yaitu perbedaan densitas pada umumnya kecil, sehingga arus yang ditimbulkan juga relatif kecil yaitu 0,02 - 0,2 m/dt (UKL UPL, 2001). Selanjutnya kawasan pesisir yang terkena reklamasi pantai, arus mengalir dari tenggara dan barat daya kearah utara pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan Oktober. Sedangkan pada bulan lain, kawasan reklamasi pantai arus mengalir kearah selatan yang disebabkan pasang surut dan gaya Coriolis dengan kekuatan arus lemah.

Pengukuran arah dan kecepatan arus pada daerah survey pantai dimaksudkan untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang dampak hembusan angin dan diasumsikan arah arus mengikuti (searah) dengan pola

sebaran angin. Di samping itu untuk mengetahui kemungkinan arus turbulensi dan pola arus menyebabkan proses sedimentasi pada daerah tersebut.

Hasil pengukuran arus pada wilayah survey yaitu berkisar antara 0,13 - 0,93 m/det dengan arah 200° - 310° , sedangkan arus yang terjadi dipantai umumnya adalah arus menyusuri pantai.

C) Pasang Surut

Pasang surut yang terjadi di perairan Maluku Utara adalah tipe pasang surut ganda, yaitu mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut pada interval waktu yang sama. Sedangkan variasi gelombang besar terjadi pada bulan September - Desember dengan ketinggian mencapai 1,50 - 2,0 meter (DISHIDROS TNI-AL dan LIPI Ambon, 1994).

6. Batimetri

Kelandaian pantai pada wilayah Kota Ternate secara umum berkisar antara 43,3% - 60% ini menunjukkan bahwa daerah survey memiliki pantai yang terjal. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, dimana tingkat kedalamannya tidak terlalu dalam, sekitar 10 meter sampai pada jarak sekitar kurang dari 500 m dari garis pantai sehingga memungkinkan adanya peluang reklamasi. Tetapi pada bagian lain terdapat tingkat kedalaman yang cukup besar dan berjarak tidak jauh dari garis pantai yang ada. (Lihat Gambar 4.7).

Gambar 4.7. Peta Batimetri Perairan Pesisir Kota Temate





Kota Ternate secara geografis terletak pada posisi membujur dari Utara ke Timur. Kedalaman laut adalah bervariasi, pada beberapa lokasi di sekitar Pulau Ternate, perubahan kedalaman laut berkisar antara 10–100 meter dari garis pantai. Kedalaman Laut Ternate berkisar antara 27-200 meter, pada pantai Bastiong kedalaman mencapai lebih kurang 79 meter, Tanjung Pasir Putih sekitar 99 meter, Pantai Jambula berkisar 62-63 meter, dan kedalaman Selat Ternate ± 27 meter.

C. Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir (Daratan Dan Perairan)

1. Penggunaan Lahan Daratan Pesisir

Pola pemanfaatan lahan pada suatu wilayah merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan lingkungan. Polarisasi dan intensitas penggunaan lahan tersebut juga merupakan indikator yang mencerminkan aktivitas utama dalam tingkat penguasaan teknologi penduduk dalam mengeksploitasi sumberdaya lahan sekaligus mencerminkan karakteristik potensi wilayah yang bersangkutan.





Ditinjau mengenai pola penggunaan lahan di wilayah Kota Ternate dalam penyusunan RTRW Kota Ternate ini meliputi; klasifikasi penggunaan lahan dan status tanah. Lahan dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, fungsi lindung dan terdapat pula lahan tidak difungsikan (lahan tidur/alang-alang). Untuk kegiatan budidaya terdiri dari penggunaan lahan untuk pemukiman, pertanian, perkebunan dan prasarana perkotaan lainnya. Sedangkan untuk fungsi lindung adalah Hutan lindung, dan hutan konservasi. Pemanfaatan fungsi lahan permukiman

menunjukkan intensitas dan peningkatan yang cukup tinggi, yang dapat dijelaskan dengan adanya peningkatan jumlah bangunan dari tahun ke tahun. (Lihat Gambar 4.8.)



Gambar 4.8. Peta Penggunaan Lahan Daratan Pesisir Pulau Ternate



<p>Skrripsi Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate Provinsi Maluku Utara</p>																					
<p>Judul Gambar : Peta Penggunaan Lahan Daratan Pesisir Pulau Ternate</p>																					
<p>   Skala 1 : 80.000  </p>																					
<p>Legenda :</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Pantai</td> <td>Padukan Uluh (Damar)</td> </tr> <tr> <td>2. Pantai</td> <td>Per. Teras (Tan)</td> </tr> <tr> <td>3. Pantai Damar</td> <td>Per. Teras (Seng)</td> </tr> <tr> <td>4. Padukan Uluh (Pondok)</td> <td>Per. P. (Mak)</td> </tr> <tr> <td>5. Padukan Uluh (Banyuw)</td> <td>Per. / Bndk (Pul. Lam)</td> </tr> <tr> <td>6. Pantai Damar</td> <td>Pembudid. / T. (Tan)</td> </tr> <tr> <td>7. Pantai Damar</td> <td>Pembudid. ds. Teras (Cipat)</td> </tr> <tr> <td>8. Pantai Damar</td> <td>Per. / Bndk (Cang. Lany)</td> </tr> <tr> <td>9. Pantai Damar</td> <td>Per. / Bndk (Cang. Lany)</td> </tr> <tr> <td>10. Pantai Damar</td> <td>Per. / Bndk (Cang. Lany)</td> </tr> </table> <p>— Per. Adm. (Kawasan)</p>		1. Pantai	Padukan Uluh (Damar)	2. Pantai	Per. Teras (Tan)	3. Pantai Damar	Per. Teras (Seng)	4. Padukan Uluh (Pondok)	Per. P. (Mak)	5. Padukan Uluh (Banyuw)	Per. / Bndk (Pul. Lam)	6. Pantai Damar	Pembudid. / T. (Tan)	7. Pantai Damar	Pembudid. ds. Teras (Cipat)	8. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)	9. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)	10. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)
1. Pantai	Padukan Uluh (Damar)																				
2. Pantai	Per. Teras (Tan)																				
3. Pantai Damar	Per. Teras (Seng)																				
4. Padukan Uluh (Pondok)	Per. P. (Mak)																				
5. Padukan Uluh (Banyuw)	Per. / Bndk (Pul. Lam)																				
6. Pantai Damar	Pembudid. / T. (Tan)																				
7. Pantai Damar	Pembudid. ds. Teras (Cipat)																				
8. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)																				
9. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)																				
10. Pantai Damar	Per. / Bndk (Cang. Lany)																				
<p>MUHAMMAD AL-KAHFI 4519042006</p>																					
<p>Pembimbing I Lili Husniel Husni, LIS</p>	<p>Pembimbing II Jufriedi, ST, MSP</p>																				
<p>Sumber :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Atlas dan Peta Indonesia 2. Digital UTM Basepoint 3. Open Data Road Thru 2015 4. Digital Basepoint Road ASTRM 02004 20 10 Ternate 2015 5. Survey Lapangan Tahun 2017 																					
<p>  PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK INGERSIDA BANGSA MALUKU UTARA </p>																					

Pembangunan pusat permukiman masih terkonsentrasi di kawasan pantai dengan konsentrasi kepadatan tinggi di bagian selatan dan tidak teratur merupakan masalah utama kawasan permukiman kepulauan.

Lahan di wilayah Kecamatan Ternate Utara menurut penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis penggunaan, yaitu :

- Lahan terbangun dengan klasifikasi penggunaan permukiman dan fasilitas pelayanan umum.
- Lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, pertanian, hutan, lahan tidur, dan jenis penggunaan lainnya.

Dari 2.458 Ha luas lahan wilayah Kecamatan Ternate Utara, luas lahan terbangun yang diperuntukkan untuk permukiman, fasilitas pelayanan umum yaitu sebesar \pm 544 Ha atau 22 %. Sedangkan luas lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, kebun campuran, dan hutan rakyat sebesar \pm 357 Ha atau 15 % dari luas wilayah Kecamatan Ternate Utara. Lahan tidur berupa alang-alang juga cukup luas yakni sebesar 483 Ha atau mencapai 20% terhadap luas Kecamatan.

Lahan di wilayah Kecamatan Ternate Selatan menurut penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis penggunaan, yaitu :

- Lahan terbangun dengan klasifikasi penggunaan permukiman dan fasilitas pelayanan umum.
- Lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, pertanian, hutan, rawa dan jenis penggunaan lainnya.

Dari 3.188 Ha luas lahan wilayah Kecamatan Ternate Selatan, luas lahan terbangun yang diperuntukkan untuk permukiman, fasilitas pelayanan umum yaitu sebesar \pm 689 Ha atau 22 %. Sedangkan luas lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, kebun campuran, dan hutan rakyat sebesar \pm 386 Ha atau 12% dari luas wilayah Kecamatan Ternate Selatan. Lahan tidur berupa alang-alang juga cukup luas yakni sebesar 365 Ha atau mencapai 11% terhadap luas Kecamatan.

Lahan di wilayah Kecamatan Pulau Ternate menurut penggunaannya dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis penggunaan, yaitu :

- Lahan terbangun dengan klasifikasi penggunaan permukiman / perkampungan serta fasilitas pelayanan umum.

Lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, kebun campuran, hutan lebat, hutan belukar, semak / alang-alang, danau, rawa, dan tanah kota. Dari 16.980 Ha luas lahan wilayah Kecamatan Pulau Ternate, luas lahan terbangun yang diperuntukkan untuk permukiman, fasilitas pelayanan umum yaitu sebesar \pm 354 Ha atau hanya 2%. Sedangkan luas lahan non terbangun dengan klasifikasi penggunaan perkebunan, kebun campuran, dan hutan rakyat sebesar \pm 3184 Ha atau 19% dari luas wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Lahan tidur berupa alang-alang juga cukup luas yakni sebesar 2357 Ha atau mencapai 14% terhadap luas Kecamatan.

Sumberdaya lahan di Kota Ternate dapat terlihat dari kondisi tutupan lahan atau pemanfaatan lahan yang terbentuk. Pada dasarnya pembentukan pola

pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh faktor fisik lahan seperti letak geografis, struktur geologi dan tanah, klimatologi wilayah, dan sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Sumber data yang diperoleh tidak menguraikan kondisi pemanfaatan lahan di Kota Ternate, sehingga untuk melakukan identifikasi struktur pemanfaatan lahan dilakukan pendekatan analisis spacial berbasis geographic information sistem. Pemanfaatan lahan yang terbentuk hingga saat ini di Kota Ternate terdiri atas lahan hutan, persawahan, perkebunan rakyat, tambak, permukiman, pada rumput/alang-alang dan lain sebagainya. Peta penggunaan lahan dapat disajikan pada Gambar 3.9.

2. Penggunaan Lahan Perairan Pesisir

Seluruh wilayah perairan pesisir kawasan minapolitan Kota Ternate telah dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran, maksudnya adalah digunakan sebagai alur pelayaran utk alur pelayaran nasional, regional, lokal, perikanan, dan pariwisata. Khusus untuk kegiatan perikanan, nelayan menggunakan wilayah perairan pesisir kawasan minapolitan Kota Ternate untuk alur pelayaran menuju daerah penangkapan ikan (*fishing ground*) dari pelabuhan perikanan (PPI & PPN), dan membawa ikan hasil tangkapan dari daerah penangkapan ikan menuju pelabuhan perikanan di Kota Ternate.

Di pantai kawasan minapolitan Kota Ternate terdapat dermaga-dermaga penyeberangan untuk menyebrangkan penduduk Kota Ternate ke beberapa tempat di Pulau Halmahera, Pulau Hiri, Pulau Moti, dan pulau-pulau di sekitar Kota Ternate. Transportasi air ini berlangsung setiap saat sehingga lalu lintas di perairan pesisir terlihat cukup padat oleh pergerakan *speed boat* dan kapal-kapal



lainnya. Kegiatan tersebut hampir menggunakan seuruh wilayah perairan sehingga tidak dapat digunakan untuk kegiatan perikanan budidaya terutama untuk budidaya laut (marikultura).



LAUT MALUKU



LAUT MALUKU

Skripsi Studi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate Provinsi Maluku Utara		MUHAMMAD AL-KAHFI 4516042006		Sumber 1. Digital RMI Bakosurtanal 2. Digital LLN Bakosurtanal 3. Citra Quick Bird Tahun 2005 4. Digital Elevation model ASTER GEDM 30 M Tahun 2010 5. Survey Lapangan Tahun 2011	
Judul Gambar : Peta Tutupan Lahan		Pembimbing I Ir. H. Rahmatul Rahmat, M.Si	Pembimbing II Julriad, ST, MSP	PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR 2020	
Keterangan : - Batas Kecamatan - Batas Kelurahan - Garis Pantai		- Jalan Kolektor primer - Jalan Kolektor Sekunder - Jalan Lokal Primer - Jalan Lokal Sekunder	- Hutan - Kawah - Kawasan Bandara - Perumahan	 	

Gambar 4.9. Peta Tutupan Lahan Kota Ternate

3. Kegiatan Perikanan Tangkap

A) Potensi Sumber Daya Ikan (SDI)

Kota Ternate dikenal sebagai kota kepulauan karena wilayahnya terdiri dari 8 pulau, luas 5.795,4 km², terdiri dari luas perairan 5.544,55 km² atau 95,7% dan luas daratan 250,85 km² atau 4,3% dengan bentangan pantai sepanjang ± 124 km. Dari kondisi tersebut laut Kota Ternate menyimpan potensi perikanan berupa *standing stock* ikan sebesar 71.757,38 ton/tahun dan potensi Lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) sebesar 47.838,25 ton/tahun. Sedangkan PPN Ternate merilis potensi sumber daya ikan Kota Ternate sebanyak 278.000 ton yang terdiri dari ikan pelagis besar (104.100.000 ton), ikan pelagis kecil (132.000 ton), dan ikan demersal (41.900 ton).

Tabel 4.4. Potensi Sumber Daya Ikan Kota Ternate Tahun 2018

No	Jenis Sumberdaya Ikan	Potensi (ton)	Potensi (kg)	Potensi (kg/ha)
1	Ikan Pelagis Besar	104,100.00	5,060.00	4.86
2	Ikan Pelagis Kecil	132,000.00	6,246.00	4.73
3	Ikan Demersal	41,900.00	2,885.00	6.89
Total		278,000.00	14,191.00	5.10

Sumber: PPN Ternate, 2019

Jika dibandingkan dengan volume produksi perikananannya pada tahun 2019 maka sumber daya ikan yang dieksploitasi oleh para nelayan Kota Ternate pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 5,10% hingga 18,56%. Dengan

demikian masih terbuka upaya peningkatan volume produksi perikanan tangkap melalui introduksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang produktif sesuai dengan kondisi sumber daya ikan dan daerah penangkapan ikan.

B) Sarana Kapal Perikanan

Volume produksi perikanan dari kegiatan perikanan tangkap di Kota Ternate dilaksanakan oleh para nelayan dengan menggunakan 1.380 unit kapal perikanan yang terdiri dari perahu tanpa motor (PTM) 912 unit (66,06%), perahu motor tempel (PMT) 365 unit (26,45%), dan kapal motor (KM) 103 unit (07,46%). Melihat data tersebut maka tipe perikanan tangkap di Kota Ternate didominasi oleh perikanan armada semut.

Dari seluruh kapal perikanan tersebut, di kawasan minapolitan Kota Ternate terdapat 682 unit (49,42%) yang tersebar di Kecamatan Ternate Utara 356 unit (25,80%), Kecamatan Ternate Tengah 251 unit (18,19%) dan Kecamatan Ternate Selatan 75 unit (5,43%).

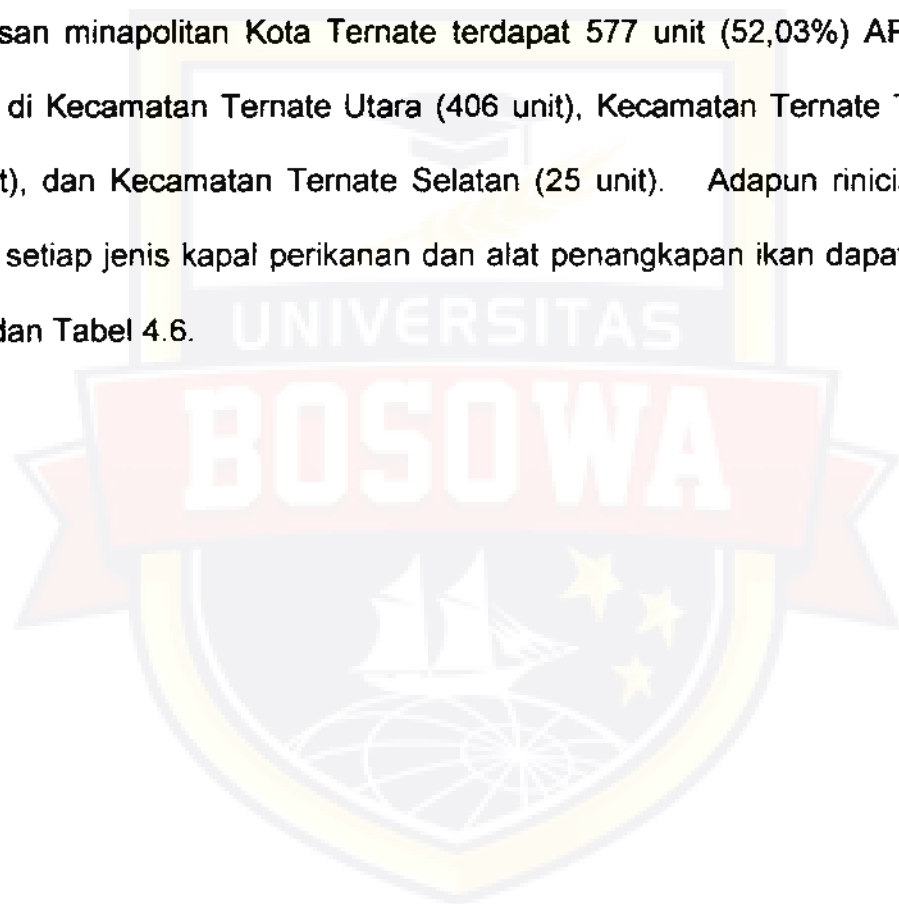
Keunggulan lain kawasan minapolitan Kota Ternate dari sisi kapal perikanan adalah memiliki kapal motor (KM) paling banyak yaitu 73 unit atau 70,87% dari seluruh kapal motor yang dimiliki oleh nelayan Kota Ternate. Kapal motor inilah yang menangkap ikan tuna dan cakalang menjadi jenis-jenis ikan target bagi para nelayan dan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kota Ternate.

Untuk lebih jelasnya, jenis, jumlah, dan sebaran kapal-kapal perikanan di wilayah administrasi Kota Ternate dapat dilihat pada Tabel 4.5.

C) Sarana Alat Penangkapan Ikan

Alat penangkapan ikan (API) yang digunakan oleh para nelayan selama tahun 2009 berjumlah 1.109 unit alat penangkapan ikan. API di Kota Ternate terdiri dari kelompok pancing (*line*) sebanyak 1.035 unit dan kelompok perangkap (*trap*) sejumlah 74 unit.

Di kawasan minapolitan Kota Ternate terdapat 577 unit (52,03%) API yang tersebar di Kecamatan Ternate Utara (406 unit), Kecamatan Ternate Tengah (146 unit), dan Kecamatan Ternate Selatan (25 unit). Adapun rincian dan sebaran setiap jenis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan dapat dilihat melalui dan Tabel 4.6.



Tabel 4.5. Keragaan dan Sebaran Kapal Perikanan di Kota Ternate Tahun 2020

No.	Kecamatan	Perahu Tanpa Motor/PTM (Unit)				Perahu Motor Tempel/PMT	Kapal Motor/KM							Jumlah	Total (Unit)	Ket				
		Jukung	Kecil	Sedang	Besar		Jumlah	0-5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30-50 GT	50-100 GT				100-200 GT	>200 GT		
1	Ternate Utara	61	78	76	20	235	70	20	8	23	-	-	-	-	-	-	51	356		
2	Ternate Tengah	52	54	48	18	172	63	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	16	251	
3	Ternate Selatan	15	17	10	2	44	25	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	75	
4	Pulau Ternate	26	37	38	15	116	53	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9	178	
5	Pulau Moti	31	56	49	19	155	69	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	9	233	
6	Pulau Batang Dua	21	26	30	12	89	40	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	133	
7	Pulau Hiri	23	33	32	13	101	45	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	154	
Kota Ternate		229	301	283	99	912	365	45	35	23	0	0	0	0	0	0	0	103	1,380	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Tabel 4.6. Keragaan dan Sebaran Alat Penangkapan Ikan di Kota Ternate Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jaring Angkat				Klasifikasi Jenis Alat Penangkapan Ikan			Pancing				Perangkap				Total (Unit)	Ket
		Bagan Tancap	Serok Pantal	Lain-Lain	Tuna	Rawai Hanyut	Tetap	Huhate	Pancing Lain	Pancing Tonda	Sero	Jermal	Bubu	Lain-Lain				
1	Ternate Utara	-	-	-	-	-	-	300	89	17	-	-	-	-	406			
2	Ternate Tengah	-	-	-	-	-	-	50	81	15	-	-	-	146				
3	Ternate Selatan	-	-	-	-	-	-	-	15	10	-	-	-	25				
4	Pulau Ternate	-	-	-	-	-	2	82	42	10	-	-	12	148				
5	Pulau Moti	-	-	-	-	-	-	41	45	15	6	-	37	144				
6	Pulau Batang Dua	-	-	-	-	-	3	64	33	7	-	-	9	116				
7	Pulau Hiri	-	-	-	-	-	-	69	36	9	-	-	10	124				
Kota Ternate		-	-	-	-	-	5	606	341	83	6	-	68	1,109				

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

D) Volume Produksi Perikanan Tangkap

Komoditas perikanan laut di Kota Ternate tersebut terdiri dari ikan pelagis besar (Tuna, Cakalang, Tongkol & Tenggiri), ikan pelagis kecil (Selar, Layang, Kembung, Julung, Ekor Kuning, Teri, dll), dan ikan dasar/demersal (Kerapu, Bawal, Kakap Merah, Kakap Sejati, Skuda, dll).

Sepanjang tahun 2019 produksi perikanan tangkap Kota Ternate mencapai 13.320,12 ton yang terdiri dari 38 jenis ikan. Dibandingkan dengan potensi lestari ikan lautnya, tingkat pemanfaatan tersebut baru mencapai 27,84%. Rincian volume produksi perikanan laut dari Kota Ternate.

Dari produksi yang dicapai tahun 2019 menunjukkan tingkat pemanfaatan masih rendah (*under exploitation*), sehingga peluang investasi perikanan dan kelautan di Kota Ternate masih sangat besar untuk dikembangkan. Sedangkan jenis ikan yang paling banyak ditangkap oleh para nelayan Ternate dan sekitarnya adalah Tuna (28,92%), Cakalang (18,07%), Tongkol (9,27%), dan Manyung (6,51%).

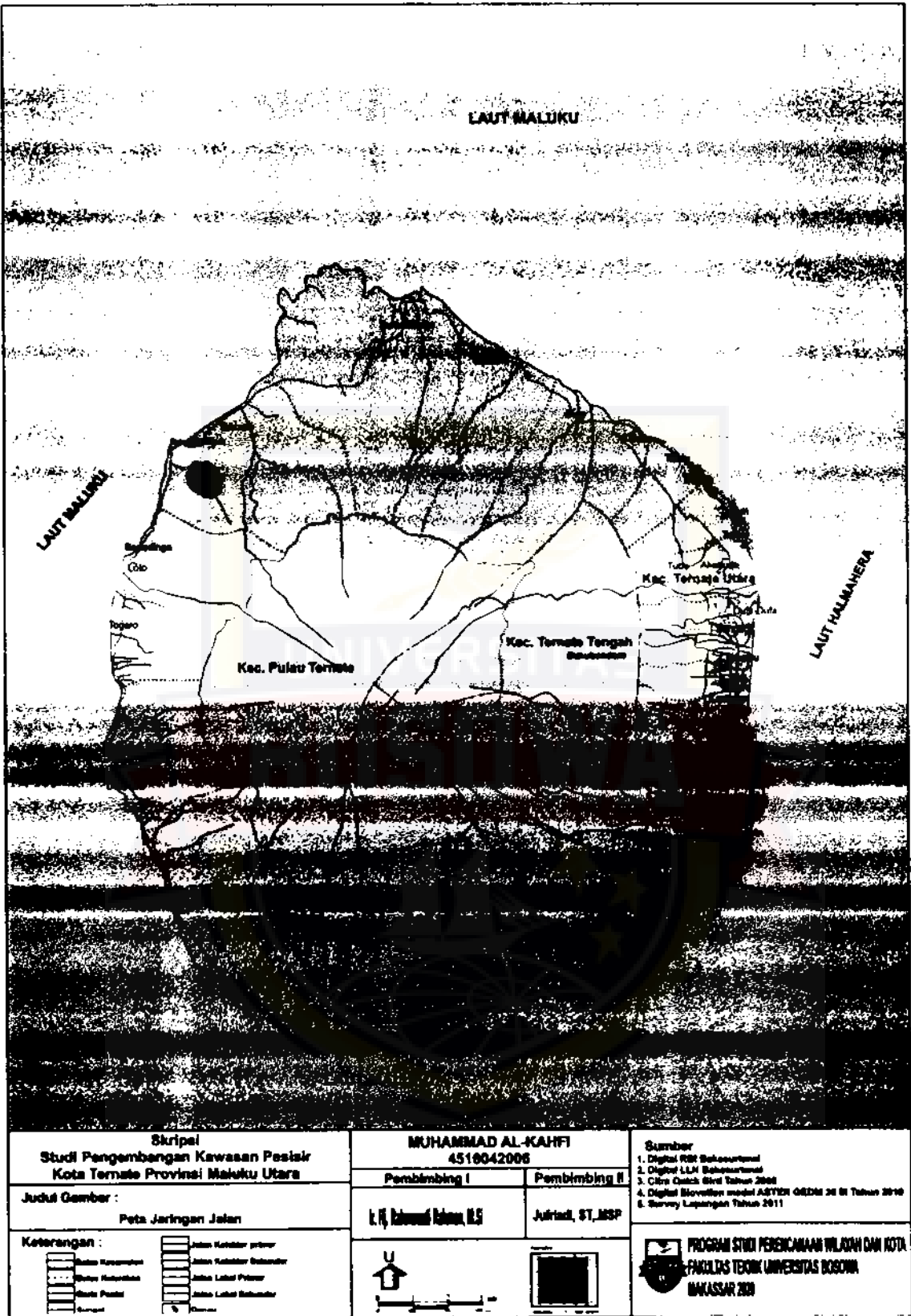
E) Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Data produksi perikanan yang dijual oleh para nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate pada tahun 2010 bernilai Rp. 47.215.738.000,- dengan volume produksi sebesar 5.147 ton ikan (didominasi oleh Tuna dan Layang). Sehingga harga jual ikan rata-rata oleh nelayan di PPN Ternate mencapai Rp. 9.173.448,22/ton. Harga rata-rata tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2009 yang mencapai Rp. 9.883.842,30/ton. Dengan demikian terjadi penurunan harga sebesar Rp. 710.394,08 /ton atau 7,19%.

D. Kondisi Infrastruktur Wilayah Pesisir

1. Prasarana Perhubungan/Transportasi

Jaringan jalan di wilayah Kota Temate terdiri dari jaringan jalan kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lingkungan dan jalan setapak. Jaringan jalan yang memiliki akses utama (kolektor primer) merupakan jaringan jalan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi, terutama arus lalu lintas pada kawasan kota. Kapasitas dan daya tampung kendaraan dengan berbagai jenis moda angkutan terhadap jalan ini menunjukkan intensitas relatif tinggi, terutama arus lalu lintas pada kawasan pusat kota. Kondisi dan tingkat pelayanan jalan ini berupa jalan aspal dengan lebar bahu \pm 6-8 meter. Sementara jaringan jalan sekunder dan jalan lingkungan umumnya berfungsi untuk melayani pergerakan penduduk, baik antar lingkungan pemukiman maupun antara lingkungan pemukiman dengan pusat-pusat kegiatan penduduk. Umumnya kondisi jalan-jalan ini berupa jalan-jalan aspal, perkerasan dan sebagian kecil merupakan jalan tanah, dengan lebar \pm 4-6 meter serta jalan setapak lebar minimal 1 meter.



Gambar 4.10. Peta Jaringan Jalan di Kota Ternate

Jaringan jalan yang terdapat di wilayah Kota Ternate berdasarkan fungsinya, terdiri dari: jalan kolektor primer, kolektor sekunder, jalan lingkungan serta jalan setapak.

- a) Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat-pusat kawasan. Jalan kolektor ini juga sekaligus berfungsi sebagai jalan penghubung antara satu distrik dengan distrik-distrik lainnya.
- b) Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan pusat distrik dengan pusat-pusat lingkungan. Disamping itu jalan ini juga menjadi penghubung antara pusat-pusat lingkungan.
- c) Jalan Lingkungan yaitu jalan yang menghubungkan persit-persit rumah dengan pusat-pusat lingkungan dan jalan-jalan kolektor.
- d) Jalan Setapak yaitu jalan yang menghubungkan persit-persit rumah dengan jalan lingkungan. Biasanya jalan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.



2. Prasarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih bagi penduduk Kota Ternate, khususnya penduduk Kecamatan Ternate Selatan dan Ternate utara dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Untuk kelurahan yang belum terjangkau oleh jaringan perpipaan PDAM,

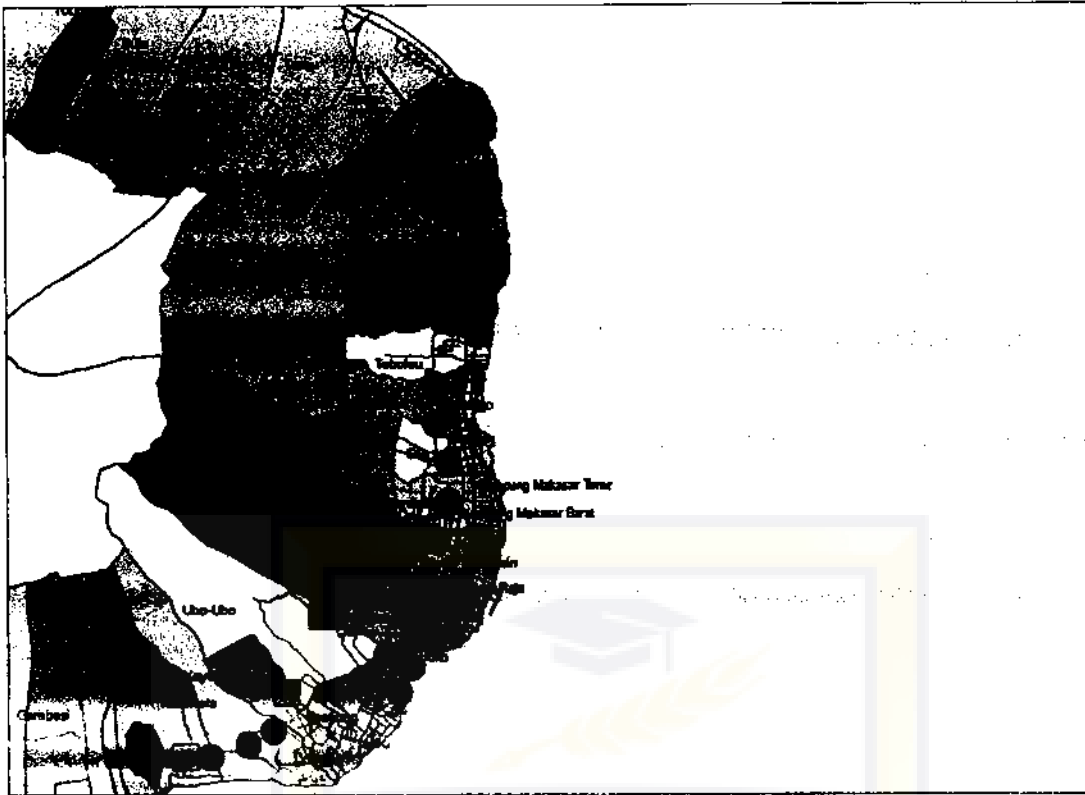
kebutuhan akan air bersih masih diperoleh melalui sumber air dalam tanah (sumur dangkal) dan air permukaan tanah. Sedangkan kebutuhan akan air bersih bagi sebagian penduduk Kecamatan Pulau Ternate yang berada di Pulau Ternate, Pulau Hiri, Moti dan Tifure serta Mayau masih memanfaatkan sumber air yang berasal dari dalam tanah (sumur dangkal) dan Penampung Air Hujan (PAH).

Di Kota Ternate terdapat 22 sumber air baku dan 22 unit instalasi pengolahan air bersih yang digunakan untuk memasok kebutuhan air minum bagi penduduk Kota Ternate.

Tabel 4.9. Pusat Pengolahan Air Bersih Reservoir

No.	Lokasi	Kapasitas (M3)	Mulai Operasi (Tahun)	Keterangan
1	Reservoir Ngade	150	1975	
2	Reservoir Falahara	100	1996	
3	Reservoir Ubo-Ubo	500	1999	
4	Reservoir Jan	100	2001	
5	Reservoir Skeep	1680	1982	
6	Reservoir Tabahawa	500	1993	
7	Reservoir Moya	100		
8	Reservoir Pacei	500	1993	

Sumber : PDAM Kab. Halmahera Barat



Gambar 4.11. Peta Lokasi Sumber Air Bersih Kota Ternate

3. Prasarana Sanitasi Lingkungan (Persampahan)

Jumlah sarana dan prasarana persampahan yang tersedia diwilayah Kota Ternate yang melayani 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Kota Ternate Selatan terdiri dari :

- Fasilitas pewadahan, seperti : 12 unit gerobak sampah, 9 buah bin Container dan bak/tong sampah yang tersebar di beberapa Kelurahan/Desa.
- Fasilitas pengangkut sebanyak 8 unit Dump Truck dengan kapasitas 6 M3 dan 3 unit Arm Roll.
- Alat berat yang digunakan pada lokasi TPA, terdiri dari : 2 unit Bulldozer, 1 unit Eskavator dan 1 unit Loder.

- Jumlah transfer depo sebanyak 3 unit, namun hanya 1 unit yang dipergunakan untuk proyek percontohan yang terletak di Kelurahan Kalumpang.

Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pulau Temate, sistem penanggulangan masalah persampahan pada umumnya masih bersifat tradisional yaitu dengan cara mengumpul di sekitar pekarangan rumah kemudian ditimbun dan di bakar. Akan tetapi ada sebagian masyarakat yang masih memanfaatkan pesisir pantai sebagai tempat pembuangan sampah.

4. Prasarana Listrik/Penerangan

Kebutuhan listrik sebagai sarana penerangan/kebutuhan bagi penduduk di wilayah Kota Ternate diperoleh melalui PT. PLN (Persero) Wilayah IX Cabang Ternate dengan menggunakan tenaga diesel (PLTD). Panjang jaringan yang ada untuk tegangan rendah (SUTR) 11,379 KMS dan tegangan menengah (SUTM) 7,107 KMS, dengan jumlah gardu sebanyak 133 dan kapasitas terpasang 28,125 VA. Sampai pada tahun 2018, wilayah pelayanan kelistrikan belum mencakup seluruh Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ternate Selatan dan kecamatan Ternate Selatan sedang Kecamatan Pulau Ternate hanya sebagian yang terlayani yaitu di Pulau Ternate sedangkan Hiri dan Batang Dua belum, demikian pula dengan Kecamatan Moti.

E. Kondisi Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

Penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan. Penduduk merupakan obyek dari pembangunan sekaligus sebagai subyek pembangunan itu sendiri. Sebagai obyek pembangunan, penduduk memiliki hak

untuk diperhatikan kesejahteraannya, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang perekonomiannya, maupun dari ketersediaan lapangan pekerjaan.

Penduduk menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan. Hasil pembangunan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan penduduk, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti kesehatan, pendidikan dan ketersediaan sarana bagi aktivitas baik sosial maupun ekonomi.

1. Populasi Penduduk

Sumber Data kependudukan diperoleh dari hasil Sensus dan Survei yang dilaksanakan BPS serta hasil Proyeksi Penduduk.

Penduduk di Kota Ternate pada tahun 2019 tercatat sebanyak 185.655 jiwa yang terdiri dari 95.544 jiwa laki-laki (50,92%) dan 91.111 jiwa perempuan (49,08%). Sedangkan populasi penduduk di wilayah Kawasan Minapolitan Ternate sebanyak 161.277 jiwa atau 86,87% dari total penduduk Kota Ternate. (Lihat Tabel 4.10.)

Tabel 4.10. Populasi Penduduk Kota Ternate Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pula Ternate	7,479	7,309	14,788	102
2	Pulau Moti	2,149	2,250	4,399	96
3	Pulau Batang Dua	1,252	1,211	2,463	103
4	Pulau Hiri	1,383	1,345	2,728	103
5	Ternate Selatan	32,433	31,274	63,707	104
6	Ternate Tengah	26,832	25,251	52,083	106
7	Ternate Utara	23,016	22,471	45,487	102
Kota Ternate		94,544	91,111	185,655	104

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka 2019 (Diolah)

2. Rasio Jenis Kelamin

Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin digunakan suatu indikator yang disebut Rasio Jenis Kelamin yang menggambarkan banyaknya penduduk laki-laki diantara 100 perempuan.

Sex ratio penduduk Kota Ternate sebesar 104 artinya setiap 104 jiwa laki-laki terdapat 100 jiwa perempuan. Sedangkan *sex ratio* penduduk di kawasan minapolitan Kota Ternate sama dengan Kota Ternate yaitu 104 jiwa. (Lihat Tabel 4.10. di atas)

Bila dilihat per kecamatan, Moti memiliki komposisi penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan dengan rasio sebesar 96. Sementara enam kecamatan lainnya yaitu Pulau Ternate, Pulau Batang Dua, Pulau Hiri, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Ternate Utara mempunyai karakteristik yang sama

yaitu lebih banyak penduduk lakilaki daripada perempuan dengan rasio jenis kelamin masing-masing di atas 100. Rasio jenis kelamin yang paling tinggi adalah Kecamatan Temate Tengah yaitu 106.

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat memberikan informasi sejauh mana sebaran penduduk di suatu wilayah. Hal ini penting mengingat diferensiasi jumlah penduduk antar wilayah dalam suatu daerah tidak mutlak menggambarkan kepadatan penduduknya. Suatu daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, belum tentu dirasakan padat bila wilayahnya juga luas.

Perkembangan Kota Ternate yang saat ini merupakan gerbang propinsi Maluku Utara dan sebagai pusat kegiatan ekonomi Propinsi Maluku Utara memberi dampak pada meningkatnya jumlah penduduk wilayah ini.

Kepadatan penduduk di Kota Ternate pada tahun 2019 tercatat rata-rata sebesar 740 jiwa per km². Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk yang paling padat adalah Kecamatan Temate Selatan yaitu 3.277 jiwa/km², dan kepadatan penduduk yang paling sedikit adalah Kecamatan Pulau Batang Dua yakni 24 jiwa/km². Sedangkan kawasan minapolitan Kota Ternate seluas 52,12 km², memiliki kepadatan penduduk sebesar 3.094 jiwa/km². Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah kawasan minapolitan Kota Ternate merupakan kawasan yang memiliki potensi tenaga kerja dan potensi ekonomi yang paling baik di Kota Ternate. Rincian lebih jelasnya, lihat Tabel 4.11. dan Tabel 4.12. di bawah ini.

Tabel 4.11. Kepadatan Penduduk Kota Ternate Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Populasi Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pula Ternate	65.88	14,788	224
2	Pulau	24.60	4,399	179
3	Pulau Batang Dua	101.56	2,463	24
4	Pulau Hiri	6.70	2,728	407
5	Ternate Selatan	19.44	63,707	3,277
6	Ternate Tengah	18.52	52,083	2,812
7	Ternate Utara	14.16	45,487	3,212
Kota Ternate		250.86	185,655	740

Sumber : Kota Ternate Dalam Angka 2019 (Diolah)



Tabel 4.12. Distribusi Penduduk di Kawasan Pesisir Kota Ternate Tahun 2019

8	Mangga Dua	3.962	2.46
9	Jati	4.348	2.70
10	Toboko	2.256	1.40
11	Tanah Tinggi	3.801	2.36
12	Tanah Tinggi Barat	2.267	1.41
13	Mangga Dua Utara	4.954	3.07
14	Jati Perumnas	3.067	1.90
15	Tabona	2.764	1.71
16	Bastiong Karance	5.212	3.23
17	Ngade	1.070	0.66
B	Ternate Tengah	52.082	32.29
1	Kampung Makassar Barat	4.064	2.52
2	Kampung Makassar Timur	5.573	3.48
3	Salahuddin	4.885	3.03
4	Kalumpang	3.659	2.27
5	Santiong	4.116	2.55
6	Gamalama	3.871	2.40
7	Moya	1.493	0.93
8	Marikurubu	5.092	3.16
9	Kampung Pisang	2.086	1.29
10	Takoma	2.251	1.40
11	Muhajirin	2.307	1.43
12	Maliaro	5.833	3.62
13	Kota Baru	3.848	2.39
14	Tanah Raja	1.151	0.71
15	Stadion	1.853	1.15
C	Ternate Utara	45.285	28.20
1	Soa	3.508	2.18
2	Soa Sio	1.773	1.10
3	Kasturian	2.940	1.82
4	Salero	2.829	1.75
5	Toboleu	3.808	2.42
6	Sangaji	5.904	3.66
7	Dufa Dufa	5.031	3.12
8	Tafure	4.928	3.08
9	Tabam	1.652	1.02
10	Sango	1.543	0.96
11	Tarau	1.079	0.67
12	Sangaji Utara	3.726	2.31
13	Akehuda	5.031	3.12
14	Tube	1.633	1.01
Kawasan Pesisir Kota Ternate		161.273	100.00

Di Kota Ternate terdapat sebanyak 38.242 rumah tangga, dengan jumlah penduduk 184.473 jiwa yang berarti kepadatan penduduk untuk setiap rumah tangga terdiri dari 4-5 jiwa. Sedangkan untuk masing-masing kecamatan besarnya bervariasi, antara 3-6 jiwa per rumah tangga.

4. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dimaksud disini adalah penduduk yang termasuk dalam kelompok yang angkatan kerja yang sedang bekerja penuh (full time) maupun paruh waktu (part time). Sehingga sangat memungkinkan penduduk usia sekolah (15-25 tahun) yang tidak bersekolah menjadi bagian dari tenaga kerja yang biasanya bekerja membantu orang tua mereka untuk bertani, berkebun, beternak, berdagang, menangkap ikan, dan sebagainya.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan pembangunan perekonomian dalam kaitannya dengan upaya Pemerintah mengatasi masalah kemiskinan adalah ketenagakerjaan.

Pada tahun 2019, di Kota Ternate terdapat 15.518 orang pencari kerja yang terdiri dari 8.422 orang laki-laki dan 7.096 orang perempuan, yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate. Dari jumlah tersebut, yang sudah diterima bekerja sebanyak 13.438 orang yang terdiri dari 7.772 orang laki-laki dan 6.576 orang perempuan. Dengan demikian, selama tahun 2019 sektor usaha Kota Ternate mampu menyerap 92,46% angkatan kerja yang belum bekerja.

F. Kondisi Perekonomian Wilayah

1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian, dalam selang waktu tertentu. Produksi

tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi diwilayah bersangkutan yang secara total dikenal dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator PDRB digunakan dalam melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah, dapat dilihat dengan menggunakan Harga Berlaku dan Harga Konstan yang didefinisikan sebagai berikut :

- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB): menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) : menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan terwujudnya pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu tujuan pembangunan ekonomi Kota Ternate mengupayakan agar terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Sehingga diharapkan dapat berimbas pada rendahnya angka pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tiga komponen tersebut dapat terlaksana

jika terjadi distribusi pendapatan yang berkualitas dan adanya prioritas belanja Pemerintah khususnya belanja sosial.

Pembangunan ekonomi Kota Ternate saat ini tidak hanya diukur dengan indikator makro ekonomi, namun juga dilihat dari indikator sosial, sebagai bagian dari ukuran peningkatan kualitas penduduk. Namun demikian beberapa indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang merupakan indikator turunan dari PDRB tetap menjadi rujukan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu wilayah.

Sebagaimana hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa sasaran bidang pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi riil yang dapat dilihat dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan setiap tahunnya semakin tinggi tingkat pertumbuhan, maka diharapkan akan meningkatnya produktifitas, sekaligus akan meningkatkan pendapatan masyarakat didaerah tersebut sehingga dengan demikian daya beli masyarakat mengalami peningkatan.

Prosentase Pertumbuhan ekonomi 2019 mencapai 7,94%, mengalami peningkatan dari ditahun sebelumnya (ditahun 2018 : 7,92%). Dari beberapa sektor ekonomi yang ada pada PDRB tahun 2019, terdapat beberapa sektor yang mengalami peningkatan dari nilai prosentase yang disumbangkan, seperti sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan, Perdagangan, Hotel & Restoran, Jasa-jasa, Industri Pengolahan dan sektor Pertanian yang menghasilkan pertumbuhan relatif meningkat.

Besarnya nilai PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya nilai PDRB menunjukkan jumlah agregat nilai dari berbagai sektor usaha pada periode tertentu. Semakin besar nilai PDRB suatu daerah berarti

semakin banyak pola nilai tambah berbagai sektor yang dapat dinikmati oleh masyarakat, dan sebaliknya semakin kecil nilai PDRB, maka semakin sedikit hasil-hasil pembangunan yang bisa dinikmati oleh masyarakat di daerah tersebut.

Untuk melihat gambaran secara makro ekonomi Kota Ternate pada tahun 2019 telah dihitung PDRB sebagai salah satu indikator perencanaan. PDRB Kota Ternate pada tahun 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 883.848 juta dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp. 557.573 juta.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate lebih didominasi oleh beberapa sektor tertentu yang mengalami pertumbuhan secara pesat, yaitu seperti : sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (11,42), Jasa-jasa (6,40), Perdagangan, Hotel & Restoran (7,02), Industri Pengolahan (2,46) dan sektor Pertanian (5,54).

Dengan demikian dari Kontribusi 9 sektor dalam pertumbuhan Ekonomi Kota Ternate tahun 2019, memberikan capaian angka pertumbuhan yang meningkat 7,94%, atau lebih besar dari tahun sebelumnya (Thn 2018 : 7,92%).

Sebagai bagian terpenting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, maka dengan demikian Investasi mempunyai keterkaitan dengan kelangsungan kegiatan ekonomi. Investasi juga memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan sektor ekonomi, jasa dan perdagangan. Realisasi kebijakan program pada bidang infrastruktur, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat yang tertuang dalam APBD Kota Ternate memiliki kontribusi langsung terhadap perkembangan Investasi Pemerintah yang telah memberikan dampak terhadap Pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya Indikasi kenaikan investasi lainnya (sektor Swasta), dapat dilihat pada perkembangan sektor Perbankan yang ditandai dengan beroperasinya beberapa Bank Swasta serta berdirinya Swalayan dan pusat Perdagangan yang tersebar wilayah Kota Ternate. Hal ini dapat dilihat dari semakin kondusifnya iklim investasi pada sektor jasa dan perdagangan dengan adanya pembangunan kawasan Sentral perdagangan dan pembangunan Hotel yang semakin meningkat di Kota Ternate.

Terjadinya peningkatan investasi, baik oleh pemerintah maupun swasta selama tahun 2009, telah memberi andil bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate terutama pada sektor yang dalam beberapa tahun terakhir ini tetap memberikan kontribusi terbesar bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ternate yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran. Kondisi ini tidak terlepas dari stabilnya perekonomian nasional yang memberi dampak pada makin stabilnya kondisi perekonomian Kota Ternate.

3. Struktur Ekonomi

Beberapa sektor dominan yang memiliki kontribusi pada struktur perekonomian atau dalam pembentukan perekonomian Kota Ternate 2019, yang mengalami peningkatan prosentase secara kuantitatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sektor Perdagangan, Hotel & Restoran (dari 28,69 menjadi 29,48), sektor Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan (dari 8,02 menjadi 8,33), dan sektor sektor Pengangkutan dan Komunikasi (dari 16,48 menjadi 16,82).

4. Indikator Ekonomi Makro

Kinerja perekonomian Kota Ternate, pada tahun 2019 terjadi stagnasi perekonomian, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, laju inflasi dan tingkat pengangguran terbuka relatif tinggi, sebagai dampak dari konflik saat itu, sehingga aktivitas semua sektor ekonomi tidak berjalan dan juga pengaruh kondisi perekonomian Nasional yang masih berada pada posisi pemulihan setelah dilanda krisis moneter pada tahun 1997.

Selanjutnya di beberapa tahun terakhir (periode 2011-2019) pertumbuhan ekonomi Kota Ternate menunjukkan trend perkembangan positif, disebabkan adanya pertumbuhan pada semua sektor ekonomi sehingga berdampak pada meningkatnya investasi dan iklim usaha terutama pada sektor perdagangan, jasa-jasa, keuangan serta pengangkutan dan komunikasi sebagai penyumbang terbesar bagi pertumbuhan PDRB Kota Ternate.

Dari gambaran kondisi ekonomi Kota Ternate selama tahun 2019, dengan asumsi adanya peningkatan investasi pada berbagai sektor, yang didukung dengan kemudahan akses lembaga perbankan dan kemudahan birokrasi, maka dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dapat terus meningkat.

Melalui tabel di bawah (Tabel 4.13.) nampak bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi peningkatan setiap tahun, dimana peningkatan terbesar terjadi pada periode tahun 2008-2013 dan tahun 2014-2019. Inflasi terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 19,42% yang sudah pasti keadaan ini melambungkan harga-harga barang dan jasa, serta menimbulkan biaya tinggi bagi seluruh sektor usaha. Sedangkan indikator tingkat pengangguran terbuka semakin membaik dimana terjadi penurunan tingkat pengangguran selama lima tahun terakhir yaitu pada periode tahun 2015-2019.

Tabel 4.13. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Kota Ternate Tahun 2010-2019

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi (%)	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
1	2010	-0.93	14.51	-25.09	32.14
2	2011	2.83	13.71	6.08	27.26
3	2012	3.18	6.40	23.23	27.26
4	2013	4.94	6.27	1.50	30.65
5	2014	4.79	4.82	7.93	22.55
6	2015	6.60	19.42	4.67	26.67
7	2016	6.99	5.12	3.54	18.86
8	2017	7.85	10.43	2.98	13.05
9	2018	7.92	11.25	1.95	12.57
10	2019	7.94	3.88	-15.67	11.31
Rata-Rata %)		5.211	9.58	2.93	22.23

Sumber: Monografi Kota Ternate Tahun 2020(Dialah)

Dengan Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin kondusif diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi terwujudnya stabilitas perekonomian daerah. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan mikro ekonomi dan perkembangan Investasi di Kota Ternate yang ditandai dengan adanya penanaman investasi diberbagai sektor ekonomi, (recovery ekonomi) baik perbankan maupun swasta lainnya.

G. Kondisi Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor yang penting untuk dicermati, karena seringkali dijadikan barometer dalam melihat tingkat kemajuan suatu daerah. Sementara itu maju mundurnya pendidikan tidak terlepas dari ketersediaan berbagai lembaga pendidikan beserta sarana dan prasarana seperti gedung sekolah pada berbagai tingkatan dengan berbagai fasilitas pendukung hingga tenaga pengajar.

Pembangunan di bidang pendidikan terus diupayakan Pemerintah Kota Ternate melalui program dan kebijakan seperti penyediaan dan pengembangan sarana/prasarana di bidang pendidikan berupa rehabilitasi maupun penambahan gedung sekolah baru serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan, disamping itu juga mengikutsertakan dan membantu pihak swasta dalam mengelola pendidikan di daerah ini. Selain itu dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sangat membantu anak usia sekolah yang tidak mampu untuk dapat bersekolah.

Sarana pendidikan di Kota Ternate sangat memadai dengan tersedianya sekolah mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai ke pertengahan pengajaran tinggi demikian juga tenaga pengajarnya. Sampai dengan tahun 2019 jumlah SD baik Negeri/Inpres maupun swasta sebanyak 102 buah dengan jumlah tenaga pengajar 1.402 orang, sementara peserta didiknya 19.389 orang. Selain itu pada tahun 2009 juga terdapat 29 buah SLTP negeri dan swasta dengan jumlah tenaga pengajar 764 orang, serta peserta didik sebanyak 8.611 orang, Untuk jenjang pendidikan SLTA jumlah SMU negeri dan swasta sebanyak 17 buah dengan jumlah tenaga pengajar 560 orang serta peserta didik sejumlah 6.337 orang. Sedangkan jumlah sekolah SMK Negeri ditambah Swasta sebanyak 7 buah, jumlah tenaga pengajarnya sebanyak 261 orang dan jumlah peserta didiknya sebanyak 2.298 orang.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, di Kota Ternate juga tersedia sarana pendidikan untuk jenjang pendidikan tinggi. Sampai dengan tahun 2019, terdapat 6 (enam) perguruan tinggi yaitu Universitas Khairun, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, AIKOM Ternate, STIKIP dan

Politeknik Depkes Ternate dengan berbagai disiplin ilmu atau fakultas yang tersedia.

Seluruh fasilitas pendidikan tersebut mulai dari pra sekolah sampai perguruan tinggi dikelola oleh pemerintah maupun lembaga swasta yang berdomisili di Kota Ternate.

2. Kesehatan

Salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu wilayah adalah kesehatan yang prima bagi masyarakat dan sumberdaya manusia (SDM). Dengan manusia yang sehat akan didapatkan produktivitas yang tinggi dari SDM dalam mengoperasikan seluruh unit-unit produksi di wilayah pembangunan tersebut. Sehingga seluruh sumberdaya alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari peningkatan pendapatan masyarakat.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan guna menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk itulah peran serta pemerintah sangat diperlukan dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Peran Pemerintah dalam pembangunan kesehatan menyangkut berbagai aspek seperti penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat baik menyangkut biaya maupun tempatnya. Selain itu, pemberdayaan kepada masyarakat untuk lebih memahami pola hidup sehat dan upaya menjaga kesehatan secara baik terus digalakan oleh Pemerintah daerah ini melalui Dinas Kesehatan setempat. Penyediaan fasilitas kesehatan umum seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu,

termasuk tenaga kesehatan baik dari segi jumlah maupun kualitas serta pusat pelayanan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, diantaranya dengan membangun berbagai fasilitas kesehatan yang menyebar di setiap kecamatan. Sampai dengan tahun 2009 terdapat sejumlah fasilitas kesehatan antara lain, 8 buah Rumah Sakit, 8 buah Puskesmas, 14 buah Puskesmas Pembantu, 1 buah Rumah Bersalin, 168 buah Pos Yandu dan 11 buah puskesmas keliling.

3. Agama

Pembangunan sebagaimana dimaklumi tidak saja berupa pembangunan fisik melainkan juga pembangunan mental spiritual. Tujuannya adalah agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam turut aktif mengisi pembangunan dengan tanpa terjadi perselisihan dan pergesekan antar pemeluk agama.

Penduduk Kota Ternate hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Dalam menjalankan agamanya, penduduk Kota Ternate telah membangun fasilitas ibadah sebanyak 277 unit. Fasilitas ibadah tersebut terdiri dari 144 unit Masjid, 114 unit Musholla, 16 unit gereja Protestan, 1 unit gereja Katolik, 1 unit Pura, dan 1 unit Klenteng. Untuk lebih jelasnya mengenai fasilitas peribadatan di Kota Ternate dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14. Fasilitas Peribadatan di Kota Ternate Tahun 2019

No	Kecamatan	Fasilitas Peribadatan (Unit)						Total (Unit)
		Masjid	Mushallah	Gereja		Pura	Klenteng	
				Protestan	Katolik			
1	Ternate Utara	39	27	2	0	0	0	68
2	Ternate Tengah	40	28	5	1	0	1	75
3	Ternate Selatan	38	37	0	0	1	0	76
4	Pulau Ternate	13	22	1	0	0	0	36
5	Pulau Hiri	5	0	0	0	0	0	5
6	Pulau Moti	9	0	0	0	0	0	9
7	Pulau Batang Dua	0	0	8	0	0	0	8
Kota Ternate		144	114	16	1	1	1	277

Sumber : Bagian Pemberdayaan Perempuan & Kesejahteraan Sosial Kota Ternate

Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Ternate Tengah memiliki fasilitas peribadatan yang paling banyak jumlahnya. Penduduk Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Pulau Moti hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Sedangkan penduduk Kecamatan Pulau Batang Dua hampir seluruhnya merupakan pemeluk agama Katolik. Adapun penduduk yang beragama Hindu, beribadah di Piarah yang hanya terdapat di Kecamatan Ternate Selatan. Sedangkan pemeluk agama Konghucu beribadah di Klemteng yang terdapat di Kecamatan Ternate Tengah saja.

H. Kondisi Kelembagaan

Dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan daerah lebih terarah diberbagai bidang serta sebagai upaya mengakomodasikan tuntutan perubahan dan perkembangan dinamika masyarakat, maka dilakukan penekanan Program Prioritas pada masing-masing bidang sesuai urgensi kebutuhan yang secara bertahap dalam lima tahun ini telah digariskan dan dituangkan dalam APBD yang merupakan penunjang operasional kegiatan pembangunan dan sebagai wujud Kebijakan Pemerintah Kota Ternate meliputi; Penataan dan

peningkatan pelayanan publik, Pemberdayaan Masyarakat, Penataan dan Peningkatan Infrastruktur, Penataan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penataan Kelembagaan.

Sejalan dengan perubahan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan dari beberapa peraturan Pemerintah dalam rangka penataan Kelembagaan/Birokrasi seperti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yg kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, serta revisi Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terkait dgn hal tersebut maka dalam rangka standarisasi dan tertib penataan kelembagaan Perangkat Daerah, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kota Temate telah melakukan penyesuaian struktur Organisasi berdasarkan isyarat serta klasifikasi (PP. 41) tentang Jumlah dan besaran Perangkat Daerah sesuai kewenangan, karakteristik daerah, Potensi daerah dan kondisi keuangan daerah. Dengan demikian struktur organisasi dilingkup Pemerintah Kota Temate saat ini (Tahun 2019) meliputi Sekretariat Daerah (8 Bagian), Sekretariat Dewan (3 Bagian), 13 Lembaga Teknis (8 Badan & 5 Kantor), 16 Dinas, 7 Kecamatan, dan 77 Kelurahan.

Pembentukan struktur organisasi dilingkup Sekretariat Daerah diawali dengan Peraturan Daerah No. 28 tahun 2000, terdiri dari dua Assisten dan 10 Bagian, yang kemudian mengalami perubahan/direvisi melalui Peraturan Daerah No. 14 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekertaris

Daerah Kota Ternate dan terdiri dari 3 (tiga) Assisten dan 9 Bagian. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembentukan struktur organisasi dari beberapa instansi/Badan, Dinas, Kantor dilingkup pemerintah Kota Ternate, diawali melalui penetapan beberapa Peraturan Daerah seperti:

- Perda No. 30 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate.
- Peraturan Daerah No. 31 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Tekhnis Daerah Kota Ternate.
- Perda No. 16 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dari SKPD, serta revisi beberapa Perda dalam rangka penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan Penyesuaian struktur.

Kebijakan Penataan organisasi perangkat daerah melalui perampingan struktur memiliki makna strategis, selain penyesuaian kemampuan daerah berdasarkan kriteria/ klasifikasi, juga dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Secara esensial Penggabungan dan penyesuaian beberapa perangkat daerah (Struktur organisasi) juga dimaksudkan untuk memenuhi ciri organisasi *"Ramping Struktur - Kaya Fungsi"*.

I. Potensi Bencana Alam

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidro-meteorologis, wilayah pesisir Pulau Ternate merupakan wilayah yang berpotensi mengalami bencana seperti gempa bumi, tsunami, gelombang pasang ekstrim, dan angin kencang. Selain itu, wilayah pesisir juga tidak terlepas dari dampak-dampak yang

ditimbulkan oleh perubahan iklim global seperti kenaikan paras muka air laut (*sea level rise/SLR*).

1. Gempa dan Tsunami

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak Bumi (lempeng Bumi). Bumi kita walaupun padat, selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Ada dua jenis gempa yaitu gempa bumi tektonik dan gempa gunung berapi. Gempa bumi tektonik disebabkan oleh perlepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempengan plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Gempa bumi gunung berapi terjadi berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk keretakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batuan menghasilkan gempa bumi. Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itu lah gempa bumi akan terjadi.

Berdasarkan karakteristik kegempaan dan tektonik serta ditunjang dengan karakteristik data geofisika yang ada, maka Pulau Ternate dan sekitarnya dapat dibagi atas dua zona generator pembangkit gempa, yaitu zona benturan lempeng (subduksi) (Indo-Australia di selatan dan patahan aktif di utara).

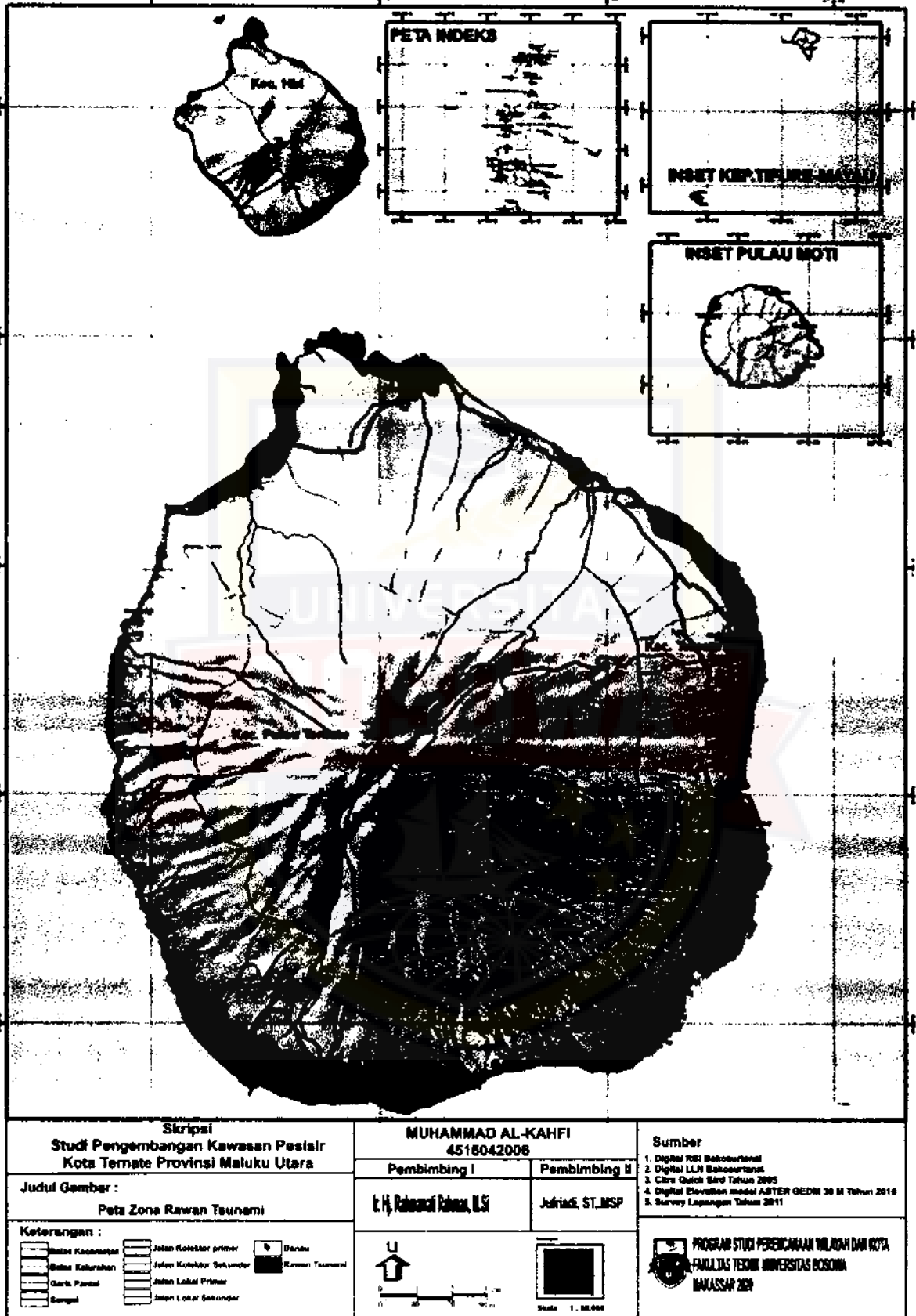
Berdasarkan hubungan antara aktivitas kegempaan, tsunami, dan karakteristik seismotektonik, Latief, et al. (2000) dalam Diposaptono dan Budiman (2008) membagi Indonesia ke dalam enam zona seismotektonik seperti terlihat pada Gambar 3.12. Pulau Ternate termasuk Zona E. Wilayah lainnya pada zona ini yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

Pengaruh tektonik utama untuk Pulau Ternate, didominasi oleh adanya tumbukan lempeng Samudera Pasifik. Tumbukan ini menyebabkan timbulnya pusat-pusat gempa di zona subduksi Sulawesi Tengah yang dimulai dari Laut Teluk Tomini dan Laut Maluku di bagian barat dan berakhir di Pulau Halmahera di bagian timur dan Sangihe di bagian utara, serta gempa pada patahan busur belakang (*back arc thrust*).

Pada Zona E ini telah terjadi tsunami sebanyak 32 kali sejak tahun 1600. Kontribusi kejadian tsunami yang telah terjadi di zona ini terhadap keseluruhan tsunami yang pernah terjadi di Indonesia adalah lebih kurang 29% (Diposaptono dan Budiman, 2008). (Lihat Gambar 4.13.)



Gambar 4.12. Pembagian Zona Seismotektonik di Indonesia (Latief et al., 2000 dalam Diposaptono dan Budiman, 2008)



Gambar 4.13. Peta Zona Rawan Tsunami di Pulau Ternate

2. Gunung Berapi

Gunung Gamalama di Pulau Ternate merupakan salah satu gunung berapi yang aktif yang terdapat di Indonesia. Gunung Gamalama berpotensi meletus, dan dapat menimbulkan bencana alam berupa gempa vulkanik. Aliran lahar, lava, dan awan panas mengalir ke arah utara Pulau Ternate. Sedangkan aliran awan panas, lahar, lava, dan lintara batu panas mengalir ke arah utara dan barat Pulau Ternate.

(Lihat Gambar 4.14.)



Gambar 4.14. Peta Zona Rawan Bencana Gunung Api di Pulau Ternate



J. Peluang Investasi Sektor Kelautan Dan Perikanan

Adapun peluang/potensi usaha yang prospektif untuk pengembangan investasi di sektor Perikanan dan Kelautan Kota Ternate adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha penampungan/pengolahan ikan Tuna, Cakalang dan Layang
- 2) Usaha ikan segar seperti Tuna Loin, Fillet ikan dasar
- 3) Usaha penampungan Lobster dan Nener
- 4) Usaha penampungan/*Collecting* Rajungan dan Kepiting Bakau
- 5) Usaha unit penanganan mutu hasil perikanan seperti : Coll Storage, Air Blast Freezer (ABF) dan Pabrik Es
- 6) Usaha unit perbengkelan seperti Docking atau galangan kapal
- 7) Usaha unit perdagangan sarana produksi perikanan tangkap dan keperluan logistik penangkapan.

K. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

1. Sejarah Berdirinya Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate diarahkan untuk menjadi sentra kegiatan perikanan di Kawasan Minapolitan Kota Ternate. PPN Ternate dibangun pada tahun 1978 dengan berbagai sarana dasar, sarana fungsional, dan sarana penunjang. PPN Ternate pada awal berdirinya merupakan Pelabuhan Perikanan Pantai/PPP (tipe C). Pada medio tahun 2001 ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Nusantara/PPN (tipe B).

Perubahan status tersebut didasarkan pada perkembangan operasional PPN Ternate yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dari

sarana prasarana, pencapaian target operasional maupun jumlah pegawai. Sampai saat ini jumlah pegawai di PPN Ternate telah mencapai 54 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), calon PNS, dan tenaga harian lepas.

PPN Ternate adalah salah satu pelabuhan perikanan di Indonesia yang lokasinya cukup strategis berada di dalam Kota Ternate yaitu di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate Selatan. Secara geografis terletak pada posisi $00^{\circ}46'0,36''$ LU dan $127^{\circ}22'41,10''$ BT. Sedangkan akses menuju sarana penunjang seperti bandar udara (bandara) dan pelabuhan laut dapat dijangkau dengan sangat mudah.

2. Kondisi Umum

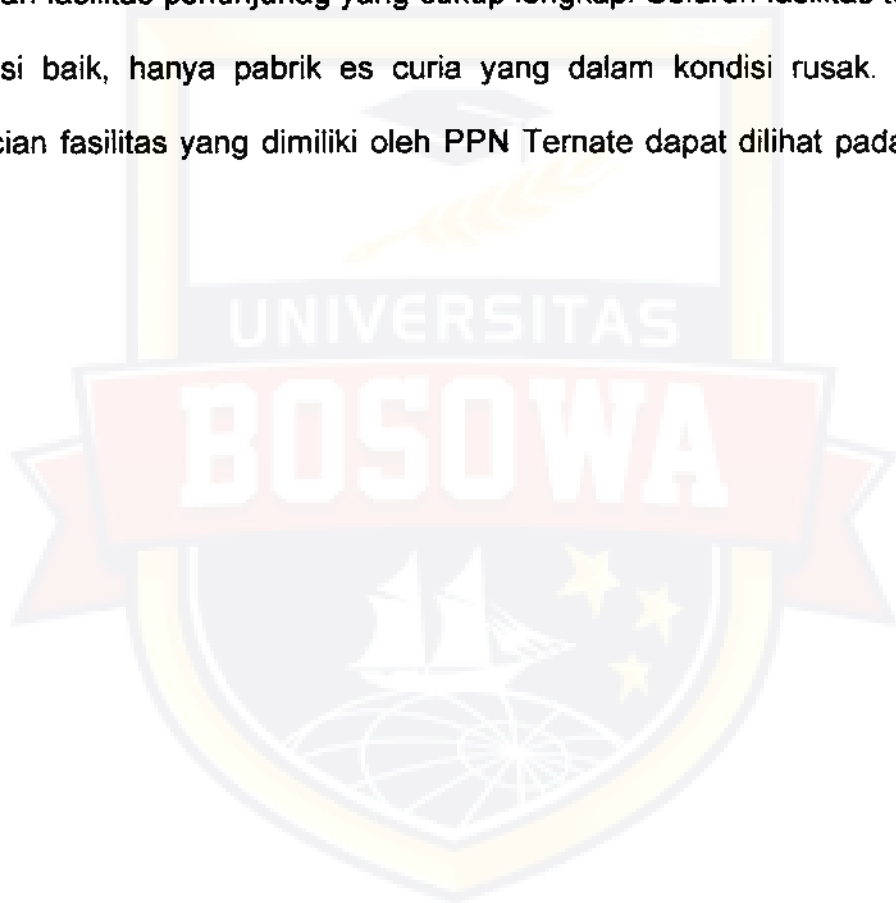
PPN Ternate akan berperan sangat penting dalam penerapan dan pengembangan program minapolitan karena merupakan sentra kegiatan perikanan tangkap di wilayah Kota Ternate. Hampir semua kapal motor (KM) milik nelayan dan pengusaha dari Kota Ternate melakukan bongkar hasil perikanan di PPN Ternate dan memuat kebutuhan operasionalnya di pelabuhan yang sama.

Wilayah operasional PPN Ternate melingkupi wilayah perairan mulai dari Barat Daya, Selatan, dan Tenggara Pulau Ternate hingga wilayah perairan bagian Utara dan Timur Pulau Tidore. Sedangkan wilayah kerja (wilker) PPN Ternate berada di perairan bagian Timur PPN Ternate.

Lokasi PPN Ternate sangat strategis merupakan salah satu pelabuhan lingkla luar (*outer ring fishing port*) dan berbatasan dengan Samudera Pasifik yang memiliki potensi ikan pelagis besar.

Seiring dengan perkembangan kegiatan dibidang perikanan, maka ketersediaan lahan industri juga semakin berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, PPN Ternate telah melakukan pembebasan lahan seluas 10,0 hektar untuk pengembangan lahan industri dan peningkatan pelayanan kepada para pengguna fasilitas dan jasa PPN Ternate.

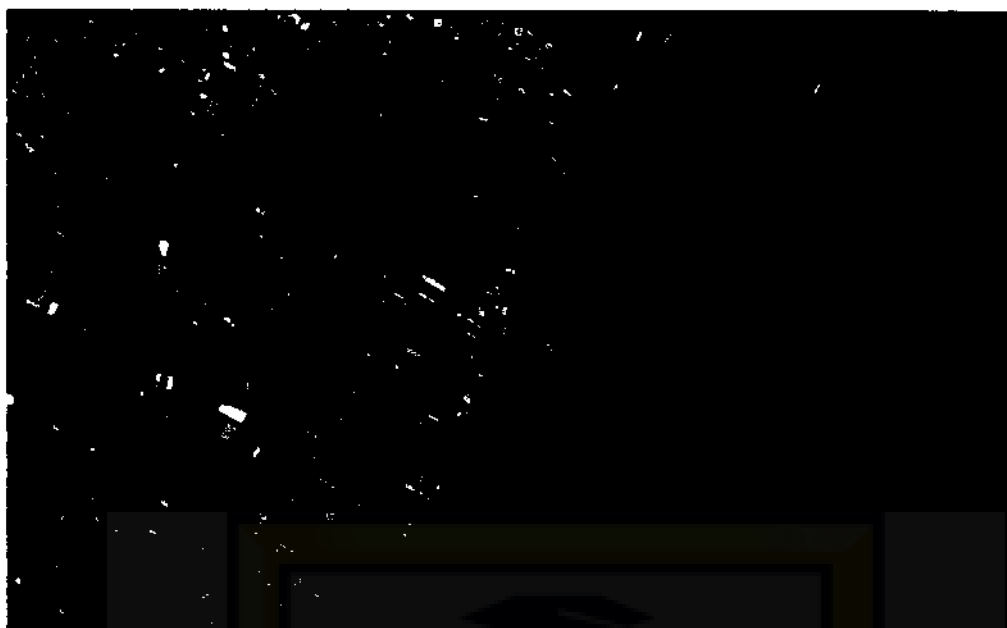
Hingga tahun 2019, PPN Ternate telah memiliki fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang yang cukup lengkap. Seluruh fasilitas tersebut dalam kondisi baik, hanya pabrik es curia yang dalam kondisi rusak. Secara lengkap, rincian fasilitas yang dimiliki oleh PPN Ternate dapat dilihat pada Tabel 4.15



Tabel 4.15. Fasilitas Terbangun dan Terpasang di PPN Ternate Tahun 2019

No.	Jenis	Satuan	Volume	Kondisi
A	Fasilitas Pokok			
1	Lahan I	hektar	4	Baik
2	Lahan II	hektar	6	Baik
3	Dermaga I	m ²	560	Baik
4	Dermaga II	m ²	846	Baik
5	Dermaga Bongkar Ikan	m ²	100	Baik
6	Jetty I	m ²	384	Baik
7	Jetty II	m ²	294	Baik
8	Turap	m ²	197	Baik
9	Jalan Kompleks	m ²	5140	Baik
B	Fasilitas Fungsional			
1	Tempat Penjualan Ikan	m ²	500	Baik
2	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	m ²	400	Baik
3	Kantor Administrasi	m ²	415	Baik
4	MCK	m ²	54	Baik
5	Gardu Listik	KVA	300	Baik
6	Gardu Genset (2 unit)	KVA	200 & 150	Baik
7	Tangki BBM	Ton	50	Baik
8	Tangki Ari Tawar (2 unit)	Ton	50 & 100	Baik
9	Balai Pertemuan Nelayan	m ²	100	Baik
10	Bengkel	m ²	200	Baik
11	Pabrik Es Balok	Ton	10	Baik
12	Pabrik Es Curai	Ton	20	Rusak
13	Air Blast Freezer (3 unit)	Ton	3, 3, & 4	Baik
14	Cold Storage (2 unit)	Ton	20 & 60	Baik
15	Mini Plant	m ²	378	Baik
16	Sumur Bor	liter/detik	4	Baik
17	Tempat Penjemuran Jaring	m ²	500	Baik
18	Pagar Keliling	m ²	500	Baik
19	Gudang Peralatan	m ²	120	Baik
20	Pos Jaga	m ²	45	Baik
21	Area Parkir	m ²	544	Baik
C	Fasilitas Penunjang			
1	Rumah Dinas Kepala PPN	unit	1	Baik
2	Mess Operator	unit	8	Baik
3	Musholla	m ²	100	Baik
4	Kantor Pegadaian	m ²	42	Baik
5	Mobil Pendingin	m ²	1	Baik
6	Kendaraan Roda 4	unit	3	Baik
7	Kendaraan Roda 2	unit	5	Baik
8	Lapangan Tenis	m ²	500	Baik

Sumber: PPN Ternate, 2019



Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate

3. Investasi Usaha Perikanan di PPN Ternate

PPN Ternate akan dijadikan sebagai sentra kawasan minapolitan Kota Ternate dikarenakan besarnya potensi SDI, Ternate sebagai pusat perdagangan (antar pulau dan regional), infrastruktur yang sangat menunjang (bandara & pelabuhan), konsentrasi penduduk cukup tinggi (kepadatan penduduk & pasar lokal), serta padatnya kegiatan/aktivitas nelayan dan bongkar muat hasil perikanan. Selain itu, PPN Ternate memperoleh dukungan dari lintas sektor/SKPD seperti Dinas PU (Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate) dan Pemerintah Kota Ternate.

Adapun jenis-jenis ikan utama yang didaratkan dan diperjualbelikan di PPN Ternate terdiri dari ikan pelagis (tuna, cakalang, layang, dll) dan ikan demersal (kerapu, kakap, dll). Ikan-ikan segar tersebut sebagian diolah menjadi *tuna loin*, *saku*, *stick*, *katsuwo bushi*, *fozen*, *fillet*, *fish nugget*, *fish stick*, ikan asin, ikan asap, bakso ikan, abon ikan, dan bentuk-bentuk ikan olah lainnya.

Pihak swasta (investor) yang memanfaatkan PPN Ternate untuk menanam dan mengembangkan investasinya pada usaha perikanan dan usaha-usah penunjang bagi usaha perikanan sebanyak 12 perusahaan/pengusaha yang telah beroperasi sejak tahun 1997. Investasi pihak-pihak swasta tersebut berkisar antara Rp. 20 juta hingga Rp. 1,5 miliar. Jenis-jenis usahanya terdiri dari pembelian ikan & lobster, industri pengolahan hasil perikanan (tepung ikan, ikan asap, dll), industri galangan kapal, dan pabrik es balok. (Lihat Tabel 4.16)

Tabel 4.16. Investasi Pihak Swasta di PPN Ternate Tahun 2019

3	PT Dwi Poly Perkasa	Pembelian ikan	1,500,000	2011
4	CV Fiber Glass Perkasa	Pembuatan kapal	1,500,000	2012
5	UD Hermanto	Pembelian ikan	200,000	2013
6	UD Irwan	Pembelian ikan	900,000	2014
7	PT Charli Era Pranata	Pembelian ikan	500,000	2015
8	UD Agus Salim Mustafa	Pembelian ikan	250,000	2016
9	CV Santo Alvin Pratama	Tepung ikan	900,000	2017
10	Yusuf Hi. Muchtar	Pembelian ikan	20,000	2018
11	Noky Pangkayouw	Pembelian ikan	20,000	2019
12	Helman Laode	Pengasapan ikan	497,000	2020
Total Investasi			7,537,000	

Sumber: PPN Ternate, 2019

Sepanjang tahun 2019, rata-rata jumlah transaksi yang dihasilkan dari 31 jenis kegiatan usaha di PPN Ternate mencapai Rp. 394.500.587,- per hari atau 11.835.017.608,- per bulan. Peredaran uang yang sangat besar tersebut merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh PPN Ternate yang sudah barang tentu merupakan tempat yang sangat potensial bagi penduduk Kota Ternate untuk membuka lapangan kerja dan tempat usaha.

Kegiatan perikanan di PPN Ternate sejak tahun 2018 terus mengalami peningkatan dari segi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, kunjungan kapal dan produksinya (volume dan nilai).

1. Produksi Perikanan

Sepanjang tahun 2019, volume produksi perikanan di PPN Ternate mencapai 5.147 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 47.215.738.000,- sehingga harga rata-rata ikan adalah Rp. 9.884,37/kg. Perkembangan produksi dan harga rata-rata ikan di PPN Ternate sejak tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Peningkatan volume produksi perikanan di PPN Ternate yang paling besar terjadi pada tahun 2016 yaitu meningkat sebanyak 32,80%. Sedangkan peningkatan terbesar pada nilai volume produksi terjadi pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 yaitu sebesar 53,89%. Sedangkan harga tertinggi rata-rata untuk ikan tuna dan layang terjadi di tahun 2019 yaitu pada harga Rp. 9.883.84/kg. Seluruh ikan tuna dan layang dari PPN Ternate dipasarkan di Kota Ternate serta ke Kota Bitung dan Kota Surabaya dalam bentuk segar (*fresh fish*) dan beku (*frozen fish*).

Tabel 4.17. Perkembangan Produksi Perikanan di PPN Ternate

1	Tahun 2013	3,475	15,585,227	4,484.96	Tuna, Layang
2	Tahun 2014	3,831	14,025,977	3,661.18	Tuna, Layang
3	Tahun 2015	3,969	18,539,015	4,670.95	Tuna, Layang
4	Tahun 2016	5,414	30,529,103	5,638.92	Tuna, Layang
5	Tahun 2017	4,484	28,925,127	6,450.74	Tuna, Layang
6	Tahun 2018	4,624	42,993,584	9,297.92	Tuna, Layang
7	Tahun 2019	5,073	50,140,732	9,883.84	Tuna, Layang
8	Tahun 2020	5,147	47,215,738	9,173.45	Tuna, Layang
Total		36,017	247,954,503	6,884.37	

Sumber: PPN Ternate, 2020 (Diolah)

2. Kapal Perikanan

Volume perikanan di PPN Ternate tahun 2019 dihasilkan oleh 157 unit kapal perikanan dengan frekuensi kunjungan kapal mencapai 5.113 kali keluar dan masuk PPN Ternate. Dibanding tahun 2019, terjadi peningkatan kunjungan kapal perikanan ke PPN Ternate sebanyak 17,19%. Sedangkan peningkatan kunjungan kapal perikanan ke PPN Ternate terbesar terjadi pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yaitu meningkat sebanyak 49,56%.. Adapun penurunan kunjungan kapal perikanan ke PPN Ternate terbesar terjadi pada tahun 2019 dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 20,00%. Rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18. Perkembangan Frekuensi Kapal Masuk ke PPN Ternate

No.	Tahun	Jumlah Kapal Masuk (Unit)	Trend Kapal Masuk
1	Tahun 2012	3,754	
2	Tahun 2013	3,831	2.05%
3	Tahun 2014	3,969	3.60%
4	Tahun 2015	5,936	49.56%
5	Tahun 2016	4,841	-18.45%
6	Tahun 2017	5,454	12.66%
7	Tahun 2018	4,363	-20.00%
8	Tahun 2019	5,113	17.19%

Sumber: PPN Ternate, 2020 (Diolah)

3. Alat Penangkapan Ikan

Sepanjang tahun 2019, nelayan yang berlabuh di PPN Ternate paling banyak menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan (API) jenis pancing ulur (*hand line*) yaitu sebanyak 56 unit. Kemudian disusul oleh API jenis huhate (*pole and line*) 52 unit dan jaring lingkaran (*purse seine*), yang digunakan untuk menangkap ikan cakalang. Sejak tahun 2012 hingga 2019, API yang paling banyak dioperasikan oleh nelayan yang berlabuh di PPN Ternate adalah alat tangkap huhate yang berkisar antara 30,08% sampai 50,98%.

Untuk lebih jelasnya, perkembangan setiap jenis API dari tahun 2012 hingga tahun 2019 di PPN Ternate dapat disimak melalui Tabel 4.19.

Tabel 4.19. Perkembangan Alat Penangkapan Ikan di PPN Ternate

No.	Jenis API	Jumlah API (Unit)							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Purse Seine	13	13	13	28	28	11	12	44
2	Gill Net	6	7	7	25	19	21	21	6
3	Hand Line	11	11	11	28	23	33	33	56
4	Bagan	9	12	12	7	7	3	3	0
5	Pole and Line	38	40	40	40	74	78	76	52
6	Muroami	2	2	2	3	5	5	6	3
7	Giop	0	2	2	2	2	2	2	3
8	Long Line	0	0	0	0	0		0	0
Total		79	87	87	133	168	163	163	164

Sumber: PPN Ternate, 2019

4. Nelayan

Nelayan yang beroperasi di sekitar PPN Ternate, jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun 2013 hingga tahun 2020, kecuali tahun 2014 terjadi penurunan jumlah nelayan dibanding tahun 2013. Pada tahun 2013, jumlah nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate sebanyak 830 orang. Sedangkan di tahun 2020, jumlah nelayan di PPN Ternate sudah mencapai 2.435 orang, atau meningkat 193,37%. Peningkatan jumlah nelayan terbesar terjadi di tahun 2015 yang meningkat sebanyak 66,24% dibanding tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2020, jumlah nelayan bertambah 135 atau meningkat 5,87% dibanding tahun 2019. Antara tahun 2015 dengan tahun 2016, nelayan di PPN Ternate jumlah tetap atau tidak mengalami perubahan jumlah. (Lihat Tabel 4.20)

Tabel 4.20. Perkembangan Nelayan di PPN Ternate

No.	Tahun	Jumlah Nelayan (Orang)	Trend Jumlah Nelayan
1	Tahun 2013	830	
2	Tahun 2014	702	-15.42%
3	Tahun 2015	1,167	66.24%
4	Tahun 2016	1,167	0.00%
5	Tahun 2017	1,731	48.33%
6	Tahun 2018	2,268	31.02%
7	Tahun 2019	2,300	1.41%
8	Tahun 2020	2,435	5.87%

Sumber: PPN Ternate, 2020 (Diolah)

5. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PPN Ternate merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bentuk pendapatan Negara bukan pajak (PNBP). Kinerja PPN ternate untuk mengutip PNBP sangat baik karena cenderung meningkat teruse dari tahun ke tahun sejak tahun 2016 hingg tahun 2020. Disisi lain, PPN Ternate selalu tidak mampu merealisasikan target PNBP setiap tahunnya.

Pada tahun 2016, PPN Ternate ditargetkan menyumbangkan PNBP untuk Negara sebesar Rp. 289.453.000,-, namun hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 250.000.000,- atau 86,37%. Target PNBP PPN Ternate di tahun 2020 sebesar Rp. 455.224.000,-, hanya mampu direalisasikan senilai Rp. 375.000.000,-, atau 76,89%. Jika PNBP Kota Ternate tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020, maka kinerja PPN Ternate sudah sangat baik.

L. Analisis Pengembangan Berfokus Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap

Mengacu kepada penajaman visi Kota Ternate sebagai "Kota Bahari Tahun 2010", maka perspektif tujuan pengembangan kawasan minapolitan adalah mengakselerasi pencapaian visi Kota Ternate melalui "*Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate dengan fokus pada komoditas unggulan perikanan tangkap*".

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem agribisnis yang utuh mulai dari hulu sampai hilir dengan berorientasi pada komoditi unggulan perikanan tangkap, mensinkronkan tata ruang untuk mengefektifkan pengembangan kawasan, dan meningkatkan jaringan prasarana dan sarana agribisnis perikanan dalam rangka mendukung percepatan pengembangan kawasan yang handal.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan kawasan minapolitan, maka kawasan dikembangkan melalui strategi sebagai berikut :

- ✓ Mengembangkan komoditi unggulan dan komoditi penunjang melalui sistem agribisnis dengan pola klaster (*cluster*).
- ✓ Mengelompokkan dan menentukan struktur ruang berdasarkan keunggulan masing-masing wilayah dalam kawasan.
- ✓ Mengembangkan prasarana dan sarana yang dapat meningkatkan sinergitas kegiatan dalam kawasan.

- ✓ Mengelompokkan dan menentukan pola ruang kawasan berdasarkan zona-zona kawasan.

M. Arahannya Pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate

Kota Ternate ditetapkan sebagai salah satu kota/kabupaten sebagai kawasan minapolitan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan pada tahun 2010. Konsep minapolitan merupakan suatu perencanaan konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegritas, efisiensi, berkualitas, dan percepatan melalui beberapa program baik aspek non fisik maupun aspek fisik.

1. Aspek Non Fisik

- Aturan/hukum termasuk didalamnya peraturan daerah (PERDA) yang mengatur berbagai aktivitas di wilayah pesisir dan laut yang berhubungan dengan pengelolaan/pemanfaatan sumberdaya hayati dan non hayati di lingkungan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan, termasuk mengatur/mengelola/mengawasi penggunaan/pengoperasian alat penangkapan ikan, kegiatan industri yang tidak ramah lingkungan, pengemboman, pembiusan, dan kegiatan lain yang merugikan, serta kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.
- Penetapan perjanjian bersama lintas kabupaten kota bahkan negara dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan khususnya yang berada di wilayah ZEEI.

- Pengembangan kualitas SDM baik pada instansi teknik maupun nelayan melalui pendidikan reguler maupun non-reguler untuk meningkatkan daya saing.
- Penetapan daerah perlindungan pantai dan laut (DPPL) mencakup perlindungan dan pengawasan hutan bakau mencakup wilayah Pulau Mayau, Tifure dan Pulau Moti; terumbu karang mencakup komunitas terumbu karang Pulau Mayau, Tifure, Hiri dan Moti, perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi. Dengan demikian hal ini akan merupakan suatu komitmen ekologis dalam upaya memelihara, melindungi dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir dan laut sehingga dan dikelola secara berkelanjutan.

2. Aspek Fisik

Mencakup, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan, mencakup :

- Peningkatan fasilitas armada tangkap nelayan pelagis kecil (layang dan tongkol) terutama yang berhubungan dengan upaya peningkatan mutu hasil tangkapan, seperti penggunaan cool box atau palka berinsulasi.
- Pengembangan kapasitas armada tangkap (minimal 40 GT) yang dapat menjangkau ZEEI yang ditunjang dengan armada penampung dengan spesifikasi khusus seperti palka ikan berinsulasi sistem air laut didinginkan (ALDI) atau air laut direfrigerasi (ALREF) untuk menjamin mutu hasil tangkapan.

- Pembangunan atau peningkatan kualitas pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti: pabrik es, coldstorage, instalasi air bersih, dermaga kapal ikan untuk menunjang kegiatan pasca tangkap.
- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan membentuk koperasi dalam mengelola Pelelangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan dalam rangka menunjang terbukanya Ternate sebagai Pasar Komoditi Perikanan bertaraf internasional.
- Pembangunan industri perikanan untuk menghasilkan produk: ikan beku, bakso ikan, ikan kayu, tepung ikan dan ikan kaleng, yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri moderen, yang mencakup proses pengolahan sampai pada pengolahan limbah industri.
- Pembangunan dan atau peningkatan kapasitas docking bagi armada perikanan.
- Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah ada sesuai standar yang diinginkan pasar.
- Pembangunan sistim drinage industri perikanan dan kelautan yang memperhatikan aspek pencemaran lingkungan.
- Pengembangan/penetapan daerah-daerah perlindungan laut, termasuk di dalamnya terumbu karang, hutan bakau dan pantai.

- Pengembangan budidaya laut seperti pemeliharaan ikan pada jaring apung di lokasi tertentu seperti di Kecamatan Batang Dua , Moti dan Hiri, serta usaha budidaya kolam.

Dalam konsep Minapolitan di Ternate terbagi zona-zona yaitu:

- Zona inti kawasan Minapolitan terletak Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Bastiong.
- Zona pendukung kawasan Minapolitan terletak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa.
- Zona Hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di pulau Hiri, Moti dan gugus pulau Batang Dua.

Hal-hal yang diinginkan terkait dengan pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Ternate kedepan yaitu:

- Aspek Infrastruktur
- Aspek kelembagaan dan regulasi
- Aspek Pendanaan
- Aspek Sosial Budaya

a) Pada **Aspek Infrastruktur**, untuk infrastuktur pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa cukup memadai. Pemerintah Kota Ternate juga mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara naik status menjadi pelabuhan Samudera, sehingga dengan

- Pengembangan kualitas SDM baik pada instansi teknik maupun nelayan melalui pendidikan reguler maupun non-reguler untuk meningkatkan daya saing.
- Penetapan daerah perlindungan pantai dan laut (DPPL) mencakup perlindungan dan pengawasan hutan bakau mencakup wilayah Pulau Mayau, Tifure dan Pulau Moti; terumbu karang mencakup komunitas terumbu karang Pulau Mayau, Tifure, Hiri dan Moti, perlindungan pantai mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi. Dengan demikian hal ini akan merupakan suatu komitmen ekologis dalam upaya memelihara, melindungi dan melestarikan ekosistem wilayah pesisir dan laut sehingga dan dikelola secara berkelanjutan.

2. Aspek Fisik

Mencakup, seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat menunjang kegiatan usaha perikanan, mencakup :

- Peningkatan fasilitas armada tangkap nelayan pelagis kecil (layang dan tongkol) terutama yang berhubungan dengan upaya peningkatan mutu hasil tangkapan, seperti penggunaan cool box atau palka berinsulasi.
- Pengembangan kapasitas armada tangkap (minimal 40 GT) yang dapat menjangkau ZEEI yang ditunjang dengan armada penampung dengan spesifikasi khusus seperti palka ikan berinsulasi sistim air laut didinginkan (ALDI) atau air laut direfrigerasi (ALREF) untuk menjamin mutu hasil tangkapan.

- Pembangunan atau peningkatan kualitas pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti: pabrik es, coldstorage, instalasi air bersih, dermaga kapal ikan untuk menunjang kegiatan pasca tangkap.
- Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan dan membentuk koperasi dalam mengelola Pelelangan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup nelayan dan dalam rangka menunjang terbukanya Temate sebagai Pasar Komoditi Perikanan bertaraf internasional.
- Pembangunan industri perikanan untuk menghasilkan produk: ikan beku, bakso ikan, ikan kayu, tepung ikan dan ikan kaleng, yang telah menerapkan prinsip-prinsip industri moderen, yang mencakup proses pengolahan sampai pada pengolahan limbah industri.
- Pembangunan dan atau peningkatan kapasitas docking bagi armada perikanan.
- Pengembangan prasarana dan sarana pendidikan yang sudah ada sesuai standar yang diinginkan pasar.
- Pembangunan sistim drainage industri perikanan dan kelautan yang memperhatikan aspek pencemaran lingkungan.
- Pengembangan/penetapan daerah-daerah perlindungan laut, termasuk di dalamnya terumbu karang, hutan bakau dan pantai.

- Pengembangan budidaya laut seperti pemeliharaan ikan pada jaring apung di lokasi tertentu seperti di Kecamatan Batang Dua , Moti dan Hiri, serta usaha budidaya kolam.

Dalam konsep Minapolitan di Ternate terbagi zona-zona yaitu:

- Zona inti kawasan Minapolitan terletak Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Bastiong.
- Zona pendukung kawasan Minapolitan terletak Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa.
- Zona Hinterland sebagai kawasan penyangga terletak di pulau Hiri, Moti dan gugus pulau Batang Dua.

Hal-hal yang diinginkan terkait dengan pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Ternate kedepan yaitu:

- Aspek Infrastruktur
- Aspek kelembagaan dan regulasi
- Aspek Pendanaan
- Aspek Sosial Budaya

a) Pada **Aspek Infrastruktur**, untuk infrastuktur pendukung Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa cukup memadai. Pemerintah Kota Ternate juga mengharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara naik status menjadi pelabuhan Samudera, sehingga dengan

demikian akan terjadi pembagian kewenangan dalam hal pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang perikanan.

b) Pada **Aspek Kelembagaan dan Regulasi**, yang ingin diwujudkan pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan:

- Produksi komoditas perikanan
- Menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Keinginan para pengusaha perikanan di Kota Ternate agar ekspor hasil-hasil perikanan dari Kota Ternate yang melalui laut dapat dilakukan langsung dari Pelabuhan Ternate ke negara tujuan ekspor tanpa harus melalui pelabuhan Bitung atau Surabaya. Selanjutnya pemerintah Kota Ternate berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat membantu memperkuat kelembagaan koperasi nelayan dan memberdayakan kelompok-kelompok nelayan, sehingga dapat membantu para nelayan untuk memasarkan hasil produksinya. Selain itu melakukan reformasi regulasi dan kebijakan perijinan, bea masuk, serta menghilangkan peraturan yang dapat menghambat pengembangan sektor perikanan

c) Pada **Aspek Pendanaan**, tentunya pemerintah Kota Ternate sangat mengharapkan bantuan dari kementerian terkait untuk dapat mewujudkan konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate diharapkan ada kerja sama dengan kementerian dan lembaga

pemerintah pusat yang terkait lewat program-program pembinaan ekonomi, dunia usaha, pengembangan investasi usaha serta fasilitas peluang-peluang dari lembaga keuangan dan perbankan.

d) Pada **Aspek Sosial Budaya**, hal-hal yang ingin diwujudkan antara lain adanya peningkatan sarana sosial seperti pada pendidikan dan kesehatan, pembinaan tenaga kerja serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, begitu juga adat istiadat terus dipupuk. Rencana kegiatan utama yang mendukung program Minapolitan antara lain:

- Pembangunan jalan Dufa Dufa – Salero
- Pembangunan Jalan pantai Kota Baru – Bastiong
- Pembangunan Jalan pantai Kalumata – Fitu
- Pembangunan pabrik es di Pulau Moti dan Pulau Batang Dua
- Pembangunan dan pengembangan dermaga di pulau Hiri, Moti, Mayau dan Tifure.
- Pembangunan Pos Pemantau Angkatan Laut di Batang Dua
- Pembangunan gedung pengolahan hasil perikanan tangkap dan perikanan laut
- Pembangunan BBM industry di PPN Temate
- Pembangunan dermaga tipe I (*lay by pier*) dan *carrier pier* di PPN Bastiong
- Pembangunan *Cold Storage* PPN Ternate

- Pembangunan *Prosesing* Tuna di PPN Temate
- Pembangunan Dermaga Tipe T di PPN Temate

N. Analisis Potensi Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan

1. Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Peranan wilayah pesisir dan laut dalam konteks pengembangan transportasi laut yaitu menyediakan ruang bagi pembangunan pelabuhan beserta fasilitas dan penunjang operasional pelabuhan serta menyediakan ruang bagi alur pelayaran. Secara prinsip, penggunaan laut sebagai penyedia sarana transportasi bertujuan untuk mendorong gerak pembangunan, penyerapan tenaga kerja dan sekaligus membantu mengendalikan pencemaran lingkungan pesisir.

Transportasi laut atau pelayaran laut sebagai bagian dari usaha industri jasa kelautan, di dalam pengoperasiannya terbagi beberapa jenis yakni:

- a. Pelayaran Internasional.** Pelayaran Internasional yang disebut juga pelayaran luar negeri atau pelayaran samudera dimaksudkan untuk memperlancar muatan perdagangan ekspor-impor yang hampir seluruhnya melalui laut, karena perdagangan luar negeri melalui udara volumenya masih sangat kecil. Pelayaran luar negeri dibedakan atas pelayaran samudera umum (*general cargo*) dan pelayaran samudera khusus (migas, kayu bulk, dan curah)
- b. Pelayaran Nasional.** Pelayaran Nasional atau pelayaran dalam negeri terdiri dari pelayaran nusantara, pelayaran rakyat, dan pelayaran lokal. Pelayaran dalam negeri bertujuan khusus melayani kebutuhan angkutan laut di wilayah perairan Indonesia baik angkutan barang maupun penumpang.

- c. **Pelayaran khusus.** Pelayaran khusus dimiliki oleh industri yang memerlukan angkutan laut untuk mengangkut hasil industrinya baik ekspor maupun impor seperti kehutanan, perikanan, aneka industri dan pertambangan. Armada pelayaran khusus biasanya mempunyai dermaga sendiri.

Transportasi laut adalah segala sesuai yang berkaitan dengan angkutan di perairan laut, kepelabuhanan dan keamanan serta keselamatan pelayaran. Tiga komponen penting dalam transportasi laut yaitu pelabuhan, sarana transportasi, dan navigasi pelayaran.

A) Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Pelabuhan menurut perannya dapat merupakan:

- simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional;
- tempat kegiatan alih moda transportasi;
- penunjang kegiatan industri dan perdagangan;

- tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.

Pelabuhan menurut jenisnya dapat dibedakan atas:

- pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
- pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

Hirarki peran dan fungsi pelabuhan terdiri atas:

- pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama primer;
- pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
- pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
- pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
- pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.

Secara eksisting, di kawasan minapolitan Kota Ternate terdapat pelabuhan umum yaitu "Pelabuhan Ahmad Yani" yang berstatus sebagai pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang.

Peranan pelabuhan sangat penting dalam pengembangan suatu kawasan. Akan tetapi jika melihat kapasitas arus barang dan orang yang akan dilayani, pengembangan pelabuhan di kawasan minapolitan Kota Ternate tidaklah mendesak. Transportasi laut internal (regional dan lokal) dalam kawasan baik transportasi antar pulau maupun antar desa-desa pesisir telah memadai dilayani dengan pelayaran rakyat dan transportasi darat. Distribusi barang sehari-hari yang diproduksi di kawasan minapolitan Kota Ternate volumenya

tidaklah besar untuk didistribusikan antar antar pulau atau antar desa. Sedangkan pergerakan penumpang antar pulau dan antar desa pesisir melalui angkutan laut jumlahnya sangat besar, dan selama ini telah dilayani oleh kapal cepat (*speed boat*) dari beberapa dermaga penyeberangan yang terdapat di sepanjang pantai kawasan minapolitan Kota Ternate.

Pengembangan prasarana transportasi laut yang lebih penting untuk dilakukan adalah pengembangan dermaga pada setiap kampung-kampung nelayan. Beberapa kampung pesisir di kawasan minapolitan belum memiliki prasarana dermaga, dan beberapa dermaga yang ada telah mengalami kerusakan. Padanan dermaga ini sangat penting untuk melayani pergerakan barang dan penumpang di kampung-kampung tersebut.

Dalam jangka panjang dimungkinkan untuk pengembangan pelabuhan, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Lokasi pelabuhan harus terlindung dari gelombang laut yang besar, sedapat mungkin terletak pada kawasan teluk dengan kedalaman perairan yang memadai bagi kapal-kapal yang dilayani
- 2) Perencanaan kawasan pelabuhan hendaknya bebas dari gangguan bencana badai dan gelombang laut, dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang dengan aman
- 3) Pelabuhan hendaknya dibangun di lokasi yang jauh dari muara sungai, untuk mencegah pendangkalan alur pelayaran akibat sedimentasi sungai

- 4) Tersedianya areal penambatan kapal (*anchorage area*) yang memadai dan aman
- 5) Pelabuhan harus memiliki daerah untuk pemutaran kapal sebelum dan sesudah kegiatan bongkar muat barang dan penumpang
- 6) Pelabuhan harus memiliki areal di daratan untuk menunjang operasi bongkar muat penumpang dan barang dari dan ke kapal.

B) Sarana Angkutan Laut

Sarana angkutan laut yang dipergunakan untuk menunjang pelayaran rakyat internal dan eksternal kawasan minapolitan Kota Ternate telah tersedia yang didominasi oleh *speed boat*. Dalam upaya meningkatkan kapasitas angkutan dan keselamatan pelayaran dibutuhkan pengembangan sarana transportasi laut mengingat di masa yang akan datang volume dan frekuensi angkutan barang hasil-hasil laut (terutama ikan) dari pusat-pusat produksi ke pelabuhan pengumpan primer akan terus meningkat.

C) Navigasi Pelayaran

Kenavigasian meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air, untuk kepentingan keselamatan pelayaran.

Untuk menjamin keselamatan pelayaran sangatlah penting menetapkan alur-alur pelayaran dan menetapkan sistem rute. Di wilayah kerja Pelabuhan Ahmad Yani masih perlu ditambah rambu-rambu navigasi laut, sehingga

kapal-kapal niaga yang akan berlabuh tidak perlu dipandu. Pelayaran internal kawasan minapolitan Kota Ternate merupakan pelayaran yang agak berbahaya bagi keselamatan pelayaran, terutama pada malam hari. Sarana bantu navigasi pelayaran ini sangat penting disediakan di kawasan minapolitan Kota Ternate.

D) Prasarana Pelabuhan Perikanan

Salah satu prasarana perikanan tangkap yang dibutuhkan dalam pengembangan perikanan di suatu kawasan adalah pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan, yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan perikanan. Klasifikasi pelabuhan perikanan meliputi:

- 1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS), adalah Pelabuhan Perikanan Klas A, yang skala layanannya mencakup sekurang-kurangnya kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, ZEEI, dan wilayah perairan internasional.
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), adalah Pelabuhan Perikanan Klas B, yang skala layanannya mencakup sekurang-kurangnya kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan ZEEI.
- 3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), adalah Pelabuhan Perikanan Klas C, yang skala layannya mencakup sekurang-kurangnya kegiatan usaha

perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan kepulauan, perairan laut teritorial, dan ZEEI.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), adalah Pelabuhan Perikanan Klas D, yang skala layannya mencakup sekurang-kurangnya kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.

Berdasarkan Peraturan Menteri 16 Tahun 2006 Tentang Pelabuhan Perikanan bahwa prasarana PPI pada dasarnya memiliki berbagai fungsi yang berkaitan dengan kegiatan perikanan. Secara lebih spesifik, prasarana PPI mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut :

- Pusat pengembangan masyarakat nelayan
- Pusat pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan
- Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
- Pelayanan kegiatan operasional hasil-hasil perikanan
- Pusat pemasaran dan distribusi hasil perikanan
- Pusat pembinaan dan penanganan mutu hasil perikanan
- Tempat pengembangan industri dan pelayanan pemasaran
- Tempat pengawasan, penyuluhan dan pengumpulan data.

Secara operasional, pengembangan prasarana PPI dilakukan untuk mengemban fungsi-fungsi tersebut di atas. Oleh karena itu, strategi pengelolaan yang dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana yang mendukung produksi, pelayanan produksi, paskapanen, pengolahan serta

pemasaran dalam suatu alur kegiatan yang saling terkait dalam satu kawasan lingkungan kerja. Dengan kata lain, PPI seharusnya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan dan pusat pengembangan masyarakat nelayan.

Pelabuhan perikanan yang telah tersedia di kawasan minapolitan Kota Ternate yaitu PPN Ternate dan PPI Dufa-Dufa.

A. PPN Ternate

PPN Ternate ini merupakan basis bagi kegiatan perikanan tangkap di Kota Ternate. Keberadaan sebuah PPN di kawasan minapolitan Kota Ternate sudah sangat memadai untuk menunjang kegiatan perikanan tangkap di kawasan tersebut termasuk fasilitas penunjangnya, meliputi dermaga, pabrik es, stasiun pengisian bahan bakar dan air bersih serta perkantoran.

Berdasarkan analisis kecenderungan (*trend*) produksi perikanan tangkap dan pola sistem bisnis perikanan tangkap di Kota Ternate, masih diperlukan pengembangan PPN Ternate. Pengembangan ini diperlukan agar pelabuhan dapat melayani seluruh aktivitas/kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh para nelayan dan pelaku bisnis di PPN Ternate.

B. PPI Dufa-Dufa

Keberadaan PPI Dufa-Dufa menjadi sangat penting bagi para nelayan di Kecamatan Ternate Utara dan para nelayan yang berasal dari pulau-pulau di utara Pulau Ternate. Yang lebih penting untuk dikembangkan di PPI Dufa-Dufa adalah meningkatkan pemanfaatan seluruh fasilitas terpasang/terbangun sebagai sentra

sistem bisnis perikanan dan pengembangan sumberdaya manusia di kawasan minapolitan Kota Ternate.

E) Prasarana dan Sarana Pasca Panen Perikanan

Dalam usaha meningkatkan nilai tambah kegiatan perikanan di kawasan minapolitan diperlukan dukungan prasarana dan sarana pasca panen.

Pengembangan prasarana dan sarana pasca panen diarahkan pada:

- Pengembangan pasca panen yang berbasis perikanan di kawasan PPN Ternate Kecamatan Ternate Selatan dan PPI Dufa-Dufa Kecamatan Ternate Utara.
- Pengembangan sistem rantai pendingin (*cold chain system*) bagi nelayan.

O. Analisis Permasalahan Lingkungan

1. Pencemaran Laut

Wilayah pesisir sebagai peralihan antara daratan dan lautan merupakan daerah akumulasi beban pencemaran yang berasal dari aktivitas manusia di daratan (*land-base pollution*) dan aktivitas manusia di laut (*marine-base pollution*). Laut sampai saat ini masih dianggap sebagai medium pembuangan limbah tanpa batas, sehingga masalah pencemaran laut umumnya berifat *anthropologis* yaitu lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Fungsi laut salah satunya adalah sebagai medium pengaliran limbah. Akan tetapi laut yang dipandang begitu luas juga memiliki daya tampung yang terbatas artinya, kemampuan laut untuk menetralsir limbah yang masuk sifatnya terbatas.

Oleh karena itu, pengaliran limbah ke laut memiliki persyaratan yaitu, *pertama* jumlah limbah yang dialirkan tidak melampaui kemampuan *self-purification* laut itu sendiri, *kedua* lokasi pengaliran limbah harus memperhatikan kondisi hidro-oseanografis yang sesuai, *ketiga* limbah yang dialirkan ke laut harus sudah melalui proses perlakuan, dan *keempat* limbah yang dialirkan ke laut bukan merupakan limbah beracun dan berbahaya. Masalah pencemaran laut terjadi jika beban aliran limbah melampaui kemampuan laut untuk memulihkannya.

Memperhatikan kondisi penggunaan ruang (aktivitas manusia) di wilayah daratan dan aktivitas manusia di laut, maka masalah pencemaran di perairan laut kawasan minapolitan Kota Ternate dapat didekati dari dua hal yaitu:

2. Masalah pencemaran dan sedimentasi yang berasal dari daratan (*land-base pollution*)

Kondisi daerah aliran sungai (DAS) yang tidak sehat dimana sebagian besar lahan terbuka serta sistem pengelolaan lahan pertanian dengan teknik konservasi lahan yang sangat minim merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya tingkat erosi tanah. Erosi tanah tersebut sangat mempengaruhi tingkat sedimentasi di wilayah perairan pantai, dimana kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan ekosistem dan habitat perairan. Terlebih-lebih wilayah daratan pesisir dan pulau-pulau kecil Kota Ternate sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang kondisi penutupan lahannya oleh vegetasi sangat minim sehingga pada musim-musim hujan tingkat erosi tanah yang masuk ke perairan tergolong tinggi.

Selain itu, sampah dan air limbah yang berasal dari kegiatan manusia di daratan juga mempengaruhi ekosistem dan habitat pesisir khususnya terumbu karang. Air limbah rumah tangga yang umumnya merupakan limbah organik masuk ke perairan pantai melalui aliran sungai dan peresapan dapat mendorong proses eutrofikasi di perairan pantai.

Potensi pencemaran perairan lainnya bersumber dari kegiatan di pelabuhan perikanan. Limbah pencucian lantai TPI dan pencucian kapal/perahu nelayan secara langsung dibuang ke laut sehingga dapat mencemari lingkungan perairan.

3. Masalah pencemaran yang bersumber dari aktivitas di laut

Pencemaran yang bersumber dari aktivitas di laut yang paling potensial adalah pencemaran minyak. Perairan pantai di daerah-daerah pemangkalan perahu nelayan secara visual menunjukkan adanya lapisan minyak. Minyak pelumas yang sudah tidak dipergunakan lagi umumnya dibuang langsung ke laut karena di dermaga tidak disediakan tempat penampungan minyak pelumas bekas.

4. Kerusakan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati

Kawasan minapolitan Kota Ternate termasuk kawasan yang berpotensi dan rawan terhadap praktek-praktek *destructive fishing* terutama penangkapan ikan dengan bahan peledak. Praktek *destructive fishing* ini tergolong tindakan kriminal yang sangat merugikan kelestarian sumberdaya ikan dan menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang yang parah.

Berdasarkan tutupan karang mati, tingkat kerusakan terumbu karang dapat diklasifikasikan sebagai rusak ringan, rusak dan rusak berat. Faktor-faktor penyebab kerusakan karang dapat diidentifikasi dari karakteristik kematian karang. Kerusakan terumbu karang pada zona *reef slope* sebagian besar disebabkan oleh *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan dengan bahan peledak (bom ikan). Ciri-ciri terumbu karang yang rusak akibat bom yaitu terumbu karang terfragmentasi dari substrat tumbuhnya dan hancur berkeping-keping. Terumbu karang pada zona *reef slope* yang berkedalaman 5 – 15 meter menjadi sasaran pengeboman karena pada zona ini kelimpahan ikan lebih tinggi dan ikan yang menghuni habitat terumbu karang *reef slope* yang lebih dalam berukuran lebih besar, yang menjadi target penangkapan ikan.

P. Analisis Kerentanan Terhadap Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (WP3K)

Analisis kerentanan (*vulnerability*) ditujukan untuk mengidentifikasi suatu kondisi yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk merespon dampak buruk bahaya/bencana. Analisis kerentanan tersebut didasarkan beberapa aspek yaitu aspek kelembagaan/perencanaan, sosial ekonomi, demografi, fisik lingkungan, bangunan/lingkungan bangunan, serta sarana dan infrastruktur/prasarana.

1. Kerentanan Kelembagaan

Kerentanan terhadap bencana ditinjau dari aspek kelembagaan yang meliputi institusi, perencanaan, sumberdaya manusia dan peraturan perundang-undangan, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Institusi/lembaga yang secara khusus di bidang penanggulangan bencana belum ada. Institusi penanggulangan bencana yang ada hanyalah bersifat koordinatif berupa Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), dimana fungsi lembaga ini dalam penanggulangan bencana kurang maksimal dalam mengatasi permasalahan bencana yang sangat kompleks.
- 2) Koordinasi antar instansi dan antara pemerintahan pusat dan daerah dalam penanggulangan bencana masih lemah. Selama ini, koordinasi penanganan bencana antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dirasakan berjalan lambat. Pasalnya, selain menangani bencana, pemerintah daerah punya kewajiban lainnya, yakni menjalankan pemerintahan.
- 3) Peraturan Daerah mengenai penanggulangan bencana belum tersedia. Dengan disahkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Indonesia telah memiliki kebijakan terpadu penanggulangan bencana yang berkekuatan hukum. Sementara di tingkat daerah belum tersedia Peraturan Daerah mengenai penanggulangan bencana yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan berdasarkan karakteristik dan nilai-nilai lokal.
- 4) Aturan tentang spesifikasi bangunan yang ramah bencana belum tersedia.

- 5) Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang ada. Daerah-daerah rawan bencana dengan tingkat resiko tinggi masih dijadikan sebagai tempat permukiman maupun aktivitas lainnya.
- 6) Perencanaan yang terpadu semisal rencana strategis mitigasi bencana belum tersedia. Perencanaan mitigasi bencana secara terpadu juga belum termuat dalam dokumen rencana pembangunan daerah.
- 7) Pelestarian dan pengembangan bangunan tahan bencana yang bercirikan kearifan lokal belum secara optimal dilakukan.
- 8) Terbatasnya data (database rawan bencana), informasi dan hasil-hasil penelitian berkaitan dengan mitigasi bencana.
- 9) SDM aparatur di bidang mitigasi bencana (manajemen bencana) masih terbatas dan kapasitasnya kurang memadai
- 10) Belum tersedianya sistem peringatan dini terhadap bencana secara memadai.

2. Kerentanan Demografi

Aspek-aspek demografi yang menjadi faktor kerentanan terhadap bencana yaitu beberapa wilayah pesisir yang termasuk rawan bencana terdapat permukiman penduduk dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

3. Kerentanan Sosial Ekonomi

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, terdapat beberapa kondisi yang merupakan faktor kerentanan terhadap bencana, yaitu:

- 1) Tingkat pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bencana, resiko, dan upaya-upaya mitigasi masih kurang. Hal ini juga menyebabkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana masih lemah.
- 2) Penduduk yang bermukim di wilayah pesisir yang termasuk daerah rawan bencana termasuk kategori penduduk dengan tingkat perekonomian rendah sehingga sangat rentan terhadap dampak bencana.
- 3) Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah laut relatif tinggi, seperti nelayan dan pembudidaya laut.

4. Kerentanan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mitigasi bencana dan penanggulangan dampak bencana belum tersedia secara memadai, termasuk sarana dan prasarana yang menunjang sistem peringatan dini terhadap bencana.

5. Ruang Daratan Pesisir

a) Data Kemampuan Lahan

Berdasarkan analisis daya dukung fisik lahan, diketahui bahwa lahan daratan kawasan minapolitan Kota Ternate sebagian besar merupakan kawasan yang memiliki kendala dan limitasi sebagai kawasan budidaya dan hanya sebagian

kecil merupakan kawasan potensial untuk dikembangkan. Kawasan yang memiliki kendala dan limitasi untuk dikembangkan dikarenakan faktor-faktor yaitu:

- Faktor pembatas s (zona perakaran, kedalaman efektif dan tekstur tanah)
- Faktor pembatas n (tingkat kesuburan tanah)
- Faktor pembatas f (keadaan banjir/genangan)
- Faktor pembatas t (pembatas topografi seperti: kemiringan, morfologi, dan ketinggian tanah)
- Faktor pembatas d (drainase alami, cepat atau lambatnya tingkat peresapan).
- Faktor pembatas e (erosi, ketahanan terhadap erosi dan tingkat erosi terdahulu).

Pembatasan pengembangan budidaya pada kawasan yang memiliki kendala dan limitasi untuk mencegah kondisi rawan bencana dan kerusakan lingkungan dengan menekankan pemeliharaan dan pelestarian yang ketat. Kawasan semacam ini yang dalam pengertian kesesuaian lahan termasuk dalam kategori kawasan limitasi dan kawasan manfaat bersyarat. Berdasarkan pengamatan terhadap kawasan perencanaan, kendala dan limitasi tersebut adalah:

- Wilayah aliran sungai dimana pembangunan yang akan dilakukan tidak boleh mengganggu fungsi ekologis dan alirannya mengingat sungai-sungai yang

c) Kebijakan Pembangunan dan Rencana Tata Ruang

Kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten maupun sektoral lainnya merupakan acuan dalam pengembangan kawasan minapolitan Kota Ternate. Kombinasi pemenuhan kepentingan ekonomi, sosial budaya, pelestarian lingkungan, dan kepentingan ekonomi lokal menjadi bagian yang harus disinergikan dalam pengaturan pemanfaatan ruang.

Sebagaimana diketahui bahwa, "Kawasan Minapolitan Kota Ternate" merupakan salah satu "Kawasan Strategis Kota Ternate". Pengembangan kegiatan ekonomi yang bernuansa bisnis dan pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik untuk menunjang pengembangan kawasan tetap harus memperhatikan kaidah ekologi dan kelestarian lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

d) Pertimbangan Ekonomi dan Sosial Budaya

Perubahan fungsi lahan bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi akan memberikan dampak terhadap perubahan ekonomi dan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat yang tinggal dan mencari penghidupan di kawasan teluk. Akan tetapi pengembangan wilayah atas pertimbangan ekonomi tersebut hendaknya tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat pesisir dan memperhatikan pola perubahan perilaku sosial masyarakat.

e) Arah dan Kecenderungan Investasi dan Pengembangan Kawasan

Sebagai salah satu kawasan strategis dan kawasan pengembangan, kawasan ini cenderung akan berkembang investasi-investasi (swasta, pemerintah dan masyarakat) terutama investasi yang berbasis pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta sistem pendukungnya. Kawasan ini juga akan berkembang mengemban fungsi-fungsi kegiatan regional sebagai mata rantai pengembangan Kota Ternate di bagian selatan.

Keterbatasan calon cadangan lahan untuk alih fungsi demi mendukung fungsi tersebut di atas harus juga dicarikan alternatif sehingga semua fungsi dapat berjalan secara sinergi sesuai kapasitas daya dukung lingkungan, sosial dan ekonomi yang ada. Keberadaan lokasi lahan kering atau lahan kosong lainnya merupakan salah satu alternatif lokasi untuk mengakomodasikan investasi yang masuk.

Untuk menentukan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan yang relatif lebih sesuai, agar lebih mudah dilakukan alokasinya, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi kesesuaiannya dalam tiga kategori, yaitu:

- a) **Kawasan Potensial** adalah kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian untuk mengakomodasikan pemanfaatan ruang untuk permukiman, kegiatan pertanian sawah, ladang, kebun, perdagangan dan jasa, perikanan budidaya, aktivitas pelabuhan dan budidaya khusus lainnya.
- b) **Kawasan Manfaat Bersyarat**, meliputi kawasan-kawasan yang memiliki kesesuaian untuk keperluan pemanfaatan ruang penyangga. Dimana

kawasan ini berfungsi untuk menjaga dan mengamankan kawasan-kawasan preservasi dari rambahan atau pengaruh perkembangan kawasan budidaya. Kawasan ini dapat berupa jalur hijau dan kawasan berlereng antara 15 - 40%..

- c) **Kawasan Limitasi**, yaitu kawasan-kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah/budaya guna kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan ini adalah kawasan pesisir yang memiliki kemiringan lahan lebih dari 40%.

Q. Ruang Perairan Pesisir

1. Data Kesesuaian dan Kemampuan Ruang Perairan

Pemanfaatan ruang perairan (laut) sebagai kawasan budidaya dapat dibedakan atas dua kategori berdasarkan atas kesesuaian dan kemampuannya yaitu: *pertama*, pemanfaatan ruang laut yang berbasis pada sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan perairan yang berkualitas prima seperti perikanan budidaya, rekreasi dan pariwisata bahari dan perikanan tangkap; *kedua*, pemanfaatan ruang laut yang kurang bergantung pada sumberdaya alam dan kualitas lingkungan seperti transportasi laut.

Untuk kategori pertama, pemanfaatan ruang laut sangat dibatasi oleh kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Selain itu terdapat banyak faktor atau kriteria yang membatasi kesesuaian penggunaan. Dalam upaya pengembangan perikanan budidaya di perairan Kawasan minapolitan Kota Ternate terdapat beberapa kriteria kesesuaiannya yaitu:

- Lokasi cukup terlindung dari angin dan ombak besar sepanjang tahun terutama pada musim timur dimana kondisi gelombang di dalam teluk relatif tinggi.
- Lokasi tidak digunakan untuk alur pelayaran dan tempat/lokasi pangkalan perahu.
- Kecerahan dan salinitas perairan relatif stabil sepanjang tahun, tidak terjadi pelumpuran pada musim hujan.
- Tidak terdapat sumber polusi organik sekitar lokasi.
- Tidak terdapat sumber kontaminasi logam berat.
- Kualitas parameter air dan substrat memenuhi/di atas standar industri.
- Polusi/kontaminasi kegiatan budidaya perairan laut tidak menimbulkan dampak negatif terhadap spesies/habitat sensitif (misalnya terumbu karang).

Kegiatan perikanan budidaya di perairan laut ditinjau dari aspek potensi menimbulkan dampak terhadap kualitas lingkungan perairan dapat dibedakan atas dua kategori yaitu perikanan budidaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran. Kegiatan perikanan budidaya yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran seperti budidaya rumput laut dan budidaya kerang mutiara mengandung aspek kesesuaian yang lebih terfokus pada kesesuaian yang lebih umum. Sedangkan kegiatan perikanan budidaya yang berpotensi menimbulkan pencemaran seperti budidaya ikan di

dalam karamba jaring apung perlu dibatasi sesuai dengan daya tampung lingkungan.

Sementara itu, pemanfaatan ruang laut untuk perikanan tangkap yang bersifat *mobile* atau bergerak maupun yang pemanfaatannya secara temporal di suatu lokasi dapat dikembangkan di seluruh kawasan yang tersedia dan di luar kawasan alur pelayaran, dengan catatan menggunakan alat, bahan dan cara yang tidak bersifat merusak ekosistem dan lingkungan.

2. Data Penggunaan Ruang Laut Eksisting

Secara eksisting, perairan kawasan minapolitan Kota Ternate dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang meliputi alur transportasi laut dan penangkapan ikan dengan mengoperasikan alata penangkapan ikan statis (tidak bergerak). Dari aspek pemanfaatan ruang eksisting, perlu adanya beberapa pengaturan lebih lanjut dengan memperhatikan kaidah-kaidah ekologis dan kesesuaian lahan, khususnya untuk kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan transportasi laut (alur pelayaran).

Pemanfaatan ruang eksisting juga mempertimbangkan rencana pengembangan yang telah dilaksanakan sebagian tetapi belum sepenuhnya terealisasi. Contohnya adalah pengembangan Kawasan Minapolitan Kota Ternate.

3. Konflik Pemanfaatan Ruang

Salah satu karakteristik umum pemanfaatan ruang laut adalah potensi timbulnya konflik antar kegiatan. Hal ini disebabkan karena laut masih menganut

rejim *common property* dan *common use*. Salah satu fungsi penataan ruang laut bertujuan untuk mengurangi (bahkan meredam) konflik pemanfaatan ruang.

R. Analisis Kegiatan Ekonomi Unggulan (*Location Quotient/Lq*)

Dalam perekonomian regional terdapat kegiatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bukan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-kegiatan dasar (*basic activities*) adalah kegiatan mengekspor atau memasarkan barang dan jasa keluar batas perekonomian masyarakatnya atau kepada orang yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan kegiatan bukan basis (*non basic activities*) adalah kegiatan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu daerah akan menambah arus pendapatan kedalam daerah yang bersangkutan, menambah permintaan barang dan jasa sehingga akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Sebaliknya berkurangnya kegiatan basis akan mengurangi pendapatan suatu daerah dan turunny permintaan terhadap barang dan jasa dan akan menurunkan volume kegiatan (Richardson, 1977).

Metode *Location Quotient (LQ)* adalah salah satu tehnik pengukuran yang paling terkenal dari model basis ekonomi untuk menentukan sektor basis atau non basis (Prasetyo, 2001: 41-53; Lincolyn, 1997: 290). Seperti diketahui bahwa sektor basis merupakan sektor-sektor yang mempunyai nilai $LQ > 1$ sedang sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang mempunyai nilai $LQ < 1$. Selengkapya mengenai

kondisi PDRB (total dan sub sektor perikanan) Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 4.21. PDRB dan Sub Sektor Perikanan Kota Ternate dan Provinsi Maluku Utara Tahun 2010-2019 (dalam Rp. 1.000.000,-)

No.	Tahun	PDRB Kota Ternate		PDRB Provinsi Maluku Utara	
		Total	Sub Sektor Perikanan	Total	Sub Sektor Perikanan
1	2010	340,198.77	6,979.87	1,879,628.31	92,417.90
2	2011	343,808.00	7,133.00	1,911,042.79	93,757.99
3	2012	353,427.00	7,156.00	1,957,715.68	95,843.85
4	2013	368,946.00	7,435.00	2,032,571.71	98,383.78
5	2014	389,386.00	7,653.00	2,128,208.25	101,637.44
6	2015	415,085.43	8,827.80	2,236,803.65	105,229.47
7	2016	443,824.28	9,699.89	2,359,483.02	109,268.09
8	2017	478,658.50	9,798.32	2,501,175.13	117,732.07
9	2018	517,354.91	10,121.78	2,650,760.09	120,574.62
10	2019	557,573.27	10,585.79	2,810,213.18	124,429.13

Hasil perhitungan dengan metoda LQ menunjukkan bahwa nilai LQ sub sektor perikanan di Kota Ternate sejak tahun 2000 – 2009 rata-rata **1,062**. Ini berarti sub sektor perikanan di Kota Ternate adalah merupakan sektor basis yang menjadi penggerak pembangunan di wilayah ini. Berdasarkan pada kondisi ini, maka sudah sewajarnya sebagai salah satu wilayah kepulauan di Indonesia, Kota Ternate seharusnya menjadikan sektor perikanan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pembangunannya.

Tabel 4.22. Nilai LQ Sub Sektor Perikanan Kota Ternate

No.	Tahun	Nilai LQ Sub Sektor Perikanan Kota Ternate
1	2010	1,032
2	2011	1,027
3	2012	1,042
4	2013	1,051
5	2014	1,061
6	2015	1,077
7	2016	1,087
8	2017	1,073
9	2018	1,089
10	2019	1,085
	Rata - Rata	1,062

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Dalam periode tahun 2010 hingga tahun 2019, nilai LQ sub sektor perikanan di Kota Ternate lebih dari satu ($LQ > 1$) yaitu berkisar antara 1,027 – 1,089. Dengan demikian, selama ini sub sektor perikanan di Kota Ternate merupakan sektor basis. Kota Ternate terkenal dengan produsen ikan cakalang dan ikan tuna, serta cakalang asap (cakalang fufu).

Konsep pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam peningkatan pendapatan ekonomi daerah melalui sektor utama, dan menjadikan Kota Ternate sebagai salah satu sentra pengembangan pembangunan berbasis perikanan dan kelautan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

S. Analisis Potensi Lestari Sumberdaya Perikanan Kota Ternate

Berpedoman pada tujuan dari rencana pengembangan kawasan Minapolitan di Kota Ternate yang mengedepankan pengembangan sektor perikanan tangkap sebagai sektor basis dalam pengembangan kawasan minapolitan, maka penilaian terhadap nilai potensi produksi dari sektor perikanan tangkap menjadi sangat penting dalam menentukan tingkat pemanfaatan dan pengembangan sektor perikanan tangkap di Kota Ternate.

Sejalan dengan itu, penetapan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai sektor basis dalam perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate, maka pengkajian terhadap nilai produksi dan daya dukung sumberdaya alam yang menjadi faktor penentu keberhasilan pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat kawasan minapolitan memegang peranan penting dalam proses analisis potensi lestari perikanan tangkap di Kota Ternate.

Berdasarkan data keragaan operasional yang diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, maka diketahui bahwa tingkat produktifitas perikanan tangkap nelayan di Kota Ternate sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan.

Keragaan operasional pada PPN Ternate sejak tahun 2013-2019 telah mengalami perubahan pada beberapa bidang keragaannya. Pada beberapa bagian keragaan operasional PPN Ternate terdapat kecenderungan peningkatan aktifitas produksinya, seperti peningkatan pada volume produksi dan nilai produksi serta jumlah nelayan yang memanfaatkan PPN Ternate, sementara pada bagian lainnya terdapat kecenderungan penurunan pada jumlah armada penangkapan dan kebutuhan logistiknya.

Kondisi ini mengisyaratkan perlu adanya beberapa strategi pengembangan yang ditopang oleh penerapan kebijakan yang memadai dalam menunjang pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate dengan PPN Ternate sebagai wilayah utama pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate.

Selanjutnya, dari data keragaan operasional PPN Ternate tersebut, dilakukan perhitungan terhadap nilai potensi lestari perikanan Kota Ternate yang berbasis pada data produksi dan jumlah armada penangkapan PPN Ternate. Hasil perhitungan dan upaya penangkapan serta potensi lestari perikanan Kota Ternate berdasarkan data PPN Ternate dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.23. Nilai CPUE dan MSY Perikanan Tangkap Kota Ternate

No.	Tahun	Catch (Ton)	Effort (Alat)	CPUE	
				Schaefer	Fox
1	2012	3,754	79	47.52	3.86
2	2013	3,831	87	44.03	3.78
3	2014	3,969	87	45.62	3.82
4	2015	5,414	133	40.71	3.71
5	2016	4,484	158	28.38	3.35
6	2017	4,624	153	30.22	3.41
7	2018	5,073	153	33.16	3.50
8	2019	5,147	164	31.38	3.45
Jumlah		36,296.00	1,014	301.02	28.88
Rata-Rata		4,537.00	126.75	37.63	3.61
Intercept				63.18	4.29
MSY				4,950.30	4,996.99
Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan				91.65%	

Sumber : DKP Kota Ternate, 2019

Hasil analisis CPUE dan MSY di PPN Kota Ternate, diketahui bahwa upaya penangkapan per unit alat tangkap sejak tahun 2003 - 2010 mengalami kecenderungan penurunan. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor, seperti daerah penangkapan (*fishing ground*) yang semakin jauh dari lokasi PPN akibat menurunnya kualitas perairan di sekitar Kota Ternate, atau juga dapat disebabkan oleh pola migrasi ikan-ikan target (*target fish*) yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan pada iklim global (*climate change*) yang terjadi saat ini (terutama peningkatan suhu air laut).

Sementara itu, dari hasil perhitungan MSY dan F_{MSY} diketahui bahwa produksi maksimum lestari perikanan tangkap Kota Ternate adalah sebesar 4.950,30 ton/tahun/unit alat dengan upaya penangkapan (F_{MSY}) sebesar 156,17 unit alat/tahun, dengan tingkat pemanfaatan mencapai 92,65% per tahun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dalam setiap tahunnya usaha untuk memenuhi

produksi perikanan tangkap melalui berbagai kegiatan unit penangkapan yang beroperasi di PPN Ternate, telah dilakukan secara maksimal terhadap nilai potensi sumber daya perikanan tangkap dalam upaya meningkatkan volume produksi penangkapan ikan.

Sebagaimana ketentuan yang dikemukakan oleh Azis (1984) diacu dalam Muksin (2006) yang mengelompokkan bahwa tingkat pemanfaatan terbagi atas tiga kategori, yakni:

- a) Tingkat pemanfaatan $\leq 65\%$ dikategorikan dalam pemanfaatan *under exploited*;
- b) Tingkat pemanfaatan $65\% - 100\%$ dikategorikan dalam pemanfaatan optimal;
- c) Tingkat pemanfaatan $\geq 100\%$ dikategorikan dalam pemanfaatan *over fishing*.

Aspek peningkatan sarana produksi yang lebih baik serta peningkatan jumlah armada serta modernisasi alat tangkap, diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap peningkatan nilai produksi yang lebih optimal dalam setiap tahunnya, serta lebih memberikan peluang pengembangan kawasan minapolitan yang mengarah kepada peningkatan aspek-aspek teknis dan pengelolaan yang memiliki nilai saing

T. Analisis Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Ternate

Dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate dengan menjadikan PPN Ternate sebagai pusat kawasan minapolitan di Kota Ternate, diperlukan suatu arahan pengelolaan dan pemanfaatan yang dijabarkan dalam bentuk strategi dan program pengelolaan. Formulasi strategi pengembangan kawasan minapolitan Kota Ternate memerlukan suatu proses analisis secara

multidimensi dengan mengakomodir semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara strategis. Arahannya pengembangan kawasan minapolitan Kota Ternate disusun dengan mempertimbangkan dimensi pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi sosial budaya dan kelembagaan).

Untuk mengarahkan strategi pengelolaan dan pemanfaatan kawasan minapolitan Kota Ternate berdasarkan input data ekologis, sosial budaya dan ekonomi, maka dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Analisis ini merupakan suatu analisis alternatif yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan minapolitan. Analisis SWOT merupakan pemilihan hubungan atau interaksi antar unsur-unsur internal yaitu kekuatan dan kelemahan terhadap unsur-unsur eksternal, yaitu peluang dan ancaman.

Secara umum, analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan kawasan minapolitan yang efektif dan efisien, serta berkelanjutan baik secara ekonomi maupun ekologi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*). Proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengembangan strategi dan kebijakan dalam proses pengembangan kawasan minapolitan yang diharapkan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap setiap arahan strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam proses pengembangan

kawasan minapolitan di Kota Ternate. Perencanaan strategis (*strategic planning*) dilakukan dengan menganalisis faktor-faktor strategis (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) dalam kondisi yang ada saat ini.

Dari hasil pembobotan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh diperoleh hasil bahwa faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) lebih besar pengaruhnya dibanding faktor eksternal (peluang dan ancaman), terhadap pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate, dengan rasio sebesar 10,96 : 4,97.

Berdasarkan matriks *EFAS* dan *IFAS* tersebut, maka dengan model matriks *TOWS* diperoleh strategi-strategi dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan minapolitan di Kota Ternate yang dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

- a. *Strategi SO* : penggunaan unsur-unsur kekuatan pengelolaan dan pengembangan kawasan minapolitan Kota Ternate untuk mendapatkan keuntungan dari peluang-peluang yang ada;
- b. *Strategi WO* : memperbaiki kelemahan yang ada dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan minapolitan Kota Ternate dengan memanfaatkan peluang yang tersedia;
- c. *Strategi ST* : penggunaan kekuatan yang ada untuk menghindari atau memperkecil dampak dari ancaman eksternal;
- d. *Strategi WT* : taktik pertahanan yang diarahkan pada pengurangan kelemahan internal untuk menghadapi ancaman eksternal.

Matriks (SWOT) Evaluasi Faktor Internal

NO.	STRENGTH (Kekuatan)	Skor	Bobot	Total
1	Otonomi Daerah	9	3	27
2	Kawasan Minapolitan Terletak di kota Ternate	8	2,66	21,28
3	Potensi Sumberdaya Perikanan	8	2,66	21,28
	Total Kekuatan	25	8,32	69,56
NO.	WEAKNESS (Kelemahan)	Skor	Bobot	Total
1	Peran dan fungsi PPN belum optimal	8	2,66	21,28
2	Sarana dan prasarana PPN berupa fasilitas pelabuhan yang belum lengkap	8	2,66	21,28
3	Keterbatasan lahan dan sekitar wilayah kawasan Minapolitan	7	2,33	16,31
	Total Kelemahan	23	7,65	58,87

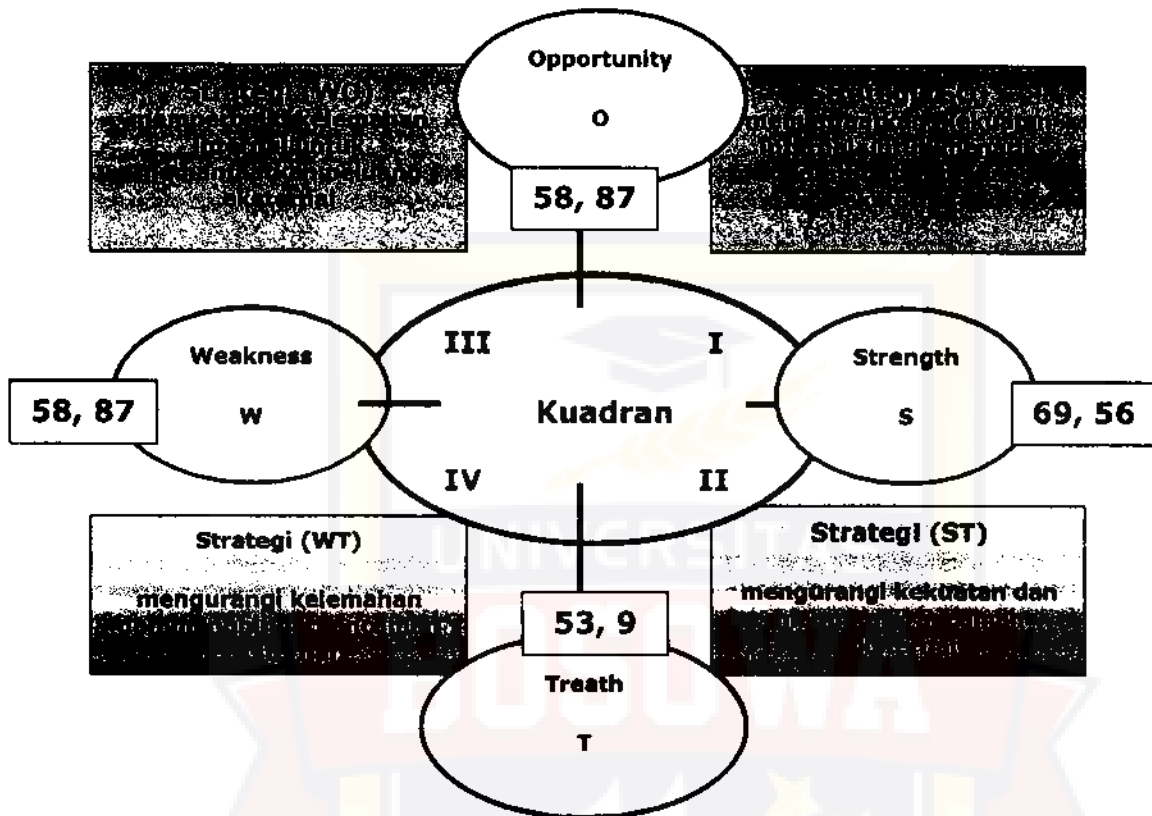
Selisih Total Kekuatan – Total Kelemahan = **69,56 – 58,87 = 10,96**

Matriks (SWOT) Evaluasi Faktor Eksternal

NO.	OPPORTUNITY (Peluang)	Skor	Bobot	Total
1	Adanya kebijakan pengembangan PPN menjadi PPS	8	2,66	21,28
2	Penetapan sebagai kawasan strategi Minapolitan Kota Ternate	8	2,66	21,28
3	Sinergitas antara produksi perikanan dengan PPN	7	2,33	16,31
	Total Peluang	23	7,65	58,87
NO.	TREATH (Ancaman)	Skor	Bobot	Total
1	Pengelolaan lingkungan yang buruk sehingga terjadi abrasi pantai, banjir, dan sedimentasi	7	2,33	16,31
2	Pencemaran laut	8	2,66	21,28
3	Bencana Alam seperti gempa bumi	7	2,33	16,31
	Total Ancaman	22	7,32	53,9

Selisih Total Peluang – Total Ancaman = **58,87 – 53,9 = 4,97**

Diagram Kuadran Matriks SWOT



➤ **Strategi "SO" berada di kuadran I**

- a) perencanaan master plan PPI Kota Ternate
- b) Penyelenggaraan system pengelolaan PPI secara terpadu dengan PPI

➤ **Strategi "ST" berada pada kuadran II**

- a) Pengembangan PPI dilakukan dengan berbasis mitigasi bencana alam
- b) Kegiatan pengembangan pelabuhan memperhatikan pengelolaan lingkungan dan penerapan AMDAL.

➤ **Strategi "WO" berada pada kuadran III**

- a) Meningkatkan peran dan fungsi PPI sebagai sarana dalam

pengembangan hasil produksi perikanan

- b) Pengembangan fasilitas PPI berupa penambahan lahan untuk kegiatan bongkar muat serta untuk penampungan kontainer

➤ **Strategi “ WT” berada pada kuadran IV**

- a) Pengelolaan sumberdaya pesisir khusus pada kawasan minapolitan secara terpadu dan optimal serta berkelanjutan
- b) Kerjasama dengan BMG mengetahui potensi bencana alam pada kawasan Minapolitan Kota Temate.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian pada pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan akhir yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Potensi kawasan pesisir Kota Ternate dengan perhitungan LQ menunjukan bahwa sektor perikanan tangkap merupakan basis potensi yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan dan didukung PPN Ternate dan PPI Dufa-Dufa
2. Strategi pengembangan kawasan pesisir Kota Ternate dari hasil SWOT adalah sebagai berikut :
 - Pengembangan kawasan perikanan terpadu di sekitar wilayah kawasan minapolitan untuk mengoptimalkan pemanfaatan, pengelolaan, metode penangkapan dan pengolahan hasil perikanan dan sistem pemasaran sebagai pusat pengembangan ekonomi masyarakat perikanan di kawasan minapolitan Kota Ternate.
 - Pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik bagi operasionalisasi kawasan minapolitan Kota Ternate

B. Saran

Bertitik tolak dari permasalahan dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana pada kawasan pesisir sehingga dapat ditingkatkan fungsinya Kota Ternate
2. Dinas Terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate maupun Dinas Provinsi Maluku Utara dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Kawasan Pesisir Kota Ternate.
3. Bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pengembangan kawasan minapolitan terhadap pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga pendapatan masyarakat dapat meningkat khususnya bagi nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Adisasmita, R, 2005. *Teori Lokasi dan Pengembangan Wilayah..* Lepas: Makassar
- Alkadri, Muchdie dan Suhandoyo. 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*, BPPT: Jakarta
- Alkadri, 1999. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah*. UI Pers: Jakarta
- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPEE: Yogyakarta.
- Arif Satria, 2010, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Dalam Pengembangan Wilayah*, Andi, Yogyakarta
- Budiharsono, Sugeng. 2005. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Cicin-Sain, 1998 *Perencanaan Dan Pengelolaan Pesisir Secara Sektoral*, Andi Yogyakarta
- Dahuri, Rokhimin, 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Dahuri, Rokhimin, 2000. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu* PT.Pradnya Paramita: Jakarta
- Dahuri, Rokhimin, 2000. *Kebijaksanaan Pendayagunaan Sumberdaya Laut dan Pesisir untuk Pengembangan Wilayah*. UI Press: Jakarta
- Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Departemen PU, *Kamus Tata Ruang*. : Jakarta
- Fadel Muhammad, 2010, *Analisis Ekonomi Sumber Daya Kawasan Komersil dalam Kaitannya dengan Pengembangan Kawasan Minapolitan* Paper disampaikan pada Seminar Nasional Ke-2 NRA Ekonomi Lingkungan dan Neraca Sumberdaya Alam, Yogyakarta, 20-21 September 2010
- Friedmann, 1966. *Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan; Suatu Pendekatan Teoritis*. BPFY-Yogyakarta: Yogyakarta

- Hoover dan Giarrantani , 1984. *Pertumbuhan Kawasan Pesisir*, UI Pers: Jakarta
- Ikatan Ahli Perencana Indonesia. 2008. *Pelatihan Perencanaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*. IAP : Makassar.
- Jayadinata, Johara T. 1991. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Perdesaan, Perkotaan, Wilayah*. ITB: Bandung
- Jufriadi, 2014, *Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, Deepublish, Yogyakarta
- Lincoln Arsyad, 1999. *Teori Pertumbuhan Wilayah*, Andi, Yogyakarta
- Pearce dan Robinson, 1998. *Swot Pengelolaan Organisasi*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta
- Peraturan Menteri Nomor : Per.12/Men/2010 Tentang Minapolitan
- Prihartini, 2001. *Analisis Spasial dan Regional*. UPP AMP YKPN: Jakarta
- PSDAL UNHAS dan Direktorat Bina Tata Perkotaan dan Pedesaan Departemen Pekerjaan Umum. 1997. *Tipologi Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai*.
- Rangkuti, Freddy. 1997. *Analisis SWOT Sebagai Konsep Perencanaan Untuk Menghadapi Abad 21*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rais, Jacob. 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2010-2030
- Rondinelli (1985), *Perkembangan wilayah (regional growth) dalam Penentuan Kawasan Pengembangan* . Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Sondita, 2001 *Pengembangan Wilayah; Memberdayakan Manusia Pesisir* . UI Press: Jakarta
- Soepono 1990, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir*, UI Press: Jakarta
- Sugiyono. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yudhistira: Surabaya

Sasmojo.S,1999. *Pertumbuhan Wilayah Kawasan Pesisir*, Pradinya Paramita : *Jakarta*.

Tarigan, Robinson. 2005. *Perencanaan Pengembangan Wilayah*. PT.Bumi Aksaral : *Jakarta*

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*

Undang-Undang No.22 tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU PWP3K)*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *Tentang Perikanan*

Warpani. S, 1984. *Analisis Kota dan Daerah*, ITB : *Jakarta*

